

**PERAN DAN KEBIJAKAN SOEKARNO
DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

Wawan Sulthon Fauzi

NIM. 14771036



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

**PERAN DAN KEBIJAKAN SOEKARNO
DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Menyelesaikan Program Pascasarjana
Magister Pendidikan Agama Islam

Pembimbing:
Triyo Supriyatno, Ph.D
Dr. Abdul Malik Karim A., M.Pd.I



Oleh:
Wawan Sulthon Fauzi
NIM. 14771036

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

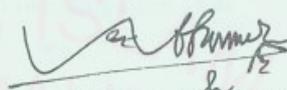
Tesis dengan judul “Peran dan Kebijakan Soekarno dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2019.

Penguji Utama


Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak

NIP. 196903032000031002

Ketua Penguji


Dr. H. Abdul Basith, M.Si

NIP. 197610022003121003

Pembimbing I


Triyo Supriatno, Ph.D

NIP. 197004272000031001

Pembimbing II


Dr. Abdul Malik Karim A., M.Pd.I

NIP. 197606162005011005

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 01 Februari 2019



Handwritten signature of Wawan Sulthon Fauzi.

Wawan Sulthon Fauzi

NIM. 14771036

KATA PENGANTAR



Seagala puja-puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan taufik, rahmah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa aral yang merintang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kaeharibaan sosok revolusioner peradaban dunia, baginda Rasulullah Saw yang telah menjadi uswatun hasanah dengan membawa pancaran cahaya kebenaran, sehingga pada detik ini kita masih mampu mengarungi hidup dan kehidupan yang berlandaskan iman dan islam.

Seiring dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini, tak lupa penulis menyampikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses penyusunannya, diantaranya :

1. Ibu dan Bapak, Fatimah dan Syuhadak, darinya semua doa dan kasih sayang, yang membuat penulis bangga menjadi anak kandung mereka. Setara dengan mereka berdua, Ibu dan Bapak mertua, Umi Erlinawati dan Sukardi, orang tua yang tulus dan penuh kasih serta penuh perhatian. Semoga rahmat Allah Swt, selalu bersama keempat orang tuaku.
2. Istri dan buah hati, Usnul Khotimah dan Gisa Ayu Gemintang. Mereka lebih berharga bagiku melebihi dunia dan seisinya.
3. Triyo Supriyatno, Ph.D selaku pembimbing I dan Dr. Abdul Malik Karim A.. M.Pd.I selaku pembimbing II. Tanpa beliau berdua, Tesis ini tidak akan tersusun sempurna.
4. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Mohammad Asrori, M. Ag., selaku Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam.

Dan masih banyak orang yang berjasa dalam penyusunan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain dari do'a *jazakumullah ahsanul jaza'*, Penulis berdo'a semoga amal dan dedikasi mereka kepada

penulis diridloi Allah SWT. sebagai amal yang diterima oleh-Nya. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya, *khoir al nas anfa'uhum lil nas. Amien ya robbal 'alamin!*

Malang, Februari 2019

Wawan Sulthon Fauzi

Penulis



MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Kamu adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia, menyuruh untuk menegakkan kebenaran (*humanisasi*), dan mencegah dari yang munkar (*liberasi*), dan beriman kepada Allah (*transendensi*). Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali Imran/3: 110)¹.



¹ Software Al-Qur'an in Word versi 07. Diakses bulan Agustus 2018.

SISTEM TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A/a	ط	T/ṭ
ب	B/b	ظ	Z/z
ت	T/t	ع	‘
ث	Th/th	غ	Gh/gh
ج	J/j	ف	F/f
ح	H/h	ق	Q/q
خ	Kh/kh	ك	K/k
د	D/d	ل	L/l
ذ	Dh/dh	م	M/m
ر	R/r	ن	N/n
ز	Z/z	و	W/w
س	S/s	ه	H/h
ش	Sh/sh	ء	’
ص	Ṣ/ṣ	ي	Y/y
ض	Ḍ/ḍ		

Bunyi hidup panjang (*madd*) ditunjukkan dengan menuliskan coretan di atas huruf *ā, ī, ū*. Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf *ay* dan *aw*, seperti *layyinah* dan *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifire*) atau *muḍāf ilayhi* ditransliterasikan dengan *ah*, seperti *akhlāq al-karīmah* dan *faḍā’il al-zakāh*, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan *at*, seperti *jannat al-na’īm*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
SISTEM TRANSLITRASI	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Pendidikan Islam	15
1. Pengertian Pendidikan Islam	15
2. Hakikat Pendidikan Islam	22
3. Tujuan Pendidikan Islam	26
4. Kurikulum Pendidikan Islam	31
B. Pengembangan Pendidikan Islam	33
1. Model Pemikiran Islam dalam Konteks Pengembangan	35
2. Strategi Pengembangan Pendidikan Islam	41
3. Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam	49
C. Tantangan Pendidikan Islam Masa Sekarang	55

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Sumber Data	65
C. Metode Pengumpulan Data	66
D. Metode Pengolahan Data	67
E. Analisa Data	68
F. Kerangka Penelitian.....	70

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Riwayat Hidup Soekarno	71
1. Kelahiran	71
2. Pendidikan	73
3. Organisasi dan Keterlibatan Soekarno dalam lahirnya Negara	77
4. Masa Kejatuhan dan Akhir Hayat Soekarno	88
B. Peran Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam	81
C. Kebijakan Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam	86

BAB V: PEMBAHASAN

A. Peran Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam	123
B. Kebijakan Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam	129

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	-----

ABSTRAK

Fauzi, Wawan Sulthon. 2019. *Peran dan Kebijakan Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Indonesia*. Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Soekarno, Peran dan Kebijakan, Pendidikan Islam.

Tesis ini membahas peran dan kebijakan Soekarno dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Judul ini diangkat oleh peneliti sebagai upaya menggali kembali gagasan dan tindakan Soekarno sebagai tokoh pendiri bangsa, dan karena Soekarno memiliki banyak tulisan yang bisa diteliti. Peneliti menganggap kajian tentang Soekarno dalam lingkup pemikiran Pendidikan Islam Indonesia yang progresif, masih cenderung kurang, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian terfokus pada dua persoalan, pertama, bagaimana peran Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia?, kedua, bagaimana kebijakan Soekarno dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peran dan kebijakan Soekarno dalam mengembangkan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan Indonesia.

Untuk menjawab persoalan diatas peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Datanya diperoleh dari sumber primer dan sekunder, meliputi dokumen, baik teks, audio, maupun video. Langkah penelitiannya, data dikumpulkan kemudian dipilah-pilah secara tematik, selanjutnya dianalisis dengan teknik *content analysis*, *language analysis*, *concept analysis*, dan *descriptive analysis*. Adapun interpretasi yang digunakan adalah hermeneutik dan historis.

Penelitian menunjukkan: (1) Peran Soekarno adalah penggagas pembaharuan pendidikan Islam progresif. Dasar pembaharuan Pendidikan Islam tersebut mencakup; pembaharuan kurikulum, budaya ilmiah dalam pendidikan, strategi dialog dalam pengajaran, visi Islam progresif dalam pendidikan. Dasar-dasar diatas diduga kuat menjadi landasan berdirinya madrasah formal di Indonesia. (2) Adapun kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam tercermin melalui peraturan pemerintah, yaitu mengakui sekolah madrasah setara dengan sekolah formal. Serta melalui UU Pendidikan dan Pengajaran, pendidikan agama Islam boleh diajarkan disekolah umum, meskipun masih cenderung seperti muatan lokal, belum menjadi kurikulum nasional yang diwajibkan, sebab harus dengan persetujuan orang tua murid.

Peneliti memberikan saran yang diambil dari penelitian ini, agar Islam kembali digairahkan dengan rasionalitas dan modernitas. Islam bukan sekedar agama ritual, Islam bukanlah ajaran yang mementingkan simbol-simbol belaka. Lebih dari semua itu, Islam merupakan ruh dan penggerak kehidupan. Nilai-nilai Islam meliputi semua hal, baik yang tersurat didalam Alqur'an hadist, maupun yang tersirat dalam hukum-hukum kausalitas alam yang rasional. Gagasan Islam inilah yang oleh Soekarno disebut Islam yang progresif.

ABSTRACT

Fauzi, Wawan Sulthon. 2019. Soekarno's Roles and Policies in Developing Islamic Education in Indonesia. Postgraduate Program of Islamic Education. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keywords: Soekarno, roles and policies, Islamic education.

This study discusses Soekarno's roles and policies in developing Islamic education in Indonesia as a determination to re-explore the ideas of Soekarno as a national figure as well as Indonesia's first president. This considers to be important because Soekarno was a great figure, not only for Indonesian, but also the world's community. This means that Soekarno was recognized and respected by other nations who agreed with him and those who were not. The study of Soekarno in the scope of progressive Indonesian Islamic philosophers tends to be sporadic. Therefore, the figure of Soekarno for Indonesian is merely known as a political expert as well as the initiator of nationalism, even though Soekarno talked and wrote a lot about Islam.

This study focused on two problems; the roles and policies of Soekarno in the development of Islamic education in Indonesia, and whether those roles and policies are still relevant to today's Islamic education. The results of this study are expected to provide an overview of Soekarno's roles and policies in developing Islamic education at the beginning of Indonesian independence, as well as seeing whether those policies are relevant Islamic education today.

This study is library research. The data consist of primary and secondary sources taken by using documentary methods in the form of text, audio, or video. The data collected sorted thematically, then analyzed by using content analysis techniques, language analysis, concept analysis, as well as descriptive analysis. Moreover, the interpretation used was hermeneutic and historical.

The results of this study revealed that (1) Soekarno's role in Islamic education in Indonesia was laying the foundations for the restitution of modern Islamic education. The basis of restitution of Islamic Education includes; curriculum, scientific culture in education, dialogue strategy in teaching, and progressive Islamic vision in education. Those were suspected to be the foundation of the establishment of Madrasah in Indonesia. In addition, Soekarno's policy in developing Islamic education was reflected through government regulations; recognizing Madrasah as same as public school. Based on the Education and Teaching Law, Islamic education was allowed to teach in public schools. Although it still tends to be like local content, it has not yet become an obligatory national curriculum, because it must be under the approval of parents. (2) Soekarno's policy in Islamic Education in Indonesia was still very relevant and needed today, because education without government's policy will be difficult to be implemented since it is the compulsion of the existence of Islamic education in Indonesia.

Thus, Islam was revived with rationality and modernity. Islam is neither just a sacramental religion, nor a doctrine that emphasizes symbols only. Moreover, Islam is the spirit and driving force of life. Islamic values encompass all things, both those expressed in the Al-Quran, as well as those implicit in the laws of rational natural causality. Islam is what Soekarno called progressive Islam.

Translator,  Septia Dwi Jayanti, M.Pd. NIDT: 19890912 12201802012223	Date January 30, 2019 The Director of Language Center,  Dr. H. Abdul Hamid, MA NIDT: 19730201 1998031007
--	---

مستخلص البحث

واوان سلطان فوزي. ٢٠١٩. دور سوكارنو وسياسته في تطوير التربية الإسلامية في اندونيسيا. رسالة الماجستير، قسم التربية الإسلامية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: سوكارنو، الدور والسياسة، والتربية الإسلامية.

ناقشت هذه الرسالة دور سوكارنو وسياسته في تطوير التربية الإسلامية في اندونيسيا. وقد تم اختيار هذا العنوان من قبل الباحث لأجل البحث عن أفكار سوكارنو وآراءه كقائد الأمة والرئيس الأول للجمهورية الإندونيسية. وافترض الباحث أن هذا الموضوع مهم للدراسة حيث أنّ سوكارنو قائد كبير؛ ليس في أعين شعب إندونيسيا فحسب، بل في المجتمع العالمي كلها. وهذا يعني أن أضواء سوكارنو معترفة ومحترمة عند الأمم؛ سواء كانت متفقة به أو لا. رأى الباحث الدراسة عن سوكارنو في نطاق المفكر المسلم الإندونيسي المتحرر لا تزال قليلة. بحيث كانت أضواءه في عيون المجتمع الإندونيسي معترفة بالقائد السياسي بالإضافة إلى مؤلف القومية مع أنه يتكلم ويكتب كثيرا عن الإسلام. لذلك، أجري هذا البحث.

أما بالنسبة لصياغة المشكلة في هذا البحث فقد ركز الباحث إلى مسألتين؛ هما دور سوكارنو وسياسته في تطوير التربية الإسلامية في اندونيسيا، و ما مدى ملائمتها مع التربية الإسلامية في هذا العصر. ويتوقع الباحث أن تعطي نتائج هذا البحث نظرة عامة عن دور سوكارنو وسياسته في تطوير التربية الإسلامية عند بداية استقلال إندونيسيا، ومعرفة مدى ملاءمة سياسته في مواجهة مشكلات التربية الإسلامية في الوقت الحالي.

استخدم الباحث منهج البحث المكتبي. تم الحصول على البيانات من مصادر، هما المصادر الأولية والثانوية بالطريقة الوثائقية؛ سواء كانت نصيا، مسجل صوتيا أو فيديو. بعد أن يجمع كلها قام الباحث بفرزها موضوعيا ثم يحلل بطريقة تحليل المحتوى، وتحليل اللغة، وتحليل المفاهيم، والتحليل الوصفي. وأما منهج التفسير المستخدم في تحليلها فهو التاريخي والتفسيري.

وأشارت نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) دور سوكارنو في التربية الإسلامية في إندونيسيا هو وضع أسس تجديد التربية الإسلامية الحديثة. وتشمل تحديث المناهج الدراسية، الثقافة العلمية في التربية، استراتيجية الحوار في التعليم، والرؤية الإسلامية المنحرفة في التعليم. تلك الأسس المذكورة تكون أساس بناء المدرسة في إندونيسيا. وانعكست سياسة سوكارنو في تطوير التربية الإسلامية من خلال اللوائح الحكومية مما تعترف بالمدارس الدينية متساوية مع المدارس العامة. وكذلك من خلال القانون بشأن التربية والتعليم، حيث يسمح تعليم التربية الإسلامية في المدارس العامة، وإن كان من ضمن المحتوى المحلي ولم يكن من المناهج الدراسية الوطنية الملزمة لأنها لا بد من موافقة الوالدين. (٢) سياسة سوكارنو في التربية الإسلامية في إندونيسيا لا تزال ملاءمة ومطلوبة في عصرنا الحالي، لأن التعليم دون سياسة الحكومة سيكون صعبا. ويرى الباحث أن سياسة الحكومة بوصفها المظلة القانونية هي من ملزمات وجود التربية الإسلامية في إندونيسيا.

وقدم الباحث الاقتراحات المستمدة من هذا البحث لإعادة روح الإسلام عقلا وقلبا وحداثا. الإسلام ليس مجرد طقوس دينية ولا دين مهتم بالرموز، بل أكثر منها. الإسلام هو روح ومحرك الحياة. وتشمل القيم الإسلامية كل الأشياء؛ مما كتب في القرآن والحديث وما ضمن في القوانين السببية الطبيعية العقلانية. وهذا ما يسميه سوكارنو بالإسلام الحر.

Penerjemah,  M. Mubasysyir Munir, M.Pd NIDT:19860513201802011215	Tanggal 29/1 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Abdul Hamid, MA 30201 1998031007
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah sejak lama umat muslim merisaukan kesenjangan yang hebat antara jumlah mayoritas umat Islam Indonesia dan kualitas kehidupan umat yang tertinggal pada hampir semua bidang, khususnya di bidang ilmu, teknologi, dan ekonomi. Masalah kualitas ini harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemimpin Islam agar kesenjangan itu secara berangsur dan sadar dapat dipertautkan. Posisi mayoritas tunakualitas akan menjadi beban Islam sebagai agama yang ingin membangun peradaban asri yang berkualitas tinggi dimuka bumi.² Maka akan menjadi keniscayaan bila ingin mengangkat kualitas umat muslim di zaman modern, pendidikan adalah jalan terbaik untuk menuntaskan persoalan kualitas ini. Sebab tanpa kualitas yang baik, umat muslim dunia tidak akan bisa bersaing dengan umat-umat lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya manusia tergantung dari pendidikan yang diperolehnya. Jika pendidikan yang diperoleh seseorang memiliki kualitas yang mumpuni, maka baik juga sumber daya manusia yang dimilikinya. Karena itu, desain pendidikan selayaknya dipersiapkan secara matang sehingga hasil yang dicapai pun memuaskan.³ Berbicara desain pendidikan berarti tak bisa lepas dari makna pengembangan pendidikan Islam itu sendiri, pengembangan dirasa penting sebab akan (1) memperkaya teori yang ada, atau (2) merevisi teori atau pemikiran yang sudah ada, atau (3) mengganti pemikiran

² A. Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Mizan Putaka, Bandung, 2009), halaman 224.

³ A. Syafi'i Ma'arif, *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta* (PT. Tiara Wacana: Yogyakarta, 1991), halaman 15.

atau teori lama dengan yang baru; dan/atau (4) menciptakan teori yang belum ada sebelumnya.⁴

Sebagaimana yang dikatakan H.A.R. Tilaar bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Meskipun tujuannya bukan merupakan tujuan yang tertutup (*eksklusif*) tetapi tujuan yang secara terus-menerus harus terarah kepada pemerdekaan manusia.⁵ Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia, yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya.⁶ Proses membentuk manusia yang merdeka ini merupakan esensi dari pendidikan berbasis karakter yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan publik.

Perubahan dalam pendidikan harus terus menuju ke arah yang lebih baik. Komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai taman yang penuh tantangan dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak tumbuh dan berkembang sebagai kodratnya, memenuhi potensi unik dirinya⁷, artinya pendidikan tidak boleh stagnan, pendidikan harus menjadi sarana anak mendapat pendidikan untuk mengembangkan bakatnya, pendidikan harus memiliki banyak strategi dengan konsep yang baik agar terwujud cita-cita tersebut.

Namun hingga saat ini pendidikan belum mampu mencapai titik idealnya yakni memanusiakan manusia, menurut Sulaiman Ibrahim, realita pendidikan justru sebaliknya yakni menambah rendahnya derajat dan martabat manusia. Eksistensi yang sebenarnya menjadi hak milik secara mutlak untuk *survive* dan mengendalikan hidup, ternyata hilang bersama arus yang menerpanya. Makna pendidikan yang belum terealisasikan ini

⁴ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), halaman 2.

⁵ H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2005), halaman. 119.

⁶ Ibid, H.A.R. Tilaar, halaman 120.

⁷ Surat edaran yang dikeluarkan Kemendikbud RI, Anies Baswedan, tertanggal 27 Juli 2016.

menurutnya terkait dengan situasi sosio-historis dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Seperti halnya penjajahan yang dilakukan barat (kolonialisme) terhadap bangsa Indonesia selama berabad-abad ternyata membawa dampak yang sangat serius terhadap pola pikir dunia pendidikan, sehingga amat berpengaruh juga terhadap proses pendidikan yang berlangsung.

Salah satu dampak yang paling buruk dari kolonialisme yang telah melanda negara jajahan-bukan Indonesia saja melainkan semua negara jajahan khususnya negara-negara Islam adalah dengan munculnya sebuah masyarakat kelas elit yang lebih tepat disebut sebagai “anak-anak yang tertipu”. Produk dari sistem pendidikan (Barat) yang mengagumkan ini didesain untuk membentuk sebuah kelas yang tercerabut dari tradisi budaya dan moralnya.⁸ Akibatnya, mereka membuang jauh-jauh budaya yang humanis untuk diganti dengan budaya materialis dan hedonis, yang makna keberahannya tidak lagi terealisasi dalam tindak dan perilaku sehari-harinya.⁹ Sehingga sering membuat kaum yang terdidik sering menjadikan barat sebagai acuan dalam melihat segala problematika hidup, dan cenderung mengagungkan segala hal yang bersumber dari barat, hingga lupa bahwa bangsanya sendiri memiliki budaya dan tradisi yang tinggi. Keadaan ini membuat para tokoh pendiri bangsa harus bekerja keras mengembalikan jati diri anak bangsa.

Menilik sejarah bangsa, persoalan jati diri bangsa erat kaitannya dengan model pendidikan yang diterapkan di bangsa ini, isu pengembangan pendidikan, khususnya Islam, sebagai solusi atas problematika diatas, banyak digagas oleh banyak tokoh, mulai yang beraliran nasionalis seperti Ki Hadjar Dewantara, hingga golongan pesantren tradisional seperti KH Hasyim As'ary dan pesantren modern, Imam Zarkasyi.

⁸ Sulaeman Ibrahim, *Pendidikan Sebagai Imperialisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000), halaman 81.

⁹ Ibid, Sulaeman Ibrahim, halaman 83.

Namun tidak hanya sosok yang kosen dibidang pendidikan saja yang bicara soal pendidikan Indonesia diawal kemerdekaan, Soekarno, presiden pertama Indonesia yang tersohor sebagai politisi ulung, menyinggung pula pendidikan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Banyaknya tokoh awal kemerdekaan yang membincang pendidikan untuk anak bangsa dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan masing-masing menunjukkan betapa para pendahulu negeri ini sadar akan pentingnya formulasi yang sesuai dan cocok untuk diterapkan, dalam hal ini adalah pendidikan Islam.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamain* diharapkan benar-benar menjadi solusi atas segala problematika sosial. Tentu hal ini tidak terpisahkan dengan model pendidikan Islam yang harus diterapkan untuk masyarakat. Pendidikan dengan konsep yang baik, menjadi keniscayaan. Lebih-lebih pendidikan Islam, yang secara sejarah telah mengakar jauh sebelum negeri ini berdiri, namun bagaimana pendidikan Islam ini mampu bertahan dengan model masyarakat modern, ini adalah soal strategi. Jika dilihat dari kecenderungan atau gejala sosial baru yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang mereka harapkan, maka sebenarnya lembaga pendidikan Islam memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan. Marno dan Triyo Supriyatno menjelaskan bahwa pendidikan Islam masih cukup bisa diharapkan, bahkan disinyalir mampu menjadi pendidikan alternatif di negeri ini, karena beberapa kecenderungan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, terjadi mobilitas sosial, yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. *Kedua*, munculnya kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), terutama pada masyarakat perkotaan. *Ketiga*, arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi dengan arif.¹⁰

¹⁰ Marno & Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Refika Aditama, Bandung, 2008), halaman 8.

Lebih lanjut, penulis tertarik meneliti pendidikan dalam sudut pandang Soekarno, lebih fokusnya untuk pendidikan Islam. Menurut Soekarno pendidikan dapat digunakan sebagai sarana transformasi bagi masyarakat Muslim. Baginya pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan pada umumnya, merupakan arena untuk menggali pengetahuan dan mengasah akal serta mengembangkan intelektualitas. Tidak berlebihan ketika Soekarno mengatakan bahwa motor hakiki dari semua *rethinking of Islam* adalah kembalinya penghargaan atas akal.¹¹

Jika melihat sejarah bangsa, dalam upaya memerdekakan masyarakat dari belenggu penjajah, sangat diakui membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Seluruh unsur elemen masyarakat, berjuang menghabiskan waktunya melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari sekian masyarakat yang ada waktu itu, ada beberapa orang yang memiliki peran penting yang salah satunya adalah Soekarno.¹²

Soekarno adalah sosok sejarah bangsa yang tidak bisa dipungkiri. Hadirnya membawa banyak pemikiran yang menurut sebagian orang dianggap cukup kontroversi, khususnya ketika beliau berbicara Islam, sebab secara sejarah, Soekarno bukanlah kaum santri, dimana pada awal kemerdekaan, pesantren adalah satu-satunya embrio sekaligus pegiat pendidikan Islam di Indonesia. Badri Yatim menegaskan bahwa Soekarno keturunan penganut ajaran theosofi Jawa, dan ibunya adalah penganut agama Hindu Bali.¹³ Sehingga bisa dimaklumi jika banyak yang menuduhnya abangan.

Bagi pengikutnya, Soekarno memiliki pemikiran dan pemahaman Islam yang progresif. Terbukti banyak didalam karya beliau, mengkritik pemikiran umat Islam yang terlalu bernostalgia untuk menghidupkan kembali abad kejayaan Islam (*golden age of Islam*) namun melupakan modernitas zaman yang secara konteks sangat berbeda. Berbagai

¹¹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* Jilid I dan II, (Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), halaman 375.

¹² Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung 1966), halaman 17.

¹³ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Ciputat: Logos, 1999), halaman 1.

gagasan dan pemikiran Soekarno tentang Islam dan pendidikannya, tak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi sosial saat ia tumbuh berkembang. Masa mudanya diwarnai dengan penindasan dan diskriminasi yang luar biasa dari penjajahan belanda. Kolonialisme yang dilakukan belanda nampaknya cukup menyudutkan warga pribumi untuk berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana belanda begitu ketat dalam memberikan kebijakan dan peraturan terkait pendidikan pada pribumi, khususnya pendidikan Islam. Tilaar menyebutkan bahwa pada masa penjajahan, sesuai dengan misi kolonialisme, pendidikan Islam begitu dianak-tirikan. Pendidikan Islam dikategorikan sebagai sekolah liar. Bahkan pemerintah kolonial telah memproduksi peraturan-peraturan yang membatasi, atau justru mematikan sekolah-sekolah partiker, termasuk pesantren, dengan mengeluarkan peraturan yang disebut *Wilde Schoolen Ordonantie* pada 1933.¹⁴ Pada saat Belanda mengeluarkan peraturan tersebut, Soekarno tepat berusia 32 tahun, umur yang cukup matang untuk memahami dan kritis terhadap situasi sosialnya.

Jauh sebelum diterbitkannya *Wilde Schoolen Ordonantie*, pemerintah kolonial sebenarnya juga pernah mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan “Ordonansi Guru” (Ordonansi 1905 dan 1925) yang menyebutkan bahwa izin tertulis untuk mengajar harus diberlakukan kepada Islam; bahwa daftar mata pelajaran dan murid-murid harus diketahui dan bahwa metode pengawasan pemerintah juga harus dibuat.¹⁵ Tampaknya Belanda cukup serius memonitoring gerak pendidikan Islam di Hindia Belanda waktu itu. Ordonansi itu secara khusus dimaksudkan untuk membatasi gerakan guru-guru agama, dan secara umum dimaksudkan untuk menghambat kemajuan Islam.¹⁶

Dalam kaitan ini, Soekarno yang banyak menyuarakan pentingnya pembaruan pendidikan Islam, mengungkapkan kegelisahannya perihal nasib lembaga pendidikan

¹⁴ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka cipta, 2000), halaman 169

¹⁵ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (Jakarta: Teraju, 2003), halaman 36.

¹⁶ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), halaman 149.

Islam, di antaranya pesantren. Saat itu, pesantren yang seharusnya memaksimalkan fungsi-fungsi pendidikan Islam memang malah justru menjadi pusat pembangkit sentimen anti Belanda (*a centre of anti Dutch sentiment*).¹⁷ Bagi masyarakat pesantren, pemerintah kolonial Belanda dianggap dapat memberikan pengaruh negatif bagi sikap keberagamaan serta budaya mereka. Rasa ketersisihanlah yang membuat pesantren terbawa pada sikap alergi dan penuh curiga terhadap segala nilai-nilai kebaruan (modern) dari Barat. Pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang konservatif.¹⁸

Sebagai tokoh revolusi, Soekarno mengalami pergolakan pemikiran, baik secara sosial, politik, budaya maupun agama. Pergolakan pemikiran yang banyak terjadi dimasa mudanya, menjadikan ia sosok yang matang dalam melihat dan memahami begitu heterogennya masyarakat Indonesia. Terlihat secara empiris bagaimana Soekarno mampu menyatukan seluruh elemen bangsa menjadi satu kesatuan di bawah ideologi pancasila. Elemen-elemen tersebut berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, ras, adat, dan agama yang berbeda-beda. Mengenai pemikiran Soekarno tentang politik nasional yang mampu menyatukan berbagai elemen diatas, menjadikan beliau sosok negarawan sekaligus politikus ulung. Sosoknya sebagai seorang politikus sudah tak bisa diragukan lagi, namun dalam persoalan pendidikan Islam, masih banyak yang belum dibahas secara komprehensif.

Pemikiran Soekarno tentang pendidikan Islam adalah konsekuensi logis dari latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang ia terima. Soekarno, seperti kita ketahui, tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren atau madrasah. Soekarno hanya mengenyam pendidikan ala Barat yang diselenggarakan Belanda di Indonesia. Namun bagi Soekarno, pendidikan ala Barat membantu

¹⁷Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), halaman 240.

¹⁸Mahmud Arif, , *Pendidikan Islam Transformatif*, (LKiS, Yogyakarta: 2008), halaman 178-179.

berkembangnya aliran Islam modern di Indonesia. Soekarno sendiri mengaku ia lebih menghargai Islam setelah membaca buku-buku Islam yang modern dan *scientific*.¹⁹

Jika peneliti runut dari berbagai buku dan catatan sejarah, menunjukkan, Soekarno juga bicara tentang Islam bahkan pada tataran pendidikan Islam yang tepat untuk bangsa Indonesia. Misalnya dalam karya beliau "Islam Sontoloyo", mengungkapkan kegelisahan Soekarno terhadap stagnasi pemikiran Islam Indonesia yang dalam proses pendidikannya hanya berkutat persoalan hukum Fiqh. Berikutnya pada buku "Di Bawah Bendera Revolusi" pada jilid pertama yang merupakan kumpulan *Surat-surat Islam dari Ende*, saat beliau diasingkan oleh belanda ke Flores tahun 1933, Soekarno juga mengkritik bagaimana pola pikir umat Islam yang terlalu terbuai oleh masa keemasan Islam abad pertengahan, hingga melupakan modernitas zaman. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau tentang Islam.

Dari literatur-literatur sejarah yang masih bisa diteliti, penulis berharap sosok Soekarno tidak hanya dikenal sebagai ahli politik atau ahli militer saja, sebagaimana yang sudah termashur pada dirinya. Penulis ingin mencoba mengenalkan atau menghadirkan Soekarno sebagai sosok pemikir Islam yang handal, sosok pemikir Islam yang modern, yang menyejarah seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, atau Muhammad Abduh dari Mesir. Meski dirasa hal tersebut cukup berlebihan dalam konteks pemikiran Islam, namun setidaknya, ada upaya penelitian bahwa diantara tokoh-tokoh sejarah bangsa Indonesia ini, banyak yang berfikir tentang Islam yang progresif, khususnya dalam hal peran dan kebijakan untuk pengembangan pendidikan Islam. Dan karena itulah, penelitian ini dilakukan.

¹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid 1, (Jakarta, Penerbit Karangan Presiden:1965). halaman 337.

B. Rumusan Penelitian

Penelitian ini memiliki satu rumusan utama, yaitu peran dan kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian dari fokus penelitian tersebut dibentuk menjadi dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Soekarno dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan Soekarno dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan judul "*Peran dan Kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia*" ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan peran Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam Indonesia
2. Untuk mendiskripsikan kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "*Peran dan Kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia*" ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. Diantaranya pihak-pihak sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wacana dan literatur ataupun khazanah keilmuan terutama tentang peran dan kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

b. Pengambil Kebijakan Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan pendidikan nasional dalam aspek sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam hal kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

c. Peneliti

Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat literal untuk mengisi khazanah pemikiran pendidikan Islam sekaligus untuk memperkaya khazanah pustaka pendidikan Islam kontemporer. Disamping itu juga diharapkan dapat memberi kekayaan pemikiran serta pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa penelitian pemikiran Soekarno tentang pengembangan pendidikan Islam bukanlah penelitian yang pertama. Hal ini disebabkan Soekarno adalah tokoh besar republik Indonesia, *the founding father*, semua sisi dalam hidupnya dikaji dan diteliti dalam berbagai sudut pandang.

Penelitian-penelitian terdahulu yang serumpun dengan tema yang kami angkat, baik berbentuk tesis, disertasi maupun jurnal, kami paparkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Soekarno Tentang Modernisasi Pendidikan Islam. Disusun oleh Syamsul Kurniawan, S.Th.I pada tahun 2009.

Masalah yang diteliti adalah; bagaimana pemikiran Soekarno tentang modernisasi pendidikan Islam?, dan apakah pemikiran Soekarno tentang modernisasi pendidikan Islam masih cocok pada saat ini?

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan model interpretasi dengan pendekatan hermeneutika yang dipakai oleh Hans George Gadamer. Pengumpulan datanya, model dokumenter. Dari metode yang digunakan tersebut menghasilkan kesimpulan: Soekarno berpendapat kunci utama ketertinggalan umat Islam dunia ini adalah dalam hal modernitas. Jika umat Islam mampu melakukan pembaharuan, maka Islam akan menjelma menjadi kekuatan transformatif dan perunahan dunia. Berikutnya, pemikiran Soekarno tentang modernisasi dan visinya bagi pendidikan Islam memang selalu berorientasi pada kemajuan. Nampak jelas, bahwa

gagasan yang dikemukakan Soekarno tersebut cukup relevan dengan persoalan pendidikan Islam kontemporer.

2. Demokrasi Pendidikan ala Soekarno dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam. Disusun oleh Sukma Umbara Tirta Firdaus. Jurnal Al-Ibroh, Juni 2016.

Masalah yang diteliti adalah; Bagaimana pemikiran Soekarno tentang Demokrasi pendidikan? Dan apa implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam?.

Dalam menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik sebagai model interpretasi dari gagasan Soekarno yang berbentuk teks, sedang peneliti lebih cenderung memosisikan sebagai *reader*. Dari penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa; Pendidikan yang harus mampu menumbuhkan sikap peserta didik yang kritis, demokratis, terbuka dan bebas dalam mengemukakan pendapat dan melakukan tindakan. Soekarno menegaskan bahwa kebebasan (kemerdekaan) berpikir harus dikembangkan dan menjadi jiwa dari pendidikan di Indonesia. Implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam adalah, bahwa dalam pendidikan Islam juga harus demikian, pelaksanaan proses belajar-mengajar harus dilaksanakan secara demokratis yang membuat para peserta didik merasa nyaman, semangat dan percaya diri dalam belajar. Pola pembelajaran dalam pendidikan Islam yang masih tradisional (*konvensional*) harus di rubah dengan pola-pola pendidikan yang lebih dinamis dan *modern* sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Soekarno dan pemikirannya tentang agama, politik, dan pendidikan Islam. Jurnal JIA, Juni 2016.

Masalah yang diteliti adalah apa dan bagaimana pemikiran Soekarno tentang agama, politik, dan pendidikan Islam. Dalam menjawab persoalan diatas penulis menggunakan pendekatan hermenutik, berusaha menafsiri karya-karya Soekarno.

Dalam penelitian yang ia lakukan menghasilkan kesimpulan; Bahwa menurut Soekarno, agama Islam adalah agama yang sangat dinamis, sehingga jika disebarluaskan secara ilmu pengetahuan dan Islam akan mengalami kemunduran jika yang lebih disebarluaskan justru hadits yang lemah dan bukan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi sumber utama. Pemikirannya tentang politik tampak dengan tegas bahwa sikap nasionalisme tidak akan terbentuk jika tidak ada sikap gotong-royong yang baik. Nasionalisme harus dijalankan dengan konsep dasar peri-kemanusiaan, yaitu suatu konsep dimana harus dijalankan sosio-demokrasi, artinya untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat banyak, khususnya di Indonesia, dan bukan mengabdikan kepada sekelompok kecil. Adapun pemikiran Soekarno tentang pendidikan Islam yang mendasar adalah tentang pendekatan filosofis *platform* yang menjiwai seluruh dimensi kehidupan. Dalam konteks ini pendidikan perlu sebuah *open system*, dan bukannya *close system* yang menutup dirinya, akan tetapi seharusnya membuka ruang dialog kultural dengan kehendak atau kebutuhan masyarakat.

Sejauh hasil penelitian yang diketahui oleh peneliti, masih belum ada yang mencoba melakukan penelitian tentang peran dan kebijakan Soekarno dalam Pengembangan Pendidikan Islam secara fokus dan komprehensif. Maka penelitian ini bisa diartikan melanjutkan penelitian sebelumnya yang sifatnya masih belum sempurna dan mencoba melakukan penelitian yang sekiranya belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

F. Definisi Istilah

Peran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perangkat tingkah laku atau tindakan Soekarno, termasuk di dalamnya adalah gagasan atau ide dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk peran diteliti karena dianggap sebagai dasar

memahami pola sekaligus tindakan tokoh dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia.

Adapun kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai aktualisasi dari ide atau gagasan, keputusan-keputusan tersebut meliputi keputusan yang bersifat undang undang, maupun keputusan yang bersifat peraturan pemerintah.

Selanjutnya adalah pendidikan Islam, dalam penelitian ini Pendidikan Islam diartikan sebagai satuan lembaga yang bercirikan Islam, meliputi lembaga formal maupun non formal, termasuk juga mencakup pendidikan Islam sebagai kurikulum mata pelajaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memenuhi tata urutan dan memudahkan kerangka berfikir dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang tesis ini, yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya, definisi operasional, batasan masalah, desain penulisan yang dibagi menjadi empat bagian yaitu metode pembahasan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teori atau kajian pustaka, dimaksudkan untuk memberikan pra-wacana sebelum masuk dalam pembahasan utama yakni bagaimana peran dan kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam. Karena itu, sub bahasan yang akan disajikan adalah seputar konsep pendidikan Islam, model strategi pengembangan pendidikan Islam, dan pendidikan Islam masa sekarang untuk melihat relevansi penelitian dengan situasi sekarang.

Bab III : Metodologi penelitian. Meliputi jenis pendekatannya, sumber data yang akan dikumpulkan, serta bagaimana teknik pengumpulannya. Dilanjut cara melakukan analisa data yang diperoleh, ditutup kerangka teknis penelitian.

Bab IV : Paparan data dan temuan penelitian, dibab empat ini meneliti memaparkan data dan temuan penelitian. Paparan data ini disusun dengan mengumpulkan semua data kemudian mereduksi sesuai tema atau unsur topik yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu, dari hasil paparan data, peneliti mulai merumuskan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, hasil dari jawaban inilah yang disebut temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, dibab ini peneliti mempertegas kembali jawaban-jawaban yang lebih umum dari rumusan masalah. Juga dalam hal ini adalah membandingkan teori pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan teori-teori pengembangan pendidikan yang ada dalam literature.

Bab VI : Kesimpulan, sekaligus penulis memberikan saran-saran bagi penulis selanjutnya berkaitan dengan kebijakan Soekarno.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan mencoba merangkai berbagai tulisan dan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada awal pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan pentingnya pengembangan pendidikan Islam dalam penelitian ini. Untuk lebih memberikan pemahaman yang utuh tentang pendidikan Islam sebagai kerangka dasar penulisan penelitian ini, maka perlu untuk membahas secara singkat beberapa konsep tentang pendidikan Islam. Dan dalam bahasan selanjutnya peneliti akan membahas lebih mendalam tentang pengembangan pendidikan Islam secara umum dan mendasar untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang pendidikan Islam yang selanjutnya akan digunakan untuk pijakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

A. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

1. Pengertian Pendidikan Islam

Membincang persoalan definisi merupakan aspek dasar dalam memahami arti sesuatu secara mendasar. Pengertian ini dirasa sangat penting dan harus cukup memberi gambaran utuh tentang apa itu pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam seringkali mengundang keragaman arti. Pendidikan Islam, seringkali dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti sempit yaitu proses belajar mengajar dimana Agama Islam menjadi bagian kurikulum formal atau dipahami sebagai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pemaparan definisi dari beberapa tokoh sangat diperlukan sehingga dapat mempermudah arah pemahaman tentang pendidikan Islam hingga menjadi tema sentral dalam merumuskan konsep pendidikan Islam.

Pendidikan Islam bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang menjadikan Islam sebagai identitasnya, baik dinyatakan dengan semata-mata maupun tersamar. Perkembangan terakhir memberikan pengertian bahwa

pendidikan Islam diberi arti lebih substansial sifatnya, yaitu bukan sebagai proses belajar mengajar, maupun jenis kelembagaan, akan tetapi lebih menekankan sebagai suatu iklim pendidikan atau “*education atmosphere*”, yaitu suatu suasana pendidikan yang islami, memberi nafas keislaman pada semua elemen sistem pendidikan yang ada.²⁰

Disisi lain pendidikan Islam juga bisa dipahami sebagai pendidikan yang didirikan serta diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat (rencana yang sungguh-sungguh) dan semangat untuk memanifestasikan atau mengejawantahkan nilai-nilai Islam, yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan maupun program pendidikan dan pelaksanaannya sebagaimana tercakup dalam lima program dan praktik pendidikan Islam.²¹ Dalam pengertian lainnya pendidikan Islam juga dimaknai sebagai segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam.²²

Sehingga, pendidikan Islam merupakan dimensi yang menyeluruh. Bisa dilihat dari kelembagaannya, bisa pula visi lembaganya, bahkan Muhaimin mengatakan pendidikan Islam bisa dilihat dari niat, hasrat dan visi lembaga, artinya pendidikan Islam bukan lagi persoalan lembaga yang dibawah naungan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sudah melintasi hal tersebut.

Menurut Lodge dalam bukunya *Philosophy of Education* sebagaimana yang dikutip Tobroni menyatakan bahwa pendidikan adalah “*In the wider sense, all experience is said to the educative life is education, and education is life*”. Sedangkan dalam pengertian sempit Lodge mengemukakan pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan

²⁰ Tobroni, *Pendidikan Islam, Paradigma Teologis Filosofis dan Spiritualitas* (UMM Press, Malang 2008), halaman 13.

²¹ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2003), halaman 13.

²² Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 28.

latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya. Dalam pengertian lebih khusus lagi Lodge menyatakan bahwa pendidikan dalam praktiknya identik dengan “sekolah”, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur.²³ Maka jika diamati, konsep pendidikan yang dikemukakan Lodge dapat digolongkan kepada aliran esseinsialis ataupun parennialis, karena menitik beratkan kepada proses perpindahan atau transfer perilaku maupun budaya dari senior kepada juniornya.

Dalam pengertian yang lebih luas, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak mendidik orang tuanya, seperti pula halnya murid mendidik gurunya, bahkan seekor anjing mendidik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan, kerjakan kita lakukan adalah semuanya mendidik kita. Dalam pengertian yang lebih luas ini, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini, pendidikan berarti, bahwa prakteknya identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur. Artinya pendidikan juga berarti pembangunan kembali atau penyusunan kembali pengalaman sehingga memperkaya arti perbendaharaan pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan arah tujuan pengalaman selanjutnya. Definisi pendidikan ini menentukan proses dalam diri pribadi manusia, yaitu suatu kemampuan untuk memugar dan meremajakan pengalaman sehingga memungkinkan individu secara kontinyu tumbuh berkembang. Dengan demikian rumus

²³ *Ibid*, Tobroni, halaman 11.

akhir dari pendidikan sebagai proses adalah terwujudnya manusia dewasa yang sukses dalam kehidupan.

Ahmad Tafsir menambahkan bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang sempurna.²⁴ Kepribadian yang utama atau dalam pengertian yang lebih luas pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud pengembangan pribadi ialah yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain. Sehingga yang menjadi kesimpulan utamanya adalah pendidikan menyangkut persoalan yang luas serta kompleks. Pendidikan bukan hanya sifat pengajaran yang hanya mewariskan kemampuan kognitif saja akan tetapi adalah usaha pengerahan seluruh potensi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendidikan nantinya berfungsi sangat erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan sekaligus sebagai proses penyadaran sosial yang signifikan.

Berikutnya, bagaimana dengan pendidikan Islam, apakah pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sama persis dengan berbagai konsep pendidikan secara umum yang telah di paparkan diatas, atau kemudian pendidikan Islam memiliki model tersendiri, yang benar-benar memiliki bentuk yang berbeda dengan pendidikan umum?, penulis akan paparkan beberapa pendapat tokoh pendidikan Islam sebagai berikut.

Zuhairini dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, merumuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁵

²⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung, P.T Remaja Rosda Karya 1992, halaman 25-26.

²⁵ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) halaman 152.

Adapun Sutrisno menekankan pentingnya dimensi tauhid dalam pendidikan Islam, sebab inilah perbedaan paling menonjol antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan Islam merupakan usaha sadar untuk membimbing manusia menjadi pribadi beriman yang kuat secara fisik, mental, dan spriritual, serta cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan yang diperlukan bagi kebermanfaatan dirinya, masyarakatnya, dan lingkungannya.²⁶

HM. Djumransjah dan Abdul Malik KA. merumuskan bahwa pendidikan Islam setidaknya mencakup 3 unsur yaitu: (1) Pendidikan Islam sebagai usaha bimbingan ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam; (2) Pendidikan Islam sebagai usaha untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan-latihan akal fikiran (kecerdasan), kejiwaan, keyakinan, kemauan dan perasaan serta panca indera dalam seluruh aspek kehidupan manusia; (3) Pendidikan Islam sebagai bimbingan secara dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar), baik secara individual maupun kelompok sehingga manusia mampu memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar.²⁷

Pada bukunya yang lain, Abdul Malik K. A. menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki makna sebagai proses pengembangan dan penyelamatan fitrah manusia. Pendidikan Islam tidak hanya Jasmani, rohani, jiwa, bahkan akalnya saja, akan tetapi bagaimana agar keempat potensi tersebut berkembang dan “selamat” (Islam).²⁸ Abdul Malik K. A. memberi penekanan akan keseimbangan potensi yang dimiliki manusia untuk berkembang secara beriringan dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Konsep

²⁶ Sutrisno dan Muhyidin Albarosis, *Pendidikan Berbasis Sosial* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012) halaman 22.

²⁷ Djumransyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam; menggali tradisi menehukkan eksistensi*, (UIN-Malang Press, Malang, 2007), halaman 19-20.

²⁸ Abdul Malik K.A. *Pendidikan Islam Kontemporer* (UIN-PRESS, Malang, 2017), halaman57.

pendidikan Islam yang di kemukakan Abdul Malik K. A. mengharapkan output manusia yang di hasilkan oleh lembaga pendidikan Islam adalah manusia yang menyeluruh dalam mengembangkan dirinya sebagai hamba Allah Swt, tidak terpisah-pisah dalam mengembangkan potensi yang diberikan Allah Swt padanya.

Sedangkan Azzumardi melihat pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad Saw. Melalui proses yang mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifa di muka bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar *transfer knowledge* tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Di Indonesia pendidikan Islam memiliki begitu banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah, maupun pendidikan nonformal seperti pengajian, arisan dan sebagainya. Untuk institusi pendidikan lembaga formal dewasa ini adalah sekolah dan madrasah. Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan istilah madrasah ini digunakan untuk satu jenis pendidikan Islam di Indonesia, meskipun demikian, madrasah sebagai satu sistem pendidikan islam berkelas dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu keagamaan dan non keagamaan sudah tampak sejak awal abad 20, walaupun pada saat itu sebageian di antara lembaga-lembaga pendidikan itu masih menggunakan istilah *School*.²⁹

Sedangkan menurut Muhaimin, pendidikan Islam intinya ada dua, yaitu: pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sehingga

²⁹ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), halaman 141.

dalam praktiknya, pendidikan Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu:

1. Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah, yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan (Islam) formal seperti Pondok Pesantren/Madrasah Diniyah (Ula, Wustha, ‘Ulya, dan Ma’had ‘Ali)
2. Madrasah dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung dibawah Departemen Agama
3. Pendidikan usia dini/TK, sekolah/ perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam
4. Pelajaran agama Islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, dan atau sebagai program studi, dan Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan atau di forum-forum kajian keislaman, seperti: majelis ta’lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat, atau pendidikan (Islam) melalui jalur pendidikan non formal dan informal.³⁰

Berbagai definisi dari para tokoh diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadianya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indra) serta ketrampilan-ketrampilan. *Kedua*, pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. *Ketiga*, pendidikan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangannya manusia dalam mencapai tujuannya. Artinya bahwa pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia

³⁰ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Raja Grafindo, Jakarta: 2009), halaman 14.

yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Serta membentuk kepribadian seseorang menjadi insan ulul kamil, manusia yang utuh rohani dan jasmani, dapat berkembang secara wajar dan normal. Jadi, dapat diutarakan bahwa konsepsi pendidikan model Islam, paradigma pendidikan Islam tidak hanya pada sebagai upaya pencerdasan semata, tetapi juga penghambaan diri kepada Tuhannya.

2. Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia. Segera setelah anak dilahirkan dan sebelum dilahirkan sudah terjadi proses belajar pada diri anak, hasil yang diperolehnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pemenuhan kebutuhannya. Oleh sebab itulah pendidikan dapat disebut sebagai budayanya manusia. Menurut John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.³¹ Pernyataan ini membuktikan bahwa setiap manusia dan kelompok sosialnya memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alamiah sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.

Sementara itu, menurut Zakiyah Daradjat, hakikat pendidikan mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatikan satu segi saja, seperti segi akidah, ibadah, atau akhlaknya saja, melainkan mencakup seluruhnya, bahkan lebih luas dari pada itu semua. Dengan kata lain pendidikan Islam memiliki perhatian yang lebih luas dari ketiga aspek tersebut. Hal ini menjadi titik tekan

³¹ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 67.

bagi Zakiyah Daradjat, karena baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam pada umumnya hanya memfokuskan pada satu aspek saja.³² Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan oleh ajaran Islam. Pendidikan Islam juga menjangkau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang. Selain itu, pendidikan Islam memberikan perhatian pada semua aktifitas manusia serta mengembangkan hubungan antara dirinya dengan orang lain. Pendidikan Islam juga berlangsung sepanjang hayat, mulai dari manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya sampai berakhir hidup di dunia ini.

Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sistem peradaban mengisaratkan pentingnya pendidikan. Isarat ini terjelaskan dari berbagai muatan dalam konsep ajarannya. Salah satu diantaranya melalalui pendekatan termonologi. Secara *derifatif* Islam itu sendiri, memuat berbagai makna, salah satu di antaranya yaitu kata *sullam* yang makna asalnya adalah tangga. Dalam kaitanya dengan pendidikan, maka ini setara dengan makna peningkatan kualitas sumber daya insani.³³

Maka konsep pendidikan menurut pandangan Islam harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek kesejahteraan, aspek kebebasan, aspek ruang lingkup dan aspek tanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan aspek keagamaan adalah bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Maksudnya adalah apakah ajaran Islam memuat informasi pendidikan hingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam. Sedangkan aspek kesejahteraan merujuk kepada latar belakang sejarah pemikiran para ahli tentang pendidikan dalam Islam dari zaman ke zaman, khususnya mengenai ada tidaknya peran Islam dalam bidang pendidikan dalam kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian yang dimaksud dengan aspek kebebasan adalah bagaimana pembentukan konsep pendidikan

³² Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 242.

³³ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 70.

atas dasar pemahaman secara etimologi. Selanjutnya aspek ruang lingkup diperlukan untuk mengetahui tentang batas-batas kewenangan pendidikan menurut ajaran Islam. Demikian pula perlu diketahui siapa yang dibebankan tugas dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan mendidik, yaitu siapa yang menurut ajaran Islam dibebankan kewajiban itu.³⁴

Dengan demikian pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi baik yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat. Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi "keimanan" dan "kesalehan", yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah "nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran dan hadits.

Allah Swt dalam hal ini sebagai *rabbul'alam* dan *rabbunna*s. Kata "rabb" mempunyai pengertian yang luas antara lain meliputi: menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, menyayangi, memberi makan, memberi petunjuk, menumbuhkan dan mengembangkan. Semua pengertian itu dapat dirangkum dalam istilah mendidik.

³⁴ Ibid, Jalaludin..., halaman 71.

Karena itu untuk istilah pendidikan, dikalangan kaum muslimin terkecuali pendapat syeh Muhammad al-Naquib al-Attas, dipakai istilah “tarbiyah”, yang merupakan masdar (kata jadian dari akar kata “rabb”, rabba-yurabbi-tarbiyah-tarbiyyatan).³⁵

Kalau kata *rabb* dirangkai dengan kata *al-amin* atau *al-nas* mengandung pengertian bahwa Allah yang mendidik, yaitu menciptakan, memiliki, menyayangi, memelihara, menumbuhkan, mengarahkan, membimbing dan mencukupi kebutuhan manusia dan alam secara evolusioner (berangsur-angsur) sehingga mencapai kesempurnaan. Seperti kita saksikan bahwa alam ini mempunyai keteraturan dan kesempurnaan yang luar biasa dan manusia mempunyai potensi yang luar biasa pula untuk mengolah alam dan menciptakan peradaban. Sedangkan khalifah secara sederhana dapat diartikan sebagai pemegang amanat atau madataris dari Allah Swt. Dengan demikian tugas pendidikan dalam Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas hidup manusia dalam memerankan fungsinya mewujudkan *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian persoalan pendidikan dalam Islam adalah persoalan hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya.³⁶

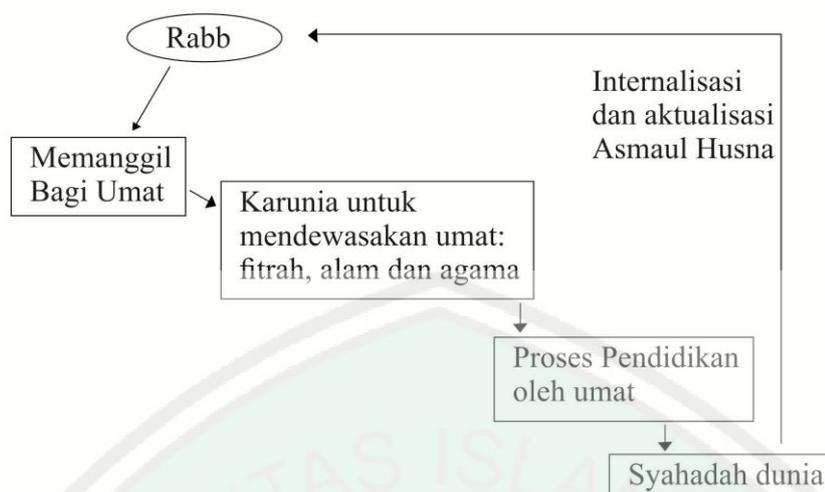
Skema diatas memperlihatkan bagaimana internalisasi nilai-nilai *ilahiah* kedalam diri manusia sebagai proses *khaliifatul fil ard*. Dalam hal ini aktualisasi nilai-nilai tersebut bagian dari strategi yang perlu direncanakan agar manusia mampu memahami konsep tersebut. Tobroni menggambarkan deskripsi tersebut dalam bentuk tema sebagai berikut:³⁷

Internalisasi nilai-nilai *ilahiah* kedalam diri manusia
sebagai proses *khaliifatul fil ard*

³⁵ Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas* (Malang: UMM Press, 2008), halaman 18.

³⁶ Ibid, Tobroni, halaman 12.

³⁷ Ibid, Tobroni, halaman 18.



3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan dalam proses pendidikan Islam adalah idealitas cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak di capai dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Tujuan pendidikan Islam dengan demikian merupakan pengembangan nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik pada akhir dari proses tertentu. Dengan istilah lain, tujuan pendidikan Islam menurut M Arifin adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam pribadi manusia didik yang di ikhtiarkan oleh pendidik muslim dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.³⁸

Menurut Ahmad Janan Asifuddin, jika dikaitkan dengan tujuan penciptaannya, setidaknya ada empat tujuan hidup manusia, yang bisa menjadi kerangka dasar tujuan pendidikan Islam. Empat tujuan tersebut terdapat dalam Alquran:³⁹

³⁸ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), halaman 61.

³⁹ Ahmad Janan Asifuddin, *Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2010), halaman 56.

Tujuan pertama, beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah di terangkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku

Tujuan kedua, menjadi khalifah Allah SWT. di bumi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Tujuan ketiga, mendapatkan ridlo Allah SWT., sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَمَرُونَ ۗ وَمَنْ يُؤْتِ اللَّهُ إِثْمًا فَخَبَرَهُ لَمْ نُكَفِّرْهُ إِلَّا بِأَنْ يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ وَسِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Tujuan keempat, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 201-202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ ٢٠١

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" 202. mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Untuk mencapai tujuan utama pendidikan yang tersebut di atas secara optimal. Maka pencapaian tujuan tersebut harus di lakukan secara bertahap dan berjenjang. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan Islam harus mengacu kepada tujuan yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain:

a. Dimensi Penciptaan Manusia

Berdasarkan dimensi ini, tujuan pendidikan Islam di arahkan kepada pencapaian target yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia oleh Allah SWT. Dari sudut pandang ini, maka pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar menjadi pengabdian kepada Allah yang setia. Berangkat dari tujuan ini maka aktivitas pendidikan di arahkan kepada upaya membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama Allah. Jadi di dimensi ini diarahkan pada pembentukan yang bersikap taat asas terhadap pengabdian kepada Allah.

b. Dimensi Tauhid

Mengacu kepada dimensi ini, maka tujuan pendidikan Islam diarahkan kepada upaya pembentukan sikap takwa. Dengan demikian pendidikan di tujukan kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, Jalaludin, halaman 93-94.

c. Dimensi Moral

Dalam dimensi ini manusia di pandang sebagai sosok individu yang memiliki potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak di lahirkan, pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang di peroleh secara fitriah. Dalam hubungan dengan dimensi moral ini, maka pelaksanaan pendidikan di tunjukan kepada upaya pembentukan manusia sebagai pribadi yang bermoral. Tujuan pendidikan dititik beratkan pada upaya pengenalan terhadap nilai-nilai yang baik dan kemudian menginternalisasikan serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan perilaku melalui pembiasaan.

d. Dimensi Perbedaan Individu

Manusia merupakan makhluk penciptaan yang unik, secara umum manusia memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dimensi individu dititik beratkan pada bimbingan dan pengembangan potensi fitra manusia dalam statusnya sebagai insan. Dengan demikian dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik, perlakuan terhadap individu harus pula di dasarkan atas pertimbangan perbedaan ini.⁴¹

e. Dimensi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu dimensi sosial mengacu kepada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang di dasarkan kepada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, tujuan pendidikan di arakan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku. Berangkat dari hal inilah maka pendidikan dalam dimensi sosial dititik beratkan pada bagaimana upaya untuk membimbing dan

⁴¹ Ibid, Jalaludin, halaman 95-96.

mengembangkan potensi peserta didik agar dapat berperan secara harmonis dan serasi dalam kehidupan bermasyarakat, jadi secara singkat tujuan pendidikan Islam dalam dimensi ini, adalah berupa usaha untuk memanusiakan peserta didik agar mampu berperan dalam statusnya sebagai *al-nas* (makhluk sosial), *abd Allah* (hamba pengabdian Allah) dan sekaligus sebagai *khalifa Allah*.⁴²

f. Dimensi Sosial

Dalam hubungan dengan dimensi profesional, pendidikan Islam mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan diarahkan kepada upaya untuk membimbing mengembangkan potensi peserta didik, sesuai dengan bakatnya masing-masing dengan demikian tujuan pendidikan Islam dalam dimensi diarahkan pada pembentukan kemampuan profesional yang di landasi keimanan serta ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

g. Dimensi Ruang dan Waktu

Selain dimensi yang dikemukakan di atas, tujuan pendidikan Islam juga dirumuskan atas dasar pertimbangan dimensi ruang dan waktu, yaitu di mana dan kapan Secara garis besar tujuan yang harus di capai pendidikan Islam harus merangkum semua tujuan yang terkait dalam rentang ruang dan waktu. Dan bila dikatakan dengan dimensi ruang dan waktu, pendidikan Islam diarahkan pada tujuan utama yaitu untuk memperoleh keselamatan di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat.⁴³

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam; yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial

⁴² Ibid, Jalaludin, halaman 98.

⁴³ Ibid, Jalaludin, halaman 99-100.

masyarakat bangsa dan negara pribadi yang bertaqwa ini dapat menjadi *rahmatan lil alamin* baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup dalam islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Selain tujuan umum itu terdapat pula tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Tujuanm khusus ini lebih *praxis* sifatnya, sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan lebih *praxis* itu dapat dirumuskan harapan yang ingin dicapai di dalam tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil yang telah dicapai.⁴⁴

4. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum merupakan syarat mutlak pendidikan modern, hal ini berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pendidikan atau pengajaran, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan.

a. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum telah dikenal dalam dunia pendidikan sebagai suatu istilah yang tidak asing lagi, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti *currere* yang mempunyai arti jarak yang harus di tempu dalam kegiatan berlari mulai dari permulaan (*start*) sampai pada terakhir (*finish*). pengertian ini kemudian di terapkan dalam bidang pendidikan. Kata kurikulum yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti *manhaj*, yaitu jalan yang terang atau jalan terang yang di lalui oleh manusia pada bidang kehidupannya.⁴⁵ Definisi-definisi tentang kurikulum, juga telah banyak dirumuskan oleh

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), halaman 8.

⁴⁵ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 10.

para ahli pendidikan, dari pengertian yang lama sampai pengertian yang modren (sekarang). Menurut Hilda Taba yang dikutip oleh Nana Syaodih Sukamadinata, mengemukakan bahwa kurikulum adalah mencakup dari semua tujuan, isi dan metode secara luas sedangkan yang lebih sempit mengandung pengertian sebagai tugas pengajar.⁴⁶

Berbeda dengan Sailor Alexander dan Luwis yang dikutip oleh Wina Sanjana, bahwa kurikulum mempunyai pengertian sejumlah mata pelajaran yang harus di tempuh oleh peserta didik.⁴⁷ Sedangkan menurut Ronald C Doll, mengemukakan bahwa, kurikulum tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan diajarkan akan tetapi kurikulum adalah seluruh pengalaman yang diberikan kepada anakanak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah baik pengalaman itu berlangsung di sekolah, di rumah dan masyarakat.⁴⁸

b. Ciri-ciri Kurikulum Pendidikan Islam

Tentang kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Toumy yang di kutip oleh H.M Chabib Thoaha, memberikan kurikulum pendidikan agama dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan tujuan dan akhlaqul karima, baik dalam tujuan pegajaran, materi dan cara pelaksanaanya
- 2) Cakupannya meluas dan menyeluruh, baik ditinjau dari aspek jasmaniyah, psikologi maupun spritual
- 3) Adanya keseimbangan antara syariat dengan ilmu akliyah.

⁴⁶ Nana Syaodih Sukadinata, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), halaman 6.

⁴⁷ Wina Sanjana, *Pembelajaran Dalam Implementasi KBK*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 2.

⁴⁸ Dede Rosada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), halaman 26.

- 4) Kurikulum yang memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realitis, mencakup penghidupan dan bertitik tolak dari ke-Islaman yang ideal, seperti merasa bangga menjadi umat Islam.
- 5) Kurikulum tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, mengacu pada kesatuan Islam, dan selaras dengan integrasi psikologi yang Allah ciptakan untuk manusia serta selaras dengan kesatuan pengalaman yang diberikan kepada anak didik.⁴⁹

B. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif atau kualitatif. Secara kuantitatif bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih besar, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan pada umumnya. Secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam jauh lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide-ide dasar atau nilai-nilai Islam itu sendiri yang seharusnya selalu berada didepan dalam merespons dan mengantisipasi berbagai tantangan pendidikan. Termasuk dalam pengertian kualitatif adalah bagaimana mengembnagkan pendidikan Islam agar menjadi suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat nasional dan trans-nasional, serta pengembangan iptek.⁵⁰

Pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam menuntut kita untuk selalu berfikir inovatif dan kreatif, karena sifatnya yang progresif. Situasi ini kemudian banyak melahirkan banyak perbedaan para pemikir atau tokoh pendidikan Islam. Ada yang masih bersikukuh dengan cara-cara klasik, bahkan ada yang dengan serta merta membawanya dengan cara-cara yang melupakan asas atau fondasi pendidikan Islam itu sendiri demi pengembangan pendidikan Islam.

⁴⁹ Ibid, Chabib Thoha, halaman 9.

⁵⁰ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), halaman 1.

Menurut Muhaimin dalam bukunya yang lain, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, ada tiga pokok atau tiga dimensi yang dibidik dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu:

(1) *Foundational problems*, yang terdiri atas *religious foundation and philoshopic foundational problems* serta fondasi yuridis/hukum; dan *empiric/scientific foundational problems* yang menyangkut dimensi-dimensi fondasi historis, sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomi dan politik. (2) *Structural problems*, ditinjau dari struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan kedalam kota, desan dan desa terpencil; dari struktur jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula; dari struktur ekonomi bisa dikategorikan kaya, menengah, miskin, fakir; dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga karir dan nonkarir; dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategoriakn ke dalam pendidikan paud, SD, SMA, PT dan seterusnya;

(3) *Operational problem*, yang secara mikro menyangkaut keterkaitan berbagai faktor/unsur/komponen dalam pendidikan Islam, misalnya hubungan interaktif lima faktor pendidikan; peserta didik, alat-alat pendidikan Islam (kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana/prasarana, media/sumber, evaluasi, biaya, humas, dan lain-lain), dan lingkungan atau konteks pendidikan. Atau bisa bertolak dari hubungan inpiy, proses (*Instrumental & environmental*), dan output serta *outcome*. Sedangkan secara makro, menyangkut keterkaitan pendidikan islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁵¹

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam dapat mengandung berbagai makna, yaitu: (1) bagaimana mengembangkan pendidikan islam sehingga memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan pengembnagan iptek; (2) bagaimana mengembangkan model

⁵¹ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006), halaman 12.

pendidikan Islam yang lebih kreatif dan inovatif, dengan tetap komitmen terhadap dimensi-dimensi fondasionalnya sebagai landasan pijak bagi pengembangan pendidikan Islam; (3) bagaimana menggali masalah-masalah operasional dan aktual pendidikan Islam untuk dibidik dari dimensi-dimensi fondasional dan strukturalnya; dan (4) bagaimana mengembangkan pemikiran pendidikan islam sebagaimana tertuang dan terkandung dalam literatur-liteatur pendidikan Islam.

a. Model Pemikiran Islam dalam Konteks Pengembangan Pendidikan

Diskursus dan pemahaman tentang pemikiran strategi pengembangan pendidikan Islam sangat penting karena dengan itu dapat mendorong untuk mengkaji model dan tipe sekaligus menelusuri strategi untuk mengembangkan pendidikan Islam. Muhaimin dalam bukunya *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* menyebutkan bahwa ada empat model pemikiran keislaman yaitu:⁵²

Pertama, model *Tekstualis Salafi* berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Alqur'an dan Assunnah dengan melepaskan diri dari dan kurang begitu mempertimbangkan situasi kongret dinamika pergumulan masyarakat muslim (era klasik maupun kontemporer) yang mengitarinya. Masyarakat yang diidamkan adalah masyarakat salaf, yakni struktur masyarakat era kenabian Muhammad Saw. dan para sahabat yang menyertainya, model yang pertama ini sangat mementingkan dalil-dalil nash ayat-ayat Alqur'an dan Alhadits tanpa menggunakan pendekatan keilmuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa model tekstualis salafi lebih bersikap regresif dan konservatif, karena menggunakan masyarakat salaf sebagai parameter untuk menjawab tantangan zaman.

⁵² Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011), halaman 24.

Dalam konteks pemikiran pendidikan, terdapat dua mazhab yang lebih dekat dengan model tekstualis salafi, yaitu perennialism dan essentialism, terutama dilihat dari wataknya yang regresif dan konservatif. Dalam konteks pemikiran pendidikan Islam, model tekstualis salafi tersebut selain menyajikan secara manquli, yakni memahami atau menafsirkan nash-nash tentang pendidikan dengan nash yang lain, atau dengan menukil dari pendapat sahabat, juga berusaha membangun konsep pendidikan Islam melalui kajian tekstual-lughawi atau berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam memahami nash Alqur'an, hadist Nabi dan kata-kata sahabat, serta memperhatikan praktik pendidikan masyarakat Islam sebagaimana yang terjadi pada era kenabian dan sahabat, untuk selanjutnya berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan praktik pendidikan tersebut hingga sekarang.

Kedua, model *Tradisional Mazhabi* berupaya memahami ajaran dan nilai mendasar yang terkandung dalam Alqur'an dan Assunnah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik, namun seringkali kurang begitu mempertimbangkan situasi sosio-historis masyarakat setempat di mana ia turut hidup didalamnya. Hasil pemikiran ulama terdahulu dianggap sudah pasti atau absolut tanpa mempertimbangkan dimensi historisitasnya. Masyarakat muslim yang di idealkan adalah masyarakat muslim era klasik, dimana persoalan agama dianggap telah dikupas habis oleh para ulama dan cendekiawan muslim terdahulu. Pola pikirnya selalu bertumpu pada hasil ijtihad ulama terdahulu dalam menyelesaikan persoalan ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan pada umumnya. Kitab kuning menjadi rujukan pokok, dan sulit untuk keluar dari mazhab atau pemikiran keislaman yang terbentuk beberapa abad yang lalu.

Dalam konteks pendidikan Islam, model tersebut berusaha membangun konsep pendidikan Islam melalui kajian terhadap khazanah pemikiran pendidikan Islam karya para ulama pada periode-periode terdahulu, baik dalam bangunan tujuan pendidikan, kurikulum

atau program pendidikan, hubungan pendidikan dan peserta didik, metode pendidikan, maupun lingkungan pendidikan (konteks belajar) yang dirumuskannya. Bahkan ia juga merujuk atau mengadopsi produk-produk pemikiran pendidikan dari cendekiawan non-muslim terdahulu tanpa dibarengi dengan daya kritis yang memadai.

Ketiga, model *Modernis* berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Alqura'an dan Assunnah dengan hanya semata-mata mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio-historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat muslim kontemporer (era iptek dan modernitas pada umumnya), tanpa mempertimbangkan muatan-muatan khazanah intelektual muslim era klasik yang terkait dengan persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Model ini tidak sabar dalam menekuni dan mencermati pemikiran Islam klasik, malahan lebih bersikap potong kompas, yakni ingin langsung memasuki teknologi modern tanpa mempertimbangkan khazanah intelektual muslim dan bangunan budaya masyarakat muslim yang terbentuk berabad-abad. Obsesi pemikirannya adalah pemahaman langsung terhadap nash Alqur'an dan langsung loncat ke peradaban modern.

Dalam konteks pemikiran pendidikan, terdapat suatu mazhab yang lebih dekat dengan pemikiran modernis tersebut, yaitu *Progressivism* terutama dalam hal wataknya yang menginginkan sikap bebas dan modifikatif. *Progressivism* menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif, tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus menerus, agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelegen dan mampu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan dari lingkungan. Sebagai asas dari *Progressivism* adalah "*all reality characterized by constant change, that nothing is permanent except the principle of change it self*" yaitu perubahan itu mutlak, tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri.

Muhamin berpendapat bahwa dalam konteks pendidikan Islam, sikap bebas dan modifikatif tersebut bukan berarti kebebasan mutlak tanpa adanya keterikatan. Menjadi modernis berarti progresif dan dinamis. Hanya saja kemoderan itu bersifat relatif, terikat ruang dan waktu, yang modern mutlak hanyalah Tuhan itu sendiri. Kemoderan dengan demikian berada dalam suatu proses penemuan kebenaran-kebenaran yang relatif menuju kepada kebenaran yang mutlak. Dalam praktiknya produk pemikiran pendidikan Islam semacam ini terkadang terjebak pada pandangan dikotomis. Untuk menghindari hal tersebut, maka proses pendidikan Islam yang bertendensi ke arah kemajuan tersebut perlu mendasarinya dengan nilai-nilai kewahyuan.

Keempat, model *Neo-Modernis* berupaya memahami ajaran dan nilai mendasar yang terkandung dalam Alqur'an dan Assunnah dengan mengikutsertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Jadi, model ini selalu mempertimbangkan Alqur'an dan Assunnah, khazanah pemikiran Islam klasik, serta pendekatan keilmuan yang muncul abad 19 dan 20 M. Jargon yang sering dimunculkan adalah *Al-muhafadzah 'ala al-Qodimi al-Sholih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Aslah*, yakni memelihara hal-hal yang baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

Dengan demikian jargon yang dikumandangkan oleh Neo-Modernis tersebut menggarisbawahi perlunya para pemikir, pemerhati, dan pengembang pendidikan Islam untuk mendudukan pemikiran dan pengembangan pendidikan yang dilakukan pada era kenabian dan sahabat serta oleh para ulama terdahulu sebagai pengalaman mereka dan

dalam konteks ruang dan zamannya, untuk selanjutnya perlu dilakukan uji falsifikasi,⁵³ agar ditemukan relevansi konteks sekarang dan yang akan datang.

Dari uraian diatas nampaknya Muhaimin cukup berpihak pada model Neo-Modernis dimana model ini cukup ramah dengan masa lalu dan masa depan. Artinya Neo-Modernis memiliki posisi seimbang dalam melihat dan mengkaji bagaimana memahami persoalan dengan kaca mata essentialism namun cukup rekonstruktif dan progresif, hal ini menjadikan pemikiran pendidikan Islam tidak kaku namun tetap memiliki jati diri.

Sedangkan menurut Munawir Sadzali yang dikutip oleh Tobroni dalam bukunya *Pendidikan Islam; Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas* menyebutkan ada tiga pola pemikiran pendidikan Islam,⁵⁴

Pertama, Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama wahyu sebelumnya. Islam adalah puncak agama-agama samawi karena itu ajarannya mencakup segala aspek kehidupan. Kalangan ini biasanya mengemukakan pernyataan bahwa Islam mengatur dari permasalahan kecil seperti bagaimana adab masuk kamar kecil sampai masalah kenegaraan, kemanusiaan, ekonomi dan lain sebagainya, termasuk didalamnya adalah pendidikan. Kelompok ini biasanya dijuluki dengan kelompok universalis, bersikap lebih radikal dan dalam memahami Islam umumnya lebih skripturalis. Ciri lain dari kelompok ini adalah sangat mengagungkan bentuk sosial maupun pendidikan ala era Rasulullah Saw. sehingga segala hal barimaternya adalah zaman Nabi.

⁵³ Falsifikasi adalah suatu paham atau pemikiran yang berpendapat bahwa setiap teori yang dikemukakan manusia tidak akan seluruhnya sesuai dengan hasil observasi atau percobaan. Dengan kata lain menurut pandangan falsifikasionisme, ilmu dipandang sebagai satu set hipotesa yang bersifat tentatif untuk menggambarkan atau menghitung tingkah laku suatu aspek dunia atau universe. Jadi bagi mereka tidak ada suatu ilmu yang dibuat manusia bisa seratus persen sama apabila dikonfrontasi dengan hasil pengamatan dari kenyataan yang ada. (Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, edisi II (Penerbit Rake Sarasin: 2015) halaman 92.

⁵⁴ Ibid, Tobroni, halaman 15.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, memahami Islam sebagai agama ritual saja. Diluar persoalan tersebut manusia punya hak otonom untuk mengatur hidupnya melalui akal budinya. Kelompok ini berpendapat tidak ada pendidikan Islam, yang ada pendidikan Islami. Kelompok ini secara epistemologis berada dalam kawasan bebas nilai. Islam tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung pada *human beingnya*, artinya Islam hanya menempati kawasan aksiologis. Sehingga pendidikan dikatakan Islami atau tidak berfokus pada *outcome* bukan persoalan pendidikan secara formal beridentitas Islam atau tidak.

Ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa Islam bukanlah sebuah sistem kehidupan yang praktis dan baku, melainkan sebuah sistem nilai dan norma yang dinamis, yang perlu dipahami berdasarkan setting sosial dan dimensi ruang dan waktu. Karena itu secara praktis dalam Islam tidak ada aturan atau mekanisme detail tentang pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Akan tetapi umat manusia yang diberi amanah sebagai khalifah diperintah untuk membangun sebuah sistem praktis dalam segala aspek melalui akalnya. Sederhananya, Islam hanya menyediakan bahan baku, sedangkan sistem operasionalnya manusialah yang meramunya. Kelompok ini biasanya dipelopori oleh kalangan cendekaiawan. Islam adalah petunjuk hidup yang menghidupkan. Islam tidak memberikan petunjuk terhadap semua aspek kehidupan manusia yang bersifat baku dan operasional. Yang diberikan petunjuk rinci dan operasional hanya ibadah mahdhah dan beberapa hal terkait persoalan keluarga yang mnyangkut kedudukan dan waris. Sedangkan terkait muamalah, Islam banyak memeberikan petunjuk umum berupa nilai, etik, moral, postulat maupun hipotesis sejarah. Berkaitan dengan pendidikan, Islam mengategorikan

urusan muamalah sehingga Islam hanya memberi asas, tujuan, dan nilai etis berkenaan dengan oprerasionalisasinya.⁵⁵

Pendapat tersebut sebenarnya tidak ada yang salah sehingga tidak perlu satu sama lain saling menyalahkan. Persoalan pemahaman itu relatif kebenarannya, sedangkan yang absolut kebenarannya hanya Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam kaitannya dengan persoalan hidup dan kehidupan ini. Menurut Tobroni pendapat ketigalah yang mendekati prinsip kebenaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

b. Strategi Pengembangan Pendidikan Islam

Dalam proses pendidikan, diperlukan perhitungan tentang kondisi dan situasi dimana proses tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Tujuannya hendak dicapai menjadi terarah karena segala sesuatunya direncanakan secara matang. Oleh sebab itu, pendidikan Islam memerlukan strategi dalam melaksanakan proses pendidikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Juga agar dalam proses tersebut tidak ditemui hambatan serta gangguan baik internal maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan atau lingkungan sekitarnya.

Strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Taktik adalah segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan sesuai rencana. Dalam proses pendidikan, taktik tidak lazim digunakan, biasanya taktik banyak dikenal dalam lingkungan militer, dalam pendidikan taktik diistilahkan metode atau teknik. Metode dan teknik mempunyai pengertian yang berbeda meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang harus dimulai untuk mencapai tujuan. Sedangkan teknik adalah cara *mengerjakan* sesuatu. Jadi, metode mempunyai pengertian

⁵⁵ Ibid, Tobroni, halaman 17.

lebih luas dan lebih ideal serta konsensual. Namun, strategi yang baik adalah bila dapat melahirkan metode yang baik pula, sebab metode adalah suatu cara pelaksanaan strategi.⁵⁶

Strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan atau seni mendayagunakan semua faktor/kekuatan untuk mengamankan sasaran kependidikan yang hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasionalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada. Termasuk pula perhitungan tentang hambatan-hambatannya baik berupa fisik maupun bersifat nonfisik (seperti mental spritual dan moral baik dari subjek maupun lingkungan sekitar). Strategi pendidikan dapat pula diartikan sebagai kebijakan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan.⁵⁷

Dengan demikian strategi pendidikan Islam adalah seperti yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya antara lain:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: ...dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu,... (QS. Alqashas: 77)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا
فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Almujudalah: 11)

⁵⁶ H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta; 2003), halaman 39.

⁵⁷ Mudhofir, *Teknologi Instruksional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), halaman 79.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Aljumu'ah: 2)

Dan ayat lainnya adalah tentang pentingnya pembinaan akhlaq sesuai contoh tingkah laku Nabi sendiri sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: ..dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. Alqalam: 4)

Selanjutnya dalam hal strategi pendekatan teknisnya, Tobroni mengemukakan bahwa ada beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu:

1. Strategi dengan pendekatan humanistik

Dalam strategi humanistik terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma behavioris, paradigma rasionalis, dan paradigma humanis. Dimana dalam praktiknya, ketiga strategi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki paradigma yang berbeda pula.

a. Paradigma behavioris

Paradigma behavioris berpendapat bahwa: *pertama*, perilaku manusia atau anak didik itu terbentuk oleh pengaruh orang dewasa terutama orang tua dan guru. Dalam psikologi pendidikan pendapat ini mirip dengan aliran empirisme Jhon Lock yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir itu bagai kertas putih dimana perkembangannya sangat di tentukan oleh faktor lingkungan.

Kedua, tindakan anak didik mengikuti hukum stimulus-respon, sehingga bersifat reaktif. Peran guru yang baik dalam pendidikan harus pandai-pandai menciptakan stimulus sehingga akan melahirkan respon positif dan aktif dari siswa. *Ketiga*, hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*) memegang peranan penting. Asumsinya adalah anak melakukan tindakan positif (memenuhi permintaan guru atau aturan) karena mengharapkan atau respon adanya hadiah, sebaiknya maka menghindari perbuatan negatif karena takut atau sebagai bentuk respon untuk menghindari hukuman. guru yang baik adalah yang banyak memberikan hadiah baik berupa materi atau non materi seperti pujian, sanjungan. *Keempat*, tujuan pendidikan menurut *behaviorisme* lebih menekankan *to have* dari pada *to be*, yakni, yang terpenting guru sudah memberikan stimulus berupa pengetahuan, motivasi, wawasan, dan keterampilan.⁵⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa peran guru atau hadirnya guru dalam sistem pendidikan anak ini sangat vital.

b. Paradigma rasionalis

Paradigma ini berpendapat: *Pertama*, perilaku manusia itu dipertimbangkan oleh kognisi. Pendidikan haruslah dapat memperkokoh intelektualitas dan mengembangkan pengetahuan sebanyak-banyaknya; *Kedua*, rasionalitas memegang peranan penting, rasio adalah panglima yang akan menentukan keberhasilan anak didik kelak; *Ketiga*, tujuan pendidikan yang utama adalah mengembangkan intelektual atau aspek kognitif anak.⁵⁹ Intelektualitas seorang anak menjadi faktor dominan bagaimana seorang anak mampu secara mandiri menyelesaikan masalahnya. Artinya, faktor kognitif perlu dikembangkan secara sistematis, penuh perencanaan yang terukur agar hasil pengembangan kognisi anak berkembang dengan maksimal.

⁵⁸ Ibid, Tobroni, halaman 121.

⁵⁹ Ibid, Tobroni, halaman 122.

c. Paradigma humanis

Paradigma humanisme berpendapat bahwa: *Pertama*, perilaku manusia itu dipertimbangkan oleh *multiple intellegency*nya. Bukan hanya kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Dua kecerdasan tersebut tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan hidup anak didik. *Kedua*, anak didik adalah makhluk yang berkarakter dan berkepribadian serta aktif dan dinamis dalam perkembangannya, bukan benda yang pasif dan hanya mampu bereaksi atau merespon faktor eksternal.⁶⁰ Ia memiliki potensi bawaan yang penting. Karena itu pendidikan membentuk anak didik sesuai dengan keinginan guru, orang tua atau masyarakat, melainkan membentuk kepribadian dan *self concept*. Kepribadian dan *self concept* itulah yang paling memegang peranan penting. *Ketiga*, berbeda dengan behaviorisme yang lebih menekankan *to have* dalam orientasi pendidikannya, humanisme justru menekankan *to be* dan aktualisasi diri. Biarlah anak didik menjadi dirinya sendiri, peran pendidikan adalah menciptakan kondisi yang terbaik melalui motivasi, pengilhaman, pencerahan dan pemberdayaan. *Keempat*, pembelajaran harus terpusat pada diri siswa (*student centered learning*). Siswalah yang aktif, yang mengalami dan yang paling merasakan adanya pembelajaran. Bukan semata-mata guru yang mengajar, yang memberikan stimulus atau beraktualisasi diri.

2. Strategi dengan pendekatan integralistik

Pendidikan saat ini masih memandang siswa dengan potensinya sebagai sebuah hasil yang parsial. Menurut Tobroni ada tiga cara pandang parsial yang terjadi dalam melihat anak didik. *Pertama* sebagian besar proses pengajaran ditujukan hanya pada otak, sedangkan persoalan ruhani menjadi tugas pendidikan

⁶⁰ Ibid, Tobroni, halaman 123.

agama dan budi pekerti, urusan jasmani menjadi kajian pendidikan guru olah raga dan urusan emosi menjadi kajian guru seni. Sehingga, jika terjadi persoalan pencurian maka siswa dianggap gagal dalam matapelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ataupun jika terjadi siswa yang depresi atau mudah putus asa dalam menghadapi masalah maka siswa dianggap gagal dalam pelajaran seni, dan seterusnya.⁶¹

Akibat cara pandang dan perlakuan yang parsial dan tidak adil terhadap anak didik ini, banyak pengamat pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia mengalami kegagalan. Setiap pergantian semester orang tua dipaksa membeli setumpuk buku baru, tetapi penghayatan terhadap isi buku itu kosong, kepekaan, kepedulian dan sampai anak didik canggih, tetapi penghayatan dan pengamalan rendah, akhlaqnya kurang terpuji, kepada orang tua kurang menghormati dan seterusnya.

Parsialisasi kedua adalah cara pandang terhadap kurikulum. Sekolah selama ini lebih mengutamakan kurikulum formal (*formal curriculum*) yaitu kurikulum sebagaimana yang ada dalam silabi dan buku paket. Guru sudah merasa selesai tugasnya apabila telah mengajarkan atau menyampaikan isi silabi itu kepada anak didik. Sedangkan kurikulum yang tersembunyinya kurang, seperti keteladanan, kualitas pelayanan, kepedulian, kepekaan, yang lebih berpengaruh dalam pembentukan karakter anak didik justru kurang diperhatikan. Akibatnya interaksi guru-murid lebih dominan sebagai bentuk interaksi transaksional dari pada interaksi edukatif.

Bentuk parsialisasi yang ketiga juga terjadi dalam memandang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikapling-kapling secara ekstrim antara satu dengan lainnya seakan terpisah dan tidak memiliki keterkaitan: ilmu agama dengan ilmu umum, ilmu sosial

⁶¹ Ibid, Tobroni, halaman 124.

dengan ilmu eksakta. Persoalan tidak berhenti sampai disitu, ketegangan juga terjadi antara pemilik kapling-kapling tersebut. Misalnya saja kita lihat di sekolah menengah atas, siswa yang mengambil jurusan eksakta akan merasa lebih superior dibanding anak jurusan sosial maupun bahasa. dan cenderung anak eksakta berperilaku lebih “dingin” secara sosial dibanding dengan anak jurusan sosial. Parsialisasi terhadap anak didik, kurikulum, dan ilmu pengetahuan tersebut tentu membawa persoalan bagi proses pendidikan maupun maksimalisasi pencapaian hasilnya. Karena itu, diperlukan adanya reintegrasi.⁶² dan reintegrasi tersebut dilakukan tidak dengan membongkar paradigma ilmu pengetahuan, melainkan melalui spriritualitasi *human beingnya* baik guru maupun peserta didik.⁶³

Dalam perspektif Islam, persoalan kecerdasan tak hanya sebatas kecerdasan akal atau *intellectual quotien* atau tidak hanya berhenti pada pembentukan anak yang memiliki kecerdasan majemuk seperti yang dikemukakan Howard Gardner. Pendidikan islam diharapkan mampu mendayagunakan berbagai kecerdasan itu agar keberadannya bermanfaat dan punya nilai masalah bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan petunjuk, bagaimana mendayagunakan kecerdasan tersebut secara baik dan benar. Pertama, anak harus menggunakan kecerdasan majemuk untuk memahami, mengenali, dirinya. Sebab hal tersebut akan melahirkan kecerdasan spiritualitas, sehingga akan akan membentuk aqidah yang kuat dalam diri anak. Hal ini relevan dengan wahyu Alqur’an pada surat Al-Alaq, yang inti dari surat itu adalah membaca (*reading*), memahami (*understanding*) dan memaknai (*meaning*) terhadap hakekat diri dan lingkungan dengan kaca mata spiritualitas.⁶⁴ dan reintegrasi tersebut dilakukan tidak dengan membongkar paradigma ilmu pengetahuan, melainkan melalui spriritualitasi *human beingnya* baik guru maupun peserta didik.

⁶² Reintegrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: Penyatuan kembali atau pengutuhan kembali.

⁶³ Ibid, Tobroni, halaman 125.

⁶⁴ Ibid, Tobroni, halaman 124.

Dalam perspektif Islam, persoalan kecerdasan tak hanya sebatas kecerdasan akal atau *intellectual quotien* atau tidak hanya berhenti pada pembentukan anak yang memiliki kecerdasan majemuk seperti yang dikemukakan Howard Gardner. Pendidikan islam diharapkan mampu mendayagunakan berbagai kecerdasan itu agar keberadannya bermanfaat dan punya nilai masalah bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan petunjuk, bagaimana mendayagunakan kecerdasan tersebut secara baik dan benar. Pertama, anak harus menggunakan kecerdasan majemuk untuk memahami, mengenali, dirinya. Sebab hal tersebut akan melahirkan kecerdasan spiritualitas, sehingga akan membentuk aqidah yang kuat dalam diri anak. Hal ini relevan dengan wahyu Alqur'an pada surat Al-Alaq, yang inti dari surat itu adalah membaca (*reading*), memahami (*understanding*) dan memaknai (*meaning*) terhadap hakekat diri dan lingkungan dengan kaca mata spiritualitas.⁶⁵ Hal ini mengisyaratkan bahwa hal terpenting yang perlu dibangun dari seorang anak, adalah internal dirinya, agar anak benar-benar paham, siapa dirinya dan akan kenapa dia ada didunia ini.

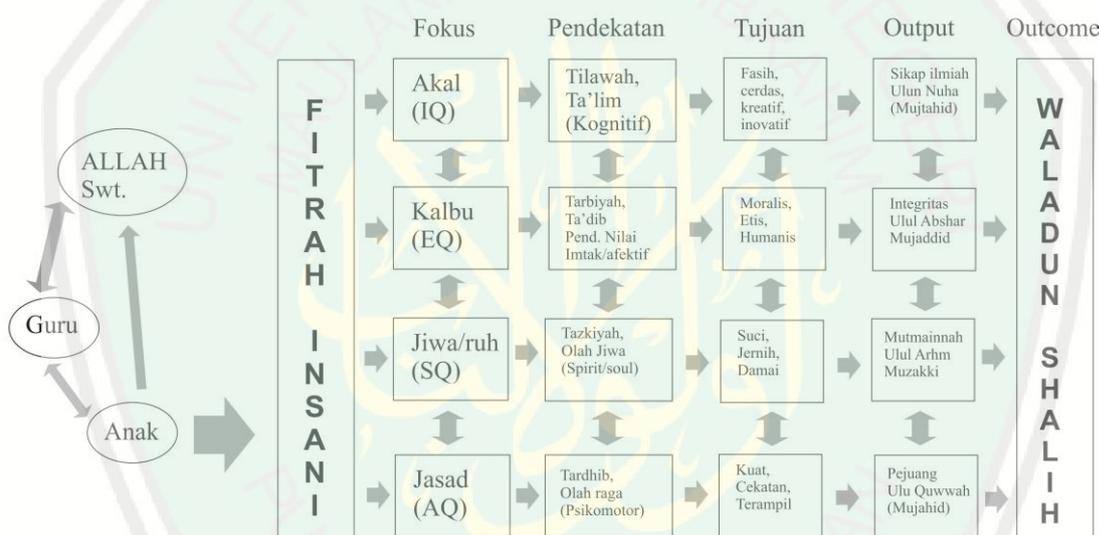
Kedua, anak harus mendayagunakan kecerdasan majemuknya untuk membangun kekuatan ilmu (*quwwatul ilmi*) dan rumah ilmu (*bait al-ilmi*) dalam dirinya. Ilmu tidak semata-mata berhubungan dengan urusan kecerdasan akal saja, tetati juga aspek kecerdasan lainnya seperti kecerdasan spritual dan kecerdasan emosi. Sehingga berilmu pengetahuan peserta tidak hanya mampu berfikir tapi juga berdzikir. Ketiga anak harus mendayagukan kecerdasan majemuknya untuk memperkokoh akhlaq kepribadiannya sehingga memiliki kepribadian yang agung. Kemuliaan akhlaq tidak semata-mata terbentuk oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah agama, norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Tetapi lahir dari akal dan pikiran yang jernih, hati yang jernih dan hati yang suci dari dosa serta jiwa yang tenang dalam pangkuan ilahi.

⁶⁵ Ibid, Tobroni, halaman 125.

Keempat, anak harus diarahkan untuk mendayagunakan kecerdasan majemuknya untuk memiliki kekutan ibadah (*Quwwatul ibadah*).⁶⁶ *Quwwatul ibadah* tidak sebatas pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga pengabdian kepada sesama manusia melalui kepedulian atau empati. Tobroni menggambarkan berikut spriritualitas pendidikan Islam dalam bentuk diagram sebagai berikut:

(Bagan 2)

Bentuk spriritualitas pendidikan Islam (Diambil dari buku “Pendidikan Islam: Paradigma teologis, filosofis, dan Spiritualis karya Dr. Tobroni, M.Si)



c. Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam banyak sekali urain terkait paradigma pengembangan pendidikan Islam. Banyaknya paradigma ini bisa dipahami karena banyaknya persepsi dan cara pandang seseorang dalam melihat pendidikan Islam, mulai dari yang sangat sistemik hingga yang membeda-bedakan jenis keilmuannya.

⁶⁶ Ibid, Tobroni, halaman 127.

Muhaimin mengelompokkan paradigma pengembangan pendidikan Islam menjadi tiga model, dimana ketiganya ada yang agak mirip ada pula yang begitu berbeda, tiga peta paradigma tersebut adalah:

1. Paradigma Dikotomis

Paradigma ini memandang aspek kehidupan dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, termasuk didalamnya pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan Islam seolah hanya persoalan ritual semata, sementara aspek ekonomi, sosial dan lain sebagainya dianggap bagian dari urusan dunia bukan urusan akhirat. Pandangan dualisme inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan. Istilah pendidikan agama dan pendidikan umum, atau ilmu agama dan ilmu umum sebenarnya muncul dari paradigma dikotomis tersebut.

Paradigma dikotomis mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan islam yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman *ul-ulum al-diniyah* (ilmu-ilmu keagamaan) yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara sains atau ilmu pengetahuan dianggap terpisah dari agama. Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan normatif, doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan menjadi pelaku yang loyal, memiliki sikap *commitment* (keberpihakan), dan dedikasi (pengabdian) yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, dianggap dapat

menggoyahkan iman, sehingga perlu ditindih oleh pendekatan keagamaan yang normatif dan doktriner tersebut.⁶⁷

Model dikotomis tersebut pernah terwujud dalam realitas sejarah pendidikan Islam. Pada periode pertengahan, lembaga pendidikan Islam (terutama madrasah sebagai pendidikan tinggi atau al-jami'ah) tidak pernah menjadi universitas yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Ia banyak diabdikan kepada al-'ulum al-diniyah (ilmu-ilmu agama) dengan penekanan pada fiqih, tafsir, dan hadis. Sementara ilmu-ilmu non agama (keduniaan), terutama ilmu-ilmu alam dan eksakta sebagai akar pengembangan sains dan teknologi, sejak awal perkembangan madrasah dan al-Jami'ah sudah berada dalam posisi marginal.

Adanya perubahan dan penyempitan pengertian ulama menjadi fuqaha, sebagai orang-orang yang hanya mengerti soal-soal keagamaan belaka, sehingga tidak dimasukkan kedalam barisan kaum intelektual, juga merupakan implikasi dari pandangan dikotomis tersebut. Menurut Azra yang dikutip oleh Muhaimin, pemahaman semacam itu muncul ketika umat Islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, dimana umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbenturan umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan barat memunculkan kaum intelektual baru (cendekiawan sekuler), yang menurut Benda dalam bukunya Sartono Kartodirjo (ed, 1981) sebagian besar kaum intelektual tersebut adalah hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat. Dalam proses pendidikannya, mereka mengalami *brain washing* (cuci otak) dari hal-hal yang berbau Islam, sehingga mereka menjadi teralienasi (terasing) dari ajaran-ajaran

⁶⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Raja Grafindo, Jakarta: 2005), halaman 31.

Islam dan muslim sendiri. Bahkan terjadi gap (kesenjangan) antara kaum intelektual baru (sekuler) dengan intelektual lama (ulama), dan ulama dikonotasikan sebagai kaum sarungan yang hanya mengerti soal-soal keagamaan dan buta dalam masalah-masalah keduniaan.⁶⁸

Paradigma dikotomis tersebut bisa dihilangkan dengan pendekatan epistemologi dalam proses pendidikan Islam. Triyo Supriyatno menjelaskan bahwa bila pendidikan Islam mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses belajar mengajar, maka pendidikan Islam akan banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa produsen, peneliti, penemu, penggali, dan pengembang ilmu pengetahuan. Karena epistemologi merupakan pendekatan yang berbasis proses, maka epistemologi melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis, diantaranya adalah menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.⁶⁹

2. Paradigma Mechanism

Paradigma mechanism memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.

Aspek atau nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, nilai biofistik, dan lain-lain. Dengan demikian, nilai agama merupakan salah satu aspek kehidupan sehari-hari.

⁶⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Raja Grafindo, Jakarta: 2005), halaman 32.

⁶⁹ Triyo Supriyatno, *Epistemologi Pendidikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah*, (UIN Press, Malang, 2011), halaman vi.

Hubungannya antara nilai agama dengan nilai lainnya kadang bersifat *horizontal-lateral (independent)* atau bersifat *lateral-sekuensial*, tetapi tidak sampai kepada *vertical linier*.

Dalam dunia pendidikan Islam, relasi yang bersifat *horizontal-lateral (independent)*, mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen, dan tidak saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat *lateral-sekuensial* berarti diantara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa dikonsultasikan. Sedangkan relasi *vertikal-linier* berarti mendudukan pendidikan islam sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama.⁷⁰

Dalam pandangan tersebut menurut Muhaimin, selama ini di sekolah masih ada proses sekularisasi ilmu, yakni pemisahan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Nilai-nilai keimanan seolah hanya merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama sementara mata pelajaran lain mengajarkan bidang ilmu-ilmunya seolah tidak ada hubungannya dengan masalah nilai keimanan dan ketaqwaan.

3. Paradigma Organism atau Sistemik

Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma organism bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerjasama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari *fundamental doctrines* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam

⁷⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Raja Grafindo, Jakarta: 2005), halaman 36.

Alqur'an dan Assunnah sebagai sumber ajaran pokok. Melalui upaya semacam itu, maka sistem pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, agama, etik serta mampu melahirkan manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, profesional dan sekaligus hidup didalam nilai-nilai agama. Paradigma tersebut tampaknya mulai dirintis oleh pendidikan Islam madrasah.

Malik Fadjar berpendapat bahwa kebijakan pengembangan pendidikan Islam ataupun madrasah mengakomodasi tiga kepentingan utama; (1) sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif; dan (3) mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi maupun era informasi.⁷¹

Sedangkan menurut pengamatan Muhaimin, secara konseptual-teoritis pendidikan Islam di sekolah berfungsi sebagai: (1) *pengembangan* keimanan dan ketaqwaan; (2) *penanaman nilai* ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan dunia akhirat; (3) *penyesuaian mental* peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial; (4) *perbaikan* kesalahan-kesalahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran Islam; (5) *pencegahan* dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari; (6) *pengajaran* tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, dan; (7)

⁷¹ Abdul Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Mizan, Bandung, 1998), halaman 26.

penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.⁷²

C. TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA SEKARANG

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya sudah memasuki masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari masyarakat modern dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi masa depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif. Sedangkan masyarakat informasi ditandai oleh penguasaan terhadap teknologi informasi, mampu bersaing, serba ingin tahu, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan menguasai berbagai metode dalam memecahkan masalah.⁷³ Dalam bentuk realnya, masyarakat modern ditandai dengan pesatnya penggunaan IT sebagai penunjang hidup.

Pada masyarakat informasi peranan media elektronika sangat memegang peranan penting dan bahkan menentukan corak kehidupan. Penggunaan teknologi elektronika seperti komputer, internet, smartphone dan berbagai aplikasi sosial media yang dengan mudah didownload dari android telah mengubah lingkungan informasi dari lingkungan yang berpola lokal ataupun nasional kepada lingkungan mutinasional atau global. Pada era informasi yang begitu canggih, membuat orang bisa tahu segala hal dalam hitungan detik, misalnya saja dengan menggunakan smartphone yang tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anakpun bisa mengetahui apa yang terjadi dibelahan bumi manapun dalam hari yang sama. Model komunikasi yang dulu serba manual, artinya harus verbal bertemu lawan komunikasi, sekarang bisa dengan model visual dengan teknologi android. Semua kecanggihan ini menjadi fasilitas yang luar biasa jika dimanfaatkan dalam transformasi pendidikan islam, namun jika tidak dibekali paradigma yang baik, kecanggihan informasi

⁷² Ibid, Muhaimain, halaman 40.

⁷³ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Kencana, Jakarta, 2003), halaman 91.

ini justru akan menjadikan anak didik memiliki karakter yang tidak baik, misalnya saja menjadi sangat individual, tidak menghargai proses dan serba instan, bahkan hingga bisa terjerumus dalam kehidupan bebas anak muda.

Dengan arus perubahan zaman yang begitu cepat akibat efek dari percepatan informasi sebagai konsekuensi logis tuntutan zaman, pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut sekaligus mampu menyesuaikan pola dengan tanpa kehilangan ruh pendidikan Islam itu sendiri. Artinya, pendidikan Islam harus memiliki paradigma baru dalam melihat situasi perubahan yang serba cepat ini.

Abuddin Nata memaparkan, pendidikan Islam setidaknya harus memiliki sebelas paradigma baru sebagai akibat dari perkembangan era globalisasi, sistem informasi, reformasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelas paradigma baru tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷⁴

Pertama, dari segi visinya, paradigma baru pendidikan harus diarahkan pada upaya menyiapkan masa depan bangsa agar mampu berkompetisi di era global. Di dalam rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009 misalnya dinyatakan, bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pendidikan islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, harus mampu menyesuaikan visinya dengan visi pendidikan nasional tersebut. Visi dan orientasi pendidikan Islam yang selama ini diarahkan pada masa lalu dengan cara

⁷⁴ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kencana, Jakarta, 2009), halaman 16-24.

mentransformasikan berbagai ilmu keislaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan zaman, harus mengalami perubahan. Dengan cara demikian, tamatan pendidikan islam tidak hanya dapat berkiprah disektor marginal dan terpinggirkan, melainkan dapat pula berkiprah di sektor yang lebih luas dan diperhitungkan orang.

Kedua, dari segi misinya, paradigma baru pendidikan saat ini diarahkan pada upaya:

1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; 5) memberdayakan peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia.

Secara historis, pendidikan Islam walaupun belum seluruhnya merumuskan misinya secara tertulis, namun dalam pelaksanaannya telah mengemban sebagian dari misi pendidikan nasional. Pendidikan Islam juga telah berperan memasyarakatkan konsep wajib belajar, pendidikan yang gratis, pendidikan yang berbasis kerakyatan, pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tuntas (*mastery learning*), pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang memiliki kesalehan individual dan sosial.

Ketiga, dari segi tujuannya, paradigma baru pendidikan saat ini tidak lagi bertumpu pada pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif yang sebanyak-banyaknya, melainkan harus disertai dengan mengamalkannya (*to do*), menginternalisasikannya (*to be*), dan menggunakannya bagi kepentingan masyarakat (*to life together*). Hal ini sejalan dengan

sifat sebuah ilmu yang disamping memiliki dimensi akedemis berupa teori dan konsep-konsep, juga memiliki dimensi pragmatis berupa keterampilan menerapkan teori dan konsep tersebut.

Sehubungan dengan itu, pendidikan Islam saat ini tidak mencukupkan untuk belajar di dalam kelas dengan modal bangku dan papan tulis, melainkan harus dilengkapi dengan peralatan praktikum, magang, kerja sosial dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan Islam juga harus diarahkan kepada upaya membentuk manusia yang utuh kepribadiannya, yaitu manusia yang terbina secara fisik, akal, iman, akhlaq, kejiwaan, keindahan, sosial, dan kemasyarakatan.

Keempat, dari segi kurikulum, paradigma baru pendidikan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum bukan hanya yang tertulis diatas kertas, melainkan seluruh aktifitas yang memengaruhi terjadinya proses belajar. Kurikulum yang diatas kertas merupakan kurikulum yang bersifat potensial, sedangkan kurikulum yang sesungguhnya adalah kurikulum yang benar-benar aktual, yakni berbagai aktifitas yang memengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, saat ini telah ada pula paradigma kurikulum yang lebih berbasis sekolah yang selanjutnya dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai penjabaran dan pengembangan dari kurikulum yang berbasis kompetensi. Pendidikan Islam disamping mengembangkan kurikulum sendiri, juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma baru kurikulum tersebut.

Kelima, dari segi pendidik, paradigma baru pendidikan, melihat bahwa guru, dosen atau tenaga pendidik, bukan lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan hanya salah satunya saja. Disamping itu, masih terdapat berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh peserta didik, yakni informasi yang terdapat pada berbagai media massa. Peran pendidik saat ini selain sebagai informan, juga sebagai

motivator, katalisator, dinamisator, fasilitator, dan inovator pendidikan yang menciptakan kondisi bagi terjadinya proses pembelajaran pada peserta didik. Dengan demikian, seorang seorang pendidik profesional dimasa sekarang selain harus memiliki kompetensi akademis, pedagogik, kepribadian dan sosial sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga harus memiliki kemampuan mengakses berbagai sumber pembelajaran, artinya secara tidak langsung dituntut untuk menguasai IT.

Keenam, dari segi peserta didik, paradigma baru pendidikan saat ini melihat peserta didik sebagai mitra dalam kegiatan belajar mengajar yang harus perlakukan secara adil, manusiawi, egaliter, demokratis, dihormati hak-hak asasinya, dan seterusnya. Hal ini mengharuskan seorang pendidik tidak dapat lagi memutuskan program pembelajarannya sendiri tanpa persetujuan peserta didik. Mereka harus dilayani sebagai pelanggan (*customer*) yang harus diberikan pelayanan yang memuaskan, sebagaimana yang dikehendaki oleh model Total Quality Management (TQM). Untuk itu guru harus memahami undang-undang tentang perlindungan anak, berbagai aturan dan undang-undang tentang hak asasi manusia, serta berbagai ketentuan lainnya.

Ketujuh, dari proses belajar mengajar, paradigma baru pendidikan saat ini, sebagaimana dinyatakan dalam bab IV pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan bakat, minat dan psikologi peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, harus dilihat sebagai proses pembelajaran yang memberdayakan dan menggali bakat, minat, dan potensi peserta didik. Untuk itu paradigma baru pendidikan dalam bidang proses belajar mengajar ini telah bergeser dari yang semula berpusat pada guru (*teacher centris*) kepada yang

berpusat pada siswa (*student centris*) dalam hubungan ini berbagai metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang berbasis pada peserta didik, seperti *Problem Based Learning*, *Interactive Learning*, *Cooperative Learning*, *Quantum Learning*, dan sebagainya yang harus dikuasai oleh pendidika saat ini.

Kedelapan, dari segi lingkungannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat bahwa lingkungan yang memengaruhi kegiatan pembelajaran bukan hanya terbatas pada yang ada diruangan kelas, melainkan yang berada dilingkungan global yang lebih luas yang memungkinkan dapat diakses melalui bantuan teknologi informasi. Untuk itu, pendidikan di masa sekarang harus melihat lingkungan sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya kegiatan pembelajaran. Untuk itu lembaga pendidikan di masa sekarang, harus melengkapi dirinya dengan teknologi informasi yang lengkap dan canggih.

Kesembilan, dari segi sasaran dan prasarannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat, bahwa sarana dan prasarana buka yang ditentukan oleh status kepemilikannya, melainkan oleh kemungkinan menggunakannya. Untuk itu berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di masyarakat dapat didayagunakan untuk kegiatan pendidikan melalui skema kerjasama yang saling menguntungkan dalam arti yang seluas-luasnya.

Kesepuluh, dari segi manajemen pengelolaannya, paradigma baru saat ini melihat, bahwa kegiatan pendidikan harus dikelola dengan manajemen bisnis yang bertumpu pada pada pemberian pelayanan yang memuaskan pada pelanggan (*customer oriented*) sebagaimana yang dijumpai pada konsep *total quality management (TQM)*.

Kesebelas, dari segi pendanaannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat bahwa dana pendidikan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik harus sebanding dengan produk yang layanan diberikan kepada peserta didik. Selain itu, lembaga pendidikan harus mampu

menggandeng kalangan penguasa (investor) untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu kemampuan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan dana secara transparan, efisien dan akuntabel merupakan sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan.

Kesebelas paradigma baru menurut Abuddin Nata diatas, harus menjadi fokus pengembangan pendidikan Islam dimasa depan. Sebab tanpa paradigma yang progresif, akan menyebabkan pendidikan Islam akan terlihat usang di mata publik sehingga akan berakibat pada rendahnya respon masyarakat terhadap pendidikan Islam itu sendiri, tentu hal ini akan mengkhawatirkan jika kepercayaan terhadap pendidikan Islam akan tercabut.

Paradigma baru tersebut nampaknya cukup bisa diandalkan sebagai jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan pendidikan Islam saat ini. Muhaimin mengutarakan bahwa hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat, terutama dalam konteks pendidikan. Diantara tantangan itu adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Para siswa/peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran, baik yang bersifat pedagogis-terkontrol maupun nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber-sumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol akan dapat memengaruhi perubahan budaya, etika, dan moral para siswa atau masyarakat. Masyarakat yang semula merasa asing dan bahkan tabu terhadap model-model pakaian (fashion) yang terbuka dan hiburan-hiburan (fun) atau film-film porno dan sadisme, atau tabu dengan bacaan dan gambar porno yang dimuat di berbagai media massa, kemudian menjadi biasa-biasa saja (permissive), bahkan ikut menjadi bagian dari itu. Sebagai eksesnya adalah munculnya sikap sadisme,

⁷⁵ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Raja Grafindo, Jakarta: 2009), halaman 16-17.

kekerasan, pemerkosaan, dan sebagainya di kalangan sebagai masyarakat. Bahkan tidak heran jika pada saat ini sering dijumpai model kehidupan kontroversial yang dapat dialami dalam waktu yang sama serta dapat bertemu dalam pribadi yang sama, yaitu: antara kesalehan dan keseronohan, antara kelembutan dan kekerasan, antara koruptor dan dermawan, antara koruptor dan keaktifan beribadah (shalat, haji, atau umroh), serta antara masjid dan mall, yang keduanya terus-menerus berdampingan satu sama lain.

2. Rendahnya tingkat *social-capital*, inti dari *social capital* adalah *trust* (sikap amanah). Menurut pengamatan sementara ahli, bahwa dalam bidang *social capital* bangsa Indonesia ini hampir mencapai titik “zero trust society”, atau masyarakat yang sulit dipercaya, yang berarti sikap amanah (*trust*) sangat lemah. Di antara indikatornya adalah hasil survei *the Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2004 bahwa indeks korupsi di Indonesia sudah mencapai 9,25 atau ranking pertama se Asia, bahkan pada tahun 2005 indeksnya meningkat sampai 9,4.
3. Hasil-hasil survei internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.
4. Disparitas kualitas pendidikan antardaerah di Indonesia masih tinggi.
5. Diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
6. Angka pengangguran lulusan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi semakin meningkat.
7. Tenaga asing meningkat, sedangkan tenaga Indonesia yang dikirim ke luar negeri pada umumnya nonprofesional.
8. Orang-orang lebih senang sekolah atau studi atau menyekolahkan anaknya di luar negeri.

9. Eskalasi konflik, yang di satu sisi merupakan unsur dinamika sosial, tetapi di sisi lain justru mengancam harmoni bahkan integrasi sosial baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
10. Permasalahan makro nasional, yang menyangkut krisis multidimensional baik di bidang ekonomi, politik, moral, budaya, dan sebagainya.
11. Peran sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam membentuk masyarakat madani (*civil society*).

Pendidikan Islam mau tidak mau harus terlibat dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut di atas bersama dengan kekuatan-kekuatan pendidikan nasional yang lain, bahkan bersama kekuatan sosial, politik, dan ekonomi pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam perlu melakukan evaluasi diri terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan reaktualisasi dan reposisi, dengan cara melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional untuk membebaskan bangsa dari berbagai persoalan di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori “*library research*” atau penelitian berdasarkan literatur. *Library research* adalah termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat induktif bertolak dari data yang bersifat khusus, untuk menemukan kesimpulan umum. Lebih lanjut, penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau yang ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak diolah dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik. Sebuah rangkaian kerja atau proses penelitian kualitatif berlangsung serempak dilakukan dalam bentuk pengumpulan atau pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif.⁷⁶ Cara lain yang berkaitan dengan metode ini adalah metode “*menemukan*” dengan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis.⁷⁷ Maka dengan demikian penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan studi terhadap beberapa bahan pustaka yang relevan, baik yang mengkaji secara khusus pemikiran Soekarno tentang Islam dan kemudian menemukan pemikiran Soekarno tentang pendidikan Islam.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan dua pendekatan: *Pertama*, pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah perkembangan pemikiran pendidikan Islam Soekarno, serta konteks sosial budaya dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemikiran pendidikan Islam tersebut, yang selanjutnya melahirkan berbagai macam karakteristik yang dominan. *Kedua*, pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika digunakan agar tidak terjadi distorsi pesan atau informasi tentang Soekarno, pemikiran, serta aksi sosialnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji latar

⁷⁶ Hadari Nawawi dan Hj. Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994) halaman 176

⁷⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya, Bandung, 2000), halaman 17.

belakang kehidupan, pemikiran, dan pengalaman intelektual Soekarno, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Beberapa hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap karakteristik dominan pemikiran pendidikan Islamnya. Hermeneutik yang digunakan adalah hermeneutika Wilham Dilthey, hermeneutika ini berkisar pada tiga unsur yaitu *Verstehen* (memahami), *erlebnis* (dunia pengalaman batin) dan *Ausdruck* (ekspresi hidup). Hal ini memungkinkan bagi penyelidikan tentang alasan-alasan tersembunyi dibalik perbuatannya yang dapat diamati. Kita dapat memahami perbuatan dengan mengungkap pikiran, perasaan dan keinginan dan tujuan yang mendorongnya berbuat.⁷⁸

B. Sumber Data

Dalam penulisan tesis penulis tidak melakukan wawancara langsung kepada tokoh yang dimaksud, sebab tokoh yang dimaksud sudah meninggal. Penulis menggali data dari berbagai sumber dan dikelompokkan menjadi 2 (dua):

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang berkaitan dan langsung diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer yaitu buku karangan yang ditulis oleh tokoh yang diteliti, sebagai berikut:

- *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I* (Ir. Soekarno, PT Media Pressindo, Yogyakarta, 2015)
- *Video Dokumenter Soekarno* (Arsip Nasional yang diakses dari You Tube)

2. Data sekunder

⁷⁸ Sills, David L. (ed), 1972. *International Encyclopedia of Social Sciences*. Vol. 3, New York, The Mcmilan Company & The Free Press. Diambil dari web resmi prodi sejarah STKIP Setiabudhi Rangkasbitung, <http://pensa-sb.info/akses> 5 Januari 2017.

Sumber data sekunder, yakni buku buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Buku yang termasuk data sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Cindy Adams, Gunung Agung, Jakarta, 1982)
- *Soekarno, Islam dan Nasionalis*, (Badri Yatim, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999)
- *Bung Karno The Founding Father*, (Hendri Suseno, Notebook, Yogyakarta, 2015)
- *Bung Karno Putera Fajar*, (Solichin Salam, Gunung Agung, Jakarta, 1982)
- *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*, (Taufik Adi Susilo, Garasi, Yogyakarta, 2018)
- *Politik Pendidikan Nasional* (Abd. Rahman Assegaf, Kurnia Kalam, Jogjakarta, 2005)

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tesis ini, adalah metode documenter. Di mulai dengan mengumpulkan kepustakaan, pertama-tama dicari segala buku yang mengenai tokoh dan topik tersebut. Dapat dikonsultasikan kepustakaan yang umum dan yang khusus. Dimulai dengan karya-karya tokoh itu pribadi (pustaka primer) dan dengan monografi dan karangan khusus tentang tokoh dan pemikirannya (pustaka skunder). Kemudian di cari dalam buku-buku umum seperti ensiklopedia dan juga mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁹

Selanjutnya data-data yang telah didapatkan, dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, dan menempatkannya pada sebuah pola abstrak yang logis. Berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data tersebut ke

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 1998) halaman 206.

dalam variabel-variabel, sehingga antara satu dengan yang lainnya terdapat jalinan logis dan sistematis.

D. Metode Pengolahan Data

Data yang di peroleh merupakan bahan mentah yang harus di olah dan di susun agar lebih mudah dalam memperoleh makna dan interpretasi dan memudahkan terbentuknya *grand konsep* (konsep besar), karena itu penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Induksi

Teknik induksi ini di pakai untuk mengemukakan berbagai data yang di peroleh dalam penelitian pustaka (*library reseach*), selanjutnya di generalisasi sebagai suatu kesimpulan. Induksi merupakan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang lebih khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian di ambil generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

2. Histori

Merupakan teknik yang di lakukan dengan cara menguraikan sejarah munculnya sesuatu hal yang menjadi obyek penelitian dalam perspektif waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸⁰ Mengumpulkan bahan pertimbangan historis yang dapat di temukan dalam kepustakaan mengenai satu konsep. Pertama-tama meneliti sebaik mungkin apa yang di sajikan dalam kepustakaan dan menguraikan perkembangan dialektis dari tokoh ke tokoh, dan dari zaman ke zaman. Kemudian mendiskripsikan soal-soal eksplisit yang di temukan dalam data-data. Akhirnya membandingkan sintesis historis seperti di berikan oleh pengarang-pengarang lain, menilai perbedaan-perbedaan pendapat

⁸⁰ WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet XIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), halaman 312.

mereka, dan mempertanggungjawabkan pilihan pribadi. Dalam kajian ini adalah tentang sejarah sosok Soekarno dan ruang geraknya dalam pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia.

3. Konstektual

Merupakan pola pikir yang menekankan pada aspek kekinian, kondisi atau situasi masa kini. Teknik ini, mencoba untuk selalu mempertimbangkan perkembangan zaman atau sesuai dengan konteks dinamika sosio kultur masyarakat. Pada kajian ini, ingin melihat bagaimana pandangan Soekarno tentang pendidikan Islam bisa diadaptasikan dengan kondisi hari ini, yakni kondisi Indonesia yang terus mengalami perkembangan pemikiran, budaya, ekonomi, sosial, dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam.

E. Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang ada. Data-data tersebut akan dianalisis dengan teknik: *Pertama*, analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan atau mengolah pesan, atau semacam alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.⁸¹ Analisis isi digunakan untuk menganalisis *discourse* dalam kontruksi pemikiran Soekarno. Berdasarkan kandungan *discourse* dalam kontruksi pemikiran tersebut, selanjutnya dilakukan studi kritis terhadap alur pemikiran yang membicarakan tentang pendidikan Islam, dan disusun secara sistematis dan logis.

Kedua, analisis bahasa (*language analysis*). Analisis bahasa digunakan untuk mendukung analisis isi. Penggunaan analisis ini adalah untuk mengetahui arti sesungguhnya dari sebuah kata. Fungsi analisis bahasa adalah agar tidak terjadi distorsi

⁸¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Remaja Rosdakarya, Bandung; 2003), halaman 71.

pesan atau informasi antara teks, penulis teks, dan pembaca teks.⁸² Tiga pusran yang dijadikan *starting point* dan *point of view* yaitu aspek kebahasaan (*the world of the text*), dunia penulis teks (*the world of the author*), dan dunia pembaca teks (*the world of the reader*). Pada buku ini, analisis bahasa penulis maksudkan untuk memperoleh gambaran sempurna tentang makna-makna kata dalam pendidikan Islam, sehingga dapat dijadikan masukan analisis lebih lanjut.

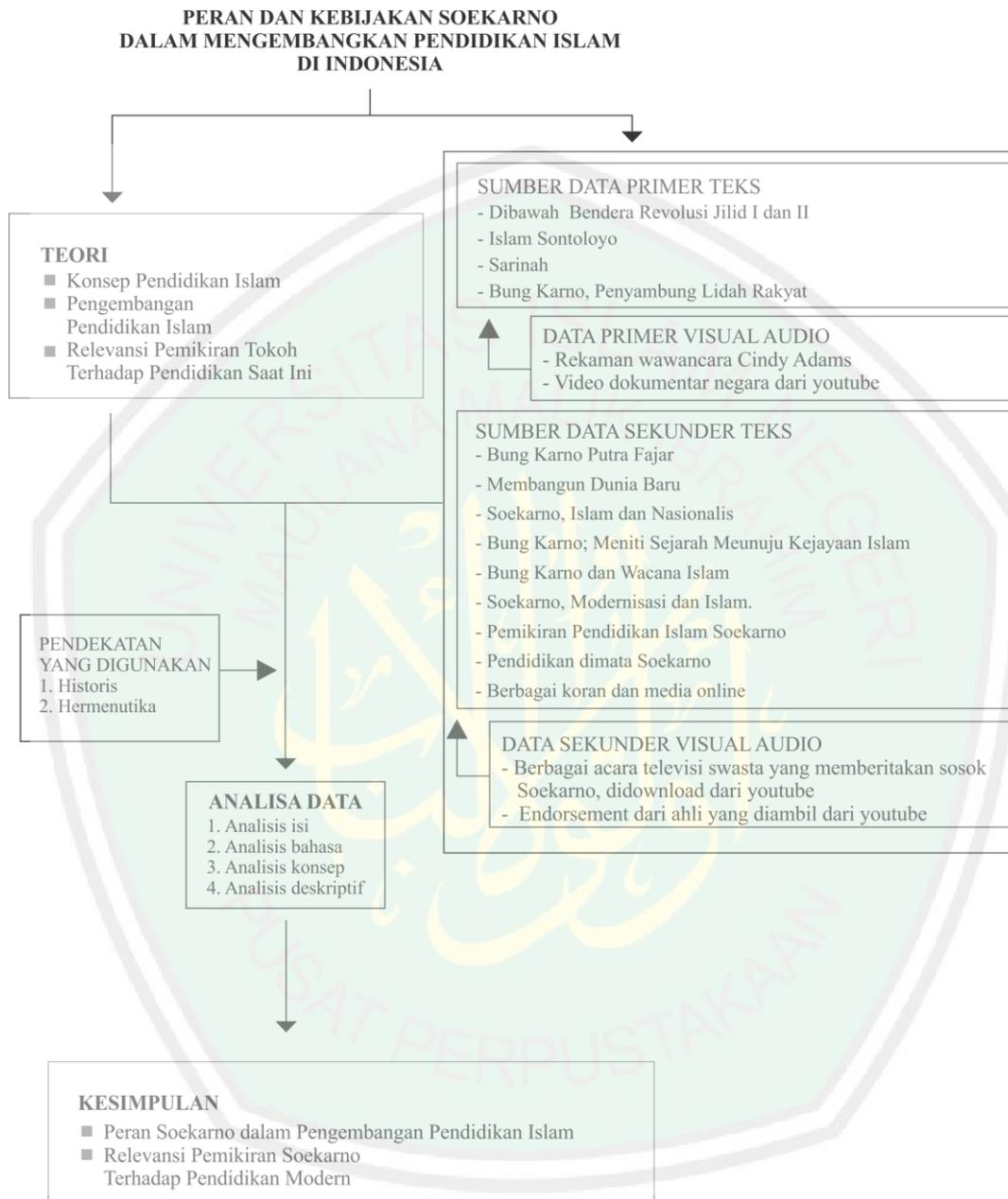
Ketiga, analisis konsep (*concept analysis*). Untuk memahami dan membuat sebuah keputusan tentang data yang dianalisis, buku ini menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif bertolak dari data yang sifatnya umum dalam membuat analisis tentang pemikiran pendidikan Islam Soekarno, kemudian menarik simpulan yang sifatnya khusus, dan induktif bertolak dari data yang sifatnya khusus dalam membuat analisis tentang pemikiran pendidikan Islam Soekarno, kemudian menarik simpulan yang sifatnya umum.

Keempat, analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu bentuk data yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data tentang pemikiran pendidikan Islam Soekarno, selanjutnya dianalisis sehingga menemukan rumusan kontruksi pemikirannya. Data-data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasi ke dalam data primer dan data sekunder. Setelah melakukan klasifikasi data, interpretasi, dan pengambilan substansi melalui analisis yang cermat, kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan dari berbagai pendapat yang ada. Sebagai catatan, komparasi dilakukan tidak saja terhadap pendapat yang sama, namun dengan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dari komparasi tersebut, kemudian ditarik kesimpulan terhadap pendapat yang dianggap mendekati kebenaran.

⁸² *Ibid*, Imam Suprayogo dan Tobroni, halaman 73.

F. Kerangka Penelitian

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian
Peran dan Kebijakan Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Indonesia



BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. RIWAYAT HIDUP SOEKARNO

a. Kelahiran

Soekarno lahir pada saat fajar kebangkitan bangsa Indonesia mulai menyingsing, permulaan era kebangkitan nasional. Menurut penanggalan Jawa, Soekarno lahir pada hari Kamis Pon tanggal 18 Sapar 1831 tahun Saka, atau 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya. Soekarno yang lahir di saat matahari terbit pada 1901, dipercayai nasibnya ditakdirkan terlebih dahulu. Bersamaan dengan kelahirannya itulah fajar menyingsing dari suatu hari yang baru.⁸³ Dari pasangan Raden Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah ibunya keturunan bangsawan. Raden Soekemi keturunan Sultan Kediri sedang Ida Ayu Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan Bali,⁸⁴ dari kasta Brahmana.⁸⁵ Dan kakeknya, Raden Hardjodikromo adalah seorang yang dipandang memiliki ilmu hikmah atau ilmu ghaib dan seorang yang mendalami ilmu kebatinan.⁸⁶

Meskipun Raden Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai menyadari adanya perbedaan suku, tradisi, dan agama, keduanya tetap melangsungkan pernikahan dihadapan penghulu secara Islam. Peristiwa pernikahan Ida Ayu dan Raden Soekemi serta merta membuat gempar penduduk Bali yang saat itu masih amat kuat memegang teguh adat dan tradisi. Akibatnya, keduanya diasingkan dari pergaulan masyarakat. Peristiwa ini, di samping membawa resiko pengorbanan batin ayah dan ibu Soekarno, juga mengandung nilai atau sebuah pesan tentang keberanian dan kebesaran jiwa, di mana keduanya telah secara berani mendobrak adat lama.⁸⁷

⁸³ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 24-24.

⁸⁴ Hendri Siseno, *Bung Karno The Founding Father*, (Notebook, Yogyakarta, 2015), halaman 8.

⁸⁵ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 6

⁸⁶ Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 18.

⁸⁷ Tashadi, dkk. *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan* (Depdikbud, Jakarta, 1999) halaman 6

Walaupun berasal dari keturunan ningrat, Soekarno hidup dalam keprihatinan. Ia kurang gemuk, kurang sehat, dan kurang terurus. Maklum, ayahandanya yang hanya seorang guru SD gajinya begitu sangat minim, sering habis untuk membayar sewa kontrakan rumah. Bisa makan nasi saja merupakan suatu makanan yang luar biasa.⁸⁸ Sebagai anak dari seorang guru, kedudukan sosial ekonomi keluarga Soekarno dapat dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan rakyat kebanyakan.⁸⁹ Namun dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan dari Amerika, Cindy Adams, Soekarno berujar:

Soekarno menceritakan:

Kami sangat melarat, sehingga hampir tidak bisa makan satu kali dalam sehari. Yang terbanyak kami makan ialah ubi kayu, jagung tumbuk dengan makanan lain. Bahkan ibu tidak mampu membeli beras murah yang biasa dibeli oleh para petani. Ia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi ibu mengambil lesung dan menumbuk, tak henti-hentinya menumbuk butiran-butiran berkulit itu sampai menjadi beras seperti yang dijual orang di pasar... Aku menjadikan sungai sebagai kawanku, karena ia menjadi tempat di mana anak-anak yang tidak punya dapat bermain dengan cuma-cuma. Dan ia pun menjadi sumber makanan. Aku senantiasa berusaha keras menggembarakan hati ibu dengan beberapa ekor ikan kecil untuk di masak.⁹⁰

Di lingkungan keluarganya, tidak hanya kedua orang tua Soekarno yang memberikan pengaruh dalam kepribadian Soekarno, juga ada seorang pembantu yang bernama Sarinah. Sarinah hadir dalam kehidupan Soekarno sejak tinggal di Mojokerto pada pertengahan tahun 1917.⁹¹ Sarinah memiliki andil besar pula dalam pembentukan kepribadian Soekarno. Tentang Sarinah, Soekarno menceritakan:

Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Tidak kawin. Bagi kami dia adalah seorang anggota keluarga kami. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami, memakan apa yang kami makan, tetapi tidak mendapat gaji sepeserpun. Dialah yang mengajarkan untuk mengenal cinta kasih. Aku tidak menyinggung pengertian jasmaniahnya bila aku menyebut itu. Sarinah mengajarku untuk mencintai rakyat. Massa rakyat, rakyat jelata. Selagi ia memasak di gubuk kecil dekat rumah, aku duduk di sampingnya dan kemudian ia berpidato, "Karno, pertama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata.

⁸⁸ Hendri Siseno, *Bung Karno The Founding Father*, (Notebook, Yogyakarta, 2015), halaman 9.

⁸⁹ Onghokham, *Soekarno, Mitos dan Realitas* (Majalah Prisma, Edisi Agustus 1977) halaman 3

⁹⁰ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 32

⁹¹ Ashad Kusuma Djaya, *Soekarno Perempuan dan Revolusi* (Bantul, Kresna Wacana, 2013) halaman 15

Engkau harus mencintai manusia umumnya.” Sarinah adalah nama yang biasa. Ia adalah satu kekuasaan yang paling besar dalam hidupku.⁹²

Soekarno menghormati Sarinah meskipun dia hanya seorang pembantu. Bahkan lebih dari itu, Soekarno bersedia belajar dan banyak menimba nasihat. Dari Sarinah, Soekarno banyak belajar dan menimba nasihat tentang bagaimana berbudi pekerti luhur. Hal ini juga menunjukkan bahwa Soekarno tidak hanya mengambil teladan dari tokoh-tokoh besar, tetapi juga dari seorang Sarinah pembantu keluarganya. Bahkan dari Sarinahlah kepribadian Soekarno yang populis terbentuk.

b. Pendidikan

Soekarno memperoleh pendidikan pengetahuan informal dari ayahnya, seorang yang mendapat pendidikan pola barat, Islam dan penganut faham *teosofi* yang banyak mengajarkan etika dan kepercayaan. Ayahnya banyak mengajarkan cara hidup disiplin, baca tulis dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Soekarno juga mendapat pelajaran dari ibunya yang selalu mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan kebaikan hati seorang ibu.⁹³ Artinya saat usia dini, Soekarno dibesarkan langsung dalam pengawasan kedua orang tuanya. Meskipun dibantu seorang pembantu rumah tangga yang bernama Sarinah.

Ayah Soekarno yaitu Raden Soekemi Sosrodihardjo adalah seorang guru, sehingga wajar ia amat memerhatikan pendidikan Soekarno. Di lingkungan keluarga, Raden Soekemi mengajari Soekarno dengan keras. Sekalipun Soekarno telah berjam-jam belajar, Soekarno masih diharuskan belajar membaca dan menulis oleh ayahnya. Hal ini dilakukan ayahnya setelah Soekarno pindah sekolah dari Tulung Agung ke Sekolah Angka Dua di

⁹² Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 35

⁹³ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung 1966), halaman 25.

Sidoarjo. Ketika ia berusia 12 tahun, Soekarno pindah ke Sekolah Angka Satu di Modjokerto dan duduk di kelas 6. Di sana Soekarno menjadi siswa yang terpandai.⁹⁴

Karena kecerdasan Soekarno yang gemilang itu, Soekarno lantas dipindahkan ayahnya ke *Europe Lagere School* (ELS) Mojokerto dan turun ke kelas lima. Di sekolahnya yang baru ini, Soekarno sangat giat belajar. Ia menjadi seorang siswa yang menonjol dibanding teman-temannya. Pelajaran yang amat Soekarno sukai yaitu pelajaran ilmu bahasa, menggambar dan berhitung. Di luar jam sekolah, Soekarno mengambil les bahasa Prancis pada *Brynnette de La Roche Brune*, sehingga pengetahuan yang dimilikinya maju pesat.⁹⁵

Setamatnya dari *Europe Lagere School* (ELS) di Mojokerto, ia melanjutkan studinya ke *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya. Kala itu, HBS merupakan sekolah favorit dan mahal. Tidak mudah bagi seorang *inlander* bersekolah di HBS.

Di HBS, Soekarno untuk pertama kalinya mengenal teori Marxisme dari seorang guru di HBS yaitu C. Hartogh. Hartogh adalah seorang penganut paham sosial demokrat. Paham sosial demokrat adalah sebuah aliran Marxis yang dianut oleh kalangan buruh yang secara ekonomis bernasib lebih baik dari golongan yang lain, yang sering juga disebut dengan *Arbeiders Aristocratie*. Juga dianggap lebih lebih modern dan tidak revolusioner.⁹⁶

Di HBS, Soekarno tergolong siswa yang miskin. Hal ini justru memberinya peluang menjadi seorang siswa HBS yang pandai. Karena tidak memiliki uang, Soekarno tidak mengisi liburannya dengan hura-hura ke tempat hiburan. Sebagai gantinya, ia mencari hiburan dalam dunia cita dan alam ilmu pengetahuan, dengan jalan membaca. Menurut pengakuan Soekarno, dengan membaca seolah-olah ia dapat bertemu dengan tokoh-tokoh besar dari segala bangsa.

⁹⁴ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 8

⁹⁵ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 8

⁹⁶ Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976)

Motivasi membaca Soekarno amat didukung oleh lingkungan belajarnya. Sebab selama di Surabaya, Soekarno menumpang/indekost di rumah HOS Tjokroaminoto. Tjokroaminoto mendapat julukan “raja yang tidak dinobatkan”. Hal ini karena Tjokroaminoto sebagai seorang pemimpin Sarekat Islam (SI) yang merupakan sebuah partai besar pada waktu itu. Karena jabatannya itulah, Tjokroaminoto banyak dikunjungi tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk berdialog dan berbincang-bincang mengenai banyak hal yang berkaitan dengan politik. Kesempatan tinggal di rumah Tjokroaminoto tidak disia-siakan oleh Soekarno untuk magang politik dari Tjokroaminoto yang merupakan pemimpin politik orang Jawa.⁹⁷

Setiap hari, pimpinan dari partai lain atau pimpinan cabang Sarekat Islam bertamu ke rumah Tjokroaminoto. Kadang-kadang mereka menginap untuk beberapa hari. Bagi Soekarno ini adalah kesempatan baik, karena ia dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Bahkan kadang-kadang Soekarno terpaksa membagi tempat tidurnya dengan tokoh-tokoh politik yang menginap di rumah Tjokroaminoto. Waktu makan, adalah waktu yang amat disukai Soekarno. Karena pada waktu itu, ia dapat mengikuti dan meresapi percakapan tentang politik. Sesekali Soekarno mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan politik di dalam negeri.⁹⁸

Apalagi sejak Soekarno menikahi putri dari Tjokroaminoto yaitu Oetari. Soekarno selalu membuntuti kemanapun Tjokroaminoto pergi. Dialah yang selalu menemani Tjokroaminoto ke berbagai pertemuan untuk berpidato. Dengan serius pula, Soekarno memerhatikan semua isi pidato tokoh pergerakan itu. Jadi sangat bisa dipahami Soekarno menganggap Tjokroaminoto sebagai orang yang amat mempengaruhi hidupnya, bahkan dialah orang yang mengubah seluruh hidupnya.

Soekarno mengatakan:

⁹⁷ Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*; Terj. Hasan Basri, (LP3ES, Jakarta, 1987) halaman 37.

⁹⁸ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 10

Cerminku adalah Tjokrominoto. Aku memperhatikannya, mengumandangkan suaranya. Aku melihat gerak tangannya dan kupergunakan penglihatanku ini pada pidatoku sendiri. Aku menghirup udara lebih banyak lagi persoalan politik di rumah Pak Tjokro, dapur daripada nasionalisme.⁹⁹

Di samping disiplin yang diterapkan Ny. Tjokro, Soekarno juga selalu mendisiplinkan dirinya sendiri. Soekarno selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Selain ilmu pengetahuan yang ia dapat di bangku sekolah, ia juga mengejar ilmu pengetahuan lain yang ia peroleh dari buku-buku dari sebuah perpustakaan besar yang didirikan oleh perkumpulan teosofi. Soekarno dapat memanfaatkan perpustakaan itu dengan leluasa, terutama karena ayahnya merupakan salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut. Melalui buku-buku yang ia baca dari perpustakaan tersebut, Soekarno menyelam ke dalam samudera kebatinan. Melalui perpustakaan, Soekarno membaca pemikiran tokoh-tokoh besar. Ia seolah-olah sedang bertemu dan berguru dengan mereka. Proses ini memberi arah pada pemikirannya. Bahkan, sebagian dari pemikiran dan pendirian mereka telah menjadi pendirian dan pemikiran Soekarno. Begitulah, dengan membaca buku, ia dapat menyerap pemikiran tokoh-tokoh besar, misalnya seperti Thomas Jefferson yang berbicara tentang *Declaration of Independence*, yang ditulis sekitar tahun 1776.¹⁰⁰

Pada 1921, Soekarno menamatkan pendidikannya di HBS dan melanjutkan ke *Technische Hoger School* (THS) yaitu Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. *Technische Hoger School* (THS) inilah yang kelak menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Di THS, Soekarno adalah seorang dari sebelas mahasiswa yang berasal dari anak bumi putera. Sebagai mahasiswa ia giat dan rajin belajar. Namun, pengaruh dari pergerakan politik, yang memang telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya, mengusik hatinya untuk terus terlibat dalam pergerakan-pergerakan politik. Pada 1926, Soekarno menamatkan pendidikannya di THS.

⁹⁹ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 66

¹⁰⁰ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 10.

c. Organisasi dan Keterlibatan Soekarno dalam Lahirnya Negara

Di Surabaya, Soekarno sempat mendirikan sebuah perkumpulan politik bernama Trikoro Darmo, yang berarti tiga tujuan suci dan sebagai perlambang kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial.¹⁰¹ Anggota perkumpulan Trikoro Darmo adalah para pelajar yang sebaya dengannya waktu itu. Organisasi ini berlandaskan pada asas kebangsaan. Kegiatan organisasi ini antara lain mengembangkan kebudayaan, mengumpulkan dana sekolah, dan membantu korban bencana alam.

Kecuali itu, Soekarno juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh *Studieclub*, sebuah kelompok yang aktif membahas buah pikiran dan cita-cita. Pada *Studieclub* inilah untuk kali pertama Soekarno berpidato. Usianya pada waktu itu 16 tahun. Pidato ini didorong oleh sikapnya yang tidak setuju terhadap isi pidato ketua *Studieclub* yang mengatakan bahwa menguasai bahasa Belanda adalah menjadi keharusan bagi generasi muda. Mendengar pernyataan tersebut, Soekarno berdiri dan menyatakan ketidaksetujuan atas pendapat ketua. Ia justru menghimbau anggota *Studieclub* untuk bersatu dan mengembangkan bahasa Melayu, baru kemudian bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang menurut Soekarno akan menjadi bahasa diplomatik.¹⁰²

Pada 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Melalui PNI ia mulai berperan aktif dalam kancah politik dan tampil sebagai pelopornya. PNI menjadi sebuah partai besar dan berpengaruh di Indonesia berkat kepemimpinan Soekarno. Melalui partainya itu, Soekarno terus berusaha untuk menciptakan persatuan dari berbagai aliran politik yang ada di Indonesia. Tidak lama PNI berdiri, Soekarno mulai mencoba merealisasikan idenya dalam pengertian yang sebenarnya. Bersama-sama dengan Soekiman sebagai perwakilan SI, Soekarno merencanakan untuk membentuk sebuah

¹⁰¹ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 57

¹⁰² Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982) halaman 59.

federasi partai politik yang selanjutnya dikenal dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Hadir dalam rapat pembentukan PPPKI tersebut wakil-wakil dari SI, PNI, Budi Oetomo, Pasundan, Sumateraen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Walaupun federasi itu tidak mempunyai struktur yang ketat, ia diharapkan dapat menjadi suatu Front Sawo Matang yang konsisten melawan kolonialis Belanda.¹⁰³

Aktifitas Soekarno di PNI menyebabkan ia dipenjarakan oleh Belanda pada bulan Desember 1929. Pada tahun 1930, Soekarno membacakan pledoinya yang fenomenal “Indonesia Menggugat” di Lanraad Bandung. Soekarno lalu dibebaskan pada 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung ke Partindo yang merupakan pecahan dari PNI dan menjadi pimpinan redaksi dari sebuah majalah partai yang radikal yaitu *Fikiran Ra’jat*. Soekarno ditangkap kembali pada Agustus 1933, lalu kembali diasingkan ke Ende, Flores. Pada tahun 1938 sampai 1942, Soekarno diasingkan ke Propinsi Bengkulu. Soekarno baru menghirup udara kebebasan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.¹⁰⁴

Pada masa awal penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang tidak begitu memerhatikan keberadaan tokoh-tokoh pergerakan nasional, terutama dalam mengamankan posisi penjajah Jepang di Indonesia. Belakangan pemerintahan Jepang baru menyadari pentingnya memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia untuk menarik hati penduduk Indonesia.

Pada 1943, Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar Jepang Hirohito memberikan bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Kelas II untuk Sukarno dan Kelas III untuk Hatta dan Ki Bagus. Ini penghargaan kelas tinggi yang membuat si penerima

¹⁰³ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) halaman 33

¹⁰⁴ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008) halaman 23

dianggap sebagai bagian dari keluarga istana.¹⁰⁵ Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan kependudukan Jepang di Indonesia terkejut. Bagaimana tidak, penganugerahan bintang kekaisaran pada Soekarno, Moh. Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo dianggap sebagai bagian kekaisaran Jepang.

Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1945, yaitu sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyoningrat diundang oleh Marsekal Terauchi dari Jepang, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Ketiga tokoh pergerakan Indonesia itu diberitahu bahwa Pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. "Kapan pun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan." Itulah yang diucapkan Jenderal Terauchi pada pertemuan tersebut. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.¹⁰⁶ Hal ini tentu saja menggembirakan hati Soekarno. Betapa tidak, mimpi menjadi sebuah negara yang merdeka sudah di depan mata. Namun semua tidak seperti yang diharapkan, janji Jenderal Terauchi bisa dibilang sekedar janji palsu untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Nasional disaat pengaruh Jepang mulai terdesak oleh eropa dan sekutu dalam perang.

Singkat sejarah, Soekarno dan Hatta menjadi tokoh nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1334 H. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta dilantik oleh PPKI menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama.¹⁰⁷ Pada tanggal 29 Agustus 1945, jabatan Soekarno dan

¹⁰⁵ <https://narakata.com/2015/11/25/sukarno-hatta-dan-hadikusumo-bertemu-tenno-haika-di-tokyo>. Diakses pada Agustus 2018, pukul 09.00 Wib.

¹⁰⁶ <https://republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/12/na6jd946-aroma-merdeka-dari-dalat>. Diakses pada Agustus 2018, pukul 09.50 Wib.

¹⁰⁷ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008) halaman 27

Moh.Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Pada tanggal 19 September 1945, Soekarno berhasil menyelesaikan peristiwa di lapangan Ikada ketika 200.000an rakyat Jakarta bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Tak lama setelahnya, Letjend Sir Philip Christison dari Sekutu (AFNEI) mengakui kedaulatan Indonesia secara *de facto* setelah mengadakan pertemuan dengan Soekarno. Semenjak itu, nama Soekarno semakin diperhitungkan pada pentas dunia.

d. Masa Kejatuhan dan Akhir Hayat Soekarno

Masa-masa kejatuhan Soekarno ditandai ketika ia pecah kongsi dengan Hatta. Pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari arena perpolitikan nasional. Hatta tidak setuju dengan Soekarno yang memberikan angin segar kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Tambahan lagi terjadi sejumlah pemberontakan separatis di beberapa tempat di Indonesia. Puncaknya adalah pemberontakan G30S/PKI. Setelah lengser, oleh Orde Baru Soekarno dikurung di Wisma Yaso dan tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat, seperti yang dicantumkan dalam Surat Perintah Pangdam Siliwangi HR. Dharsono. Sekitar tahun 1967 Soekarno menderita sakit, dan agar tidak bertemu simpatisannya, Soekarno dibawa dengan mobil dari Bogor langsung masuk garasi dokter Oei di Menteng. Pintunya ditutup dan Soekarno masuk lewat garasi.¹⁰⁸

Kabar yang berhembus mengatakan, mantan Presiden Soekarno di rumah sakit ini dari rumah tahanannya di Wisma Yaso, yang hanya berjarak 5 kilometer. Malam itu, desas-desus tentang sakitnya Soekarno terbukti. Di dalam ruangan perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan Presiden, Soekarno tergolek lemah dipembaringan. Selama beberapa hari, kondisi kesehatan Soekarno memang sedang tidak baik. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Penyakit ginjal yang tidak dirawat semestinya kian

¹⁰⁸ Asvi Warman Adam, *Drama Soekarno*, (Koran Kompas) edisi 30 Juli 2006.

menggerogoti tubuhnya.¹⁰⁹ Dalam kondisi koma dan bisa dibilang berada diantara hidup dan mati, dikeluarkanlah komunike medis yang menunjukkan kondisi Soekarno yang telah ditandatangani oleh Prof. Dr. Mahar Mardjono, tim dokter kepresidenan RI. Komunike tersebut berisi: Pada sabtu, 20 Juni 1970, pukul 20.30 wib, keadaan Soekarno semakin memburuk dan tingkat kesadarannya berangsur-angsur menurun. Pada 21 Juni 1970, pukul 03.50 wib, Soekarno dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian, pada pukul 07.00 wib, Soekarno dinyatakan meninggal dunia.¹¹⁰

Soekarno memiliki sembilan istri yaitu Sito Oetari, Inggit Ganarsih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi Soekarno, Yurike Sanger, Kartini Manoppo, Haryati, dan Heldi Djafar. Soekarno meninggalkan delapan anak dari tiga istrinya, yaitu Guntur Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, Rachmati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guruh Soekarno Putra, Muhammad Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, dan Karina Kartika Sari Dewi Soekarno.¹¹¹

2. Peran Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Indonesia

Peran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perangkat tingkah laku atau tindakan Soekarno, termasuk di dalamnya adalah gagasan atau ide dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk peran diteliti karena dianggap sebagai dasar memahami pola sekaligus tindakan tokoh dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia.

Pada bagian paparan data ini, peneliti sudah melakukan pereduksian data atau pemilahan data primer dan data sekunder, sekaligus pengelompokkan data sesuai dengan rumusan yang peneliti angkat. Data yang berbentuk teks dan rekaman video peneliti paparkan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008) halaman 157

¹¹⁰ Adji Nugroho, *Selangkah Lebih dekat dengan Soekarno*, (PT. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2017) halaman 238.

¹¹¹ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008) halaman 58

Sebagai fadjar sehabis malam yang gelap gulita, sebagai penutup abad-abad kegelapan, maka di dalam abad kesembilan belas berkilaukilauanlah di dalam dunia ke-Islam-an, yang namanya tak akan hilang tertulis dalam buku riwayat Muslim, Sheikh Muhammad Abduh, dan Sayid Djamaluddin El Afghani, yang pertama-tama membangunkan rasa perlawanan di hati sanubari rakyat-rakyat Muslim terhadap bahaya imperialisme Barat.¹¹²

Soekarno menganggap pembaharuan Islam yang dilakukan oleh M. Abduh dan Djamaluddin El Afghani pada abad 19 merupakan pembaharuan Islam yang progresif. Soekarno merasa model pembaharuan kedua tokoh tersebut menggerakkan umat agar menjadikan Islam sebagai spirit melawan imperialisme kaum barat. Situasi perang dunia II yang menjadikan negara Islam yang di timur tengah, di benua Afrika hingga benua Asia mengalami masa-masa kelam dan penuh ketidakmajuan karena ulah kolonialisme kaum Eropa.

Terutama sekali sesudah Abu Hasan Asy'ary mengembangkan haluan sifatiah dan menjadi pelopor dari kehidupan rohaniyah, maka akal menjadi terkutuklah di ingatan umat. Asy'arisme inilah yang menjadi nada dasar semua kehidupan rohani Islam sampai sekarang atau paling tidak, sampai bangkitnya mahaguru Jamaluddin el-Afghani, yang memulai dengan pendobraknya pintu penutupan akal itu. Asy'arisme inilah pokok pangkalnya taqlidisme di dalam Islam, pokok pangkalnya kependetaan di dalam Islam. Islam bukan lagi salah satu agama yang bisa dipikirkan secara merdeka, tetapi menjadilah monopolinya kaum faqih dan kaum tarikat.¹¹³

Mana yang benar nanti? Yang benar adalah yang cocok dengan kita punya akal, asal akal kita itu akal merdeka. Akal yang masih terikat pada tradisi pikiran sendiri, akal yang belum akal merdeka, tak dapatlah kita pakai sebagai penyuluh untuk mencari kebenaran dalam rimbanya kegelapan. "Agama adalah bagi orang yang berakal", begitulah Nabi bersabda. Orang yang berakal hanyalah orang yang bisa menggunakan akalnya itu dengan merdeka. Orang yang akalnya masih terikat bukanlah orang yang berakal. Orang yang demikian itu adalah orang yang mengambang kepada tradisi pikiran sendiri...¹¹⁴

¹¹² Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 9.

¹¹³ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 441.

¹¹⁴ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015),, halaman 337.

Soekarno menganggap pangkal dari ketidakhadiran Islam dalam pemikiran adalah sistem taqlidisme dalam berfikir. Taqlid adalah sistem berfikir yang menyandarkan pada hasil pemikiran orang lain. Tidak ada ijtihad yang dilakukan oleh osetiap muslim dalam menyelesaikan persoalannya. Hal ini menghambat pengembangan Islam era modern.

Saya tahu tuan punya pesantren, buka *universiteit*, tetapi alangkah baiknya kalau toh *western science* disitu ditambah banyaknya. Demi Allah “Islam science” bukan hanya pengetahuan Qur’an dan Hadits saja; “Islam science” adalah pengetahuan Qur’an dan Hadits plus pengetahuan umum! Orang tak dapat memahami betul Qur’an dan Hadits kalau tak berpengetahuan umum....¹¹⁵

Bagaimanakah orang bisa mengerti betul-betul firman Tuhan, bahwa segala barang itu dibikin olehNya “berjodoh-jodohan”, kalau tak mengetahui biologi, tak mengetahui elektron, tak mengetahui positif dan negatif, tak mengetahui aksi dan reaksi? Bagaimanakah orang bias mengerti firmanNya, bahwa “kamu melihat dan menyangka gunung-gunung itu barang keras, padahal semua itu berjalan selaku awan”, dan bahwa “sesungguhnya langit-langit itu asal mulanya serupa zat yang bersatu, lalu kami pecah-pecah dan kami jadikan segala barang yang hidup daripada air”, kalau tak mengetahui sedikit astronomy? Dan bagaimanakah mengerti ayat-ayat yang meriwayatkan Iskandar Zulkarnain, kalau tak mengetahui sedikit history dan archeology? Lihatlah itu blunder-blunder Islam sebagai “Sultan Iskandar” atau “Raja Fir’aun” yang satu” atau “perang Badar yang membawa kematiannya ribuan manusia hingga orang berenang dilautan darah”! Semua itu karena kurang penyelidikan history, kurang *scientific feeling*.¹¹⁶

Islam is progress, Islam itu kemajuan. Progress berarti barang baru, barang baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi tingkatannya dari pada barang yang terdahulu. Progress berarti pemikiran baru, *creation* baru, bukan mengulangi barang yang terdahulu, bukan mengcopy barang yang lama.¹¹⁷

Alangkah baiknya kalau tuan punya mubaligh-mubaligh nanti bermutu tinggi, seperti tuan M. Natsir, misalnya saja punya keyakinan yang sedalam-dalamnya ialah bahwa Islam di sini di seluruh dunia tak akan bersinar kembali kalau kita orang Islam mempunyai “sikap hidup” secara kuno saja, yang menolak ke-Barat-an dan ke modern.¹¹⁸

¹¹⁵ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), 395.

¹¹⁶ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), 336.

¹¹⁷ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 340.

¹¹⁸ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 336.

Pengembangan pendidikan Islam harus menggunakan pendekatan *science*. Kalimat Soekarno diatas menjadikan gagasan yang luar biasa dalam mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum untuk siswa. Soekarno berharap lembaga pendidikan Islam tidak semata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tapi juga harus dibekali pengetahuan lain, meski pengetahuan lain itu tidak bersumber dari orang-orang Islam.

Saya pernah bertemu seorang yang sedikit terpelajar tetapi ia tak dapat memuaskan, karena mati hidup dengan kitab fiqh. Qur'an dan api Islam seakan-akan mati, karena kitab fiqh itu sajalah yang dijadikan pedoman hidup, bukan kalam ilahi, maka kitab fiqh itulah yang seakan-akan ikut menjadi semangat Islam. Bisalah suatu masyarakat itu hanya dialaskan saja kepada artikel. Masyarakat yang demikian itu akan segeralah menjadi masyarakat mati. Sebab tanda-tandanya ialah justru ia punya hidup, ia punya nyawa. Begitu pula, umat Islam tenggelam di alam kitab fiqhnya saja, tidak seperti burung garuda di atas udara.¹¹⁹

“Saya ingin sekali membaca Buchari dan Muslim yang sudah tersalin dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Saya perlu kepada Buchari atau Muslim, karena disitulah dihimpunkan Hadist. Hadist yang dinamakan sahih. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris, bahwa di Buchari masih terselip Hadist-Hadist yang lemah. Bahkan kemunduran Islam karena banyaklah Hadist. Hadist lemah, yang lebih laku dari ayat-ayat AlQur'an.¹²⁰

Kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketakhayulan orang Islam, banyak disebabkan karena hadist-hadist lemah, yang sering lebih laku dari pada ayat-ayat Alquran itu sendiri.¹²¹

Saya sendiri, sebagai seorang terpelajar, barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam, sesudah saya mendapat membaca buku-buku Islam yang modern dan *scientific*. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar, ialah oleh karena Islam tak mau membarengi zaman, dan karena salahnya orang-orang yang mempropagandakan Islam; mereka kolot, mereka ortodoks, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan, takhayul, jumud, menyuruh orang bertaqlid saja, menyuruh orang “percaya” saja, mesum embahnya mesum!

¹¹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015),, halaman 495.

¹²⁰ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 326

¹²¹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 326

“Coba tuan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik didalam tuan punya pikiran dan perbuatan, maka tidak banyak orang yang menunjuk kepada tuan dengan jari seraya berkata: tuan menyalahi Islam. Tetapi coba tuan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asampun dan seluruh dunia akan mengatakan tuan orang kafir! Inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini: terlalu mementingkan kulit saja, tidak mementingkan isi.”¹²²

Menurut peneliti Soekarno menginginkan, dalam mengembangkan pendidikan Islam, siswa harus banyak mempelajari literasi dari berbagai sumber. Tidak monoton hanya buku-buku fiqh yang berkuat pada soal hukum Islam semata. Alqur’an dan Hadits sangatlah luas cakupannya. Pengembangan pendidikan Islam harus mengarah pada esensi Islam yang lebih luas.

Pengeramatan manusia itu adalah salah satu yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat. Oleh karenanya pengeramatan manusia itu melanggar Tauhid, kalau Tauhid rapuh, datanglah kebencanaan.¹²³

“Kita merayakan Maulud Nabi, apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekedar Muhammadnya, bukan sekedar dia dulu Nabi, Tidak, yang kita rayakan adalah ajaran, konsepsi, agama, yang ia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan, via malaikat Jibril, kepada Rasul, rasul meneruskan kepada umat, yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jika benar-benar kau merayakan maulud Muhammad bin Abdullah, jika benar-benar kau merayakan kelahiran Rasulullah, yang punya hari maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa agama yang dia bawa. Kerjakan samasekali. Agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima arti dari agama yang ia bawa oleh Nabi Muhammad.”¹²⁴

Tiap-tiap kalimat di dalam Qur'an, tiap-tiap ucapan di dalam Hadits, tiap-tiap perkataan di dalam riwayat, haruslah interprestasikan cahanya roh Islam sejati ini. Janganlah kita melihat kepada huruf, marilah kita melihat kepada rohnya huruf itu, jiwanya huruf itu, spiritnya huruf itu.¹²⁵

sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang

¹²² Rekaman pidato Soekarno dalam Koleksi Arsip Perpustakaan Nasional.

¹²³ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015),, halaman 352.

¹²⁴ Rekaman pidato Soekarno dalam Koleksi Arsip Perpustakaan Nasional

¹²⁵ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 400.

dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak.¹²⁶

Pengembangan pendidikan Islam selanjutnya bisa menggunakan pendekatan interaktif antara guru dan murid. Namun kenyataan dilapangan murid justru mengkultuskan gurunya. Sehingga tidak terjadi interaksi dalam proses pembelajaran. Murid dianggap tidak memiliki aspek kesopanan misal bertanya pada gurunya. Hal ini harus dirubah, pengkultusan kepada guru akan menghambat pengembangan siswa dalam berfikir dan memahami ilmu.

Soekarno sangat menitikberatkan akan fungsi akal setiap individu muslim dalam berfikir. Berfikir secara mandiri atau berijtihad merupakan esensi Islam dalam mengembangkan peradaban Islam yang sesuai dengan spirit ajaran yang dibawa manusia. Dengan kebebasan berfikir umat akan mampu membangun peradaban yang sesuai tuntutan zaman, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan sekedar seremoni keagamaan semata.

C. Kebijakan Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Indonesia

Diera awal kemerdekaan, Indonesia beberapa kali merombak system demokrasinya, dari perlementer ke demokrasi terpimpin, hingga sempat pula Indonesia bersistem Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam pendekatam ideologipun Negara masih menjadi tarik ulur, meski Pancasila sudah menjadi dasar Negara. Diantaranya adalah kaum Islam, diwakili Masyumi dan NU, kaum nasionalis diwakili PNI, dan kaum Komunis diwakili oleh PKI. Hasil pemilu pertama republik ini menunjukkan tiga golongan ini yang paling dominan dalam menentukan kebijakan eksekutif yang saat itu dipimpin oleh Soekarno.

Pendidikan Islam yang kala kolonial dianggap pengganggu stabilitas keamanan Hindia Belanda, diawal kemerdekaan mulai diperjuangkan melalui jalur politik agar

¹²⁶ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi(Jilid 1)*, (Yayasan Bung Karno & PT Media Presindo, Yogyakarta, 2015), halaman 92

mendapat legitimasi Negara. Pendidikan Agama yang sebelumnya diluar kurikulum atau diajarkan hanya dirumah dan dimasjid serta pondok pesantren, kini diperjuangkan untuk masuk ke bangku sekolah. Hal ini tentu tidak mudah sebab partai yang berideologi non agama, tentu tidak begitu saja merestui ide tersebut.

Komitmen tokoh Muslim didasarkan kepada kesadaran bahwa peran pendidikan agama sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Di antara tokoh Muslim yang terus menyuarakan pendidikan Islam di dalam sidang-sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi, mereka menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.¹²⁷

Dengan masuknya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, secara tidak langsung ini menunjukkan pelajaran agama tidak lagi didiskriminasi seperti waktu Belanda masih berkuasa. Status ini penting mengingat kurikulum pendidikan sangat mempengaruhi corak pendidikan dan hasil manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Sehingga wajar, para tokoh Islam progresif, sangat mendesak KNIP supaya pendidikan Agama diajarkan di sekolah-sekolah.

KNIP merupakan badan pembantu presiden yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah bahkan sebagian besar juga mantan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). KNIP merupakan cikal bakal dari DPR. KNIP terdiri dari 137 anggota dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo, wakil I M. Sutardjo Kartohadikusumo, wakil II Mr. J. Latuharhary, wakil III Adam Malik. Atas usulan KNIP dalam sidang di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1945 diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X. dan sejak saat itu tugas, kedudukan, dan wewenang

¹²⁷ Shaleh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet; I, 2005. halaman 25.

KNIP berubah dengan terlibatnya KNIP dalam kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.¹²⁸

Dengan terlibatnya KNIP dalam kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, menjadi wajar jika banyak kepentingan saling tarik ulur dilembaga yang kelak menjadi embrio DPR saat ini. Kelompok atau golongan serta partai politik akan saling berebut pengaruh sebagai konsekuensi sistem demokrasi. Hingga hasilnya adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Dimana pendidikan agama belum masuk menjadi kurikulum pendidikan Nasional. Menurut hemat peneliti, UU tersebut menunjukkan pendidikan agama hanya sebatas tambahan atau muatan lokal sebab tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Artinya, pendidikan agama belum diakui eksistensinya oleh rezim.

Di tinjau dari aspek politik, penetapan UU tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis islamis yang diwakili oleh tokoh –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, dan NU. Disisi lain kekuatan kelompok nasional Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan. Hal ini yang menjadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideologi agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis

¹²⁸ [Kompasiana.Com/Van_Nder/552ae9edf17e612953d623b8/Sidang-Knip-Di-Malang-1947](https://www.kompasiana.com/Van_Nder/552ae9edf17e612953d623b8/Sidang-Knip-Di-Malang-1947) (Diakses November 2018)

agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.¹²⁹

Hemat penulis, gesekan kepentingan dalam memperjuangkan ideologi partai politik ini menyebabkan pendidikan agama Islam tidak berhasil secara baik dalam susunan kurikulum. Dikotomi dalam memandang pengetahuan adalah dasar dari pangkal gagalnya agama Islam menjadi kurikulum. Soekarno sebagai kepala Negara sekaligus pendiri partai PNI yang mewakili golongan nasionalis nampaknya cenderung satu kata dengan PKI yang kala itu cukup kuat diparlemen. Sehingga kebijakan Soekarno dalam melihat agama Islam sebagai mata pelajaran nasional kurang diperjuangkan. Peneliti melihat tidak adanya upaya yang serius dari Soekarno dalam memasukkan pendidikan Islam sebagai kurikulum, karena kepentingan politik taktis yang begitu kuat.

Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus pada aspek politik dengan ideologi politik nasional sekuler yang mempengaruhinya. Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontennya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.¹³⁰

Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Secara konsep bersifat nasional dan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum berjalan dengan baik karena dilatari oleh dua hal, *pertama*, kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dan pemiskinan zaman penjajahan masih sangat mengental di kalangan masyarakat. *Kedua*, pemerintah tampil semakin

¹²⁹ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh- Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004) Cet. I, h. 42

¹³⁰ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003), Cet. I, h. 22

intensif dan mendominasi pada tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerintahan dengan inti kekuatan “nasakom” yaitu nasional, agama dan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dan pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia mengalami masa kejayaan dalam menguasai politik penyelenggara Negara.¹³¹

Analisa peneliti, Soekarno mengamankan stabilitas nasional dalam sistem Negara multi partai dengan mengakomodir semua suara dari partai politik. Dimana hal ini terlihat dalam program Nasakom, yaitu Nasionalis (PNI), Islam (Masyumi dan NU), dan Komunis (PKI). Dalam kepentingannya terkait pendidikan Agama Islam sebagai kurikulum, PNI dan PKI cenderung sepakat untuk melawan golongan Islam, tentu ini sangat pengaruh pada voting dalam kursi parlemen. Meski Soekarno memiliki konsep Islam progresif yang bertitik pada kekuatan rasionalitas dalam membaca teks-teks suci, namun dalam kebijakan yang di undangkan 1950, konsep itu tidak diupayakan untuk di masukkan menjadi ruh progresif pendidikan Nasional.

Kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, barulah terlihat melalui Menteri Agamanya, K.H. Wahid Hasyim, yang pada tanggal tahun 1949 mengadakan konferensi besar di Jogjakarta tanggal 14-18 april 1950. Konferensi tersebut melahirkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1950. Kemudian ditahun yang sama Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal. Payung hukumnya adalah Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar.

Hemat peneliti, pada masa Soekarno, peran dalam pendidikan Islamnya adalah meletakkan dasar-dasar yang diduga kuat menjadi konsep berdirinya sekolah madrasah modern. Sedang kebijakannya, Soekarno melalui peraturan pemerintah, mengakui sekolah

¹³¹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003),Cet. I, h. 21

madrasah setara dengan sekolah umum. Meski pendidikan agama Islam sebagai matapelajaran di sekolah umum masih cenderung seperti muatan lokal, belum menjadi kurikulum nasional yang diwajibkan.

Pendidikan nasional pasca kemerdekaan rakyat Indonesia, yakni masa awal kemerdekaan (1945-1965) tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial-politik yang ada. Karenanya transisi kebijakan pendidikan nasional pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya, yaitu: *Fase pertama*; sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1950, *Fase kedua*; dari fase akhir pertama sampai dikeluarkannya dekrit presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa demokrasi liberal atau parlementer (1951-1959), sedangkan *Fase ke-tiga*; dari akhir fase kedua sampai berakhirnya masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Keseluruhan fase tersebut tergolong dalam orde lama (1945-1965).¹³²

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan disegala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena kondisi sosial-politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai karena disana-sini masih terjadi instabilitas. Tidak mengherankan bila selama orde lama sering terjadi pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara 1945-1959 M, kabinet di Indonesia rata-rata berumur 7-8 bulan.¹³³

Perubahan sistem pemerintahan ini berimplikasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi

¹³² Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005), halaman 54.

¹³³ Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005), halaman 55.

penting untuk dikaji lebih dalam. Termasuk didalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam di awal kemerdekaan.

Merunut pada sejarah, pendidikan Islam pada masa kolonial dapat dikatakan sebagai momok bagi kaum penjajah. Belanda yang saat itu menjajah Indonesia sangat mencurigai dan tidak suka terhadap keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren, surau, dan sebagainya. Hal ini disebabkan, karena lembaga pendidikan Islam tersebut dianggap sarang pemberontakan dan pembangkang dan sebagainya. Diketahui bahwa di dalam Islam terdapat konsep jihad, yakni perang melawan orang-orang kafir; dan Belanda dianggap sebagai orang kafir yang harus diperangi. Dalam keadaan demikian, maka politik pendidikan yang diterapkan oleh umat Islam adalah bersikap non-kooperatif, yakni tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan bercita-cita untuk mengusir Belanda dengan mendorong para pelajar untuk berjuang perang melawan Belanda.

Sejalan dengan itu, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah sebagaimana diterapkan oleh Belanda. Kegiatan pendidikan ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan sebagainya. Dilembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut selain diberikan pengetahuan agama juga diberikan pengetahuan umum, rasa cinta tanah air (nasionalisme), semangat kejuangan dan membela kebenaran (patriotisme) melalui pendidikan kepanduan, nyanyian dan lain sebagainya. Dari lembaga pendidikan inilah selanjutnya dilahirkan Sumpah Pemuda, yang selanjutnya timbul semangat untuk berjuang mengusir penjajah.

Semangat tersebut membara bukan hanya ia secara posisi menjadi presiden, tapi telah menjwai secara kepribadiannya. Hal ini terlihat setelah lengser dari kursi kepresidenannya pun, Soekarno tetap tegar dan teguh menerima pengasingan di Wisma Yaso. Soekarno meminta seluruh rakyat untuk diam. Dalam pidato pada 17 Agustus 1965,

Soekarno antara lain berdoa agar gagasan-gagasan atau ajaran-ajarannya dapat hidup terus, bahkan jika mungkin seribu tahun lagi.¹³⁴

Dalam uraian kuliah-kuliah umumnya, tidak jarang Soekarno menyitir pendapat Confusius, Renan, Marx atau Ghandi. Ia seolah ingin menunjukkan dan memberi contoh, bahwa siapapun perlu terus memperluas pengetahuannya. Meski ia sendiri dididik sebagai orang teknik, namun ia juga mengakrabi berbagai wacana tentang ilmu sosial, seperti filsafat, sejarah, politik, dan agama. Kecuali itu, Soekarno juga selalu berupaya keras mempertemukan buku dengan bumi. Seperti ketika ia menyinggung pertemuan dan dialognya dengan seorang petani yaitu Marhaen. Dialog sendiri sudah berlangsung jauh sebelumnya, namun ia masih mampu mengingat dan menggambarkan dengan amat jelas. Sering pula Soekarno melampirkan teori-teori sosial-politik dengan keseharian amnesia Indonesia yang sedang ia perjuangkan. Konsep marhaenisme misalnya yang ia gunakan untuk menolak elitisme. Ia menegaskan bahwa marhaenisme menolak tiap tindak borjuisme yang menurut Soekarno merupakan sumber kepincangan yang ada dalam masyarakat.¹³⁵ Bagi Soekarno, sebagaimana yang dikatakan Mc Vey, rakyat merupakan “padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx.” Artinya mereka ini merupakan kelompok yang sekarang ini terampas hak-haknya, tetapi nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia.¹³⁶

Secara tersirat, Soekarno sangat memperjuangkan egalitarian, atau kesetaraan sosial tanpa kelas. Sehingga wajar jika ia sangat menentang kolonialisme yang dilakukan barat kepada daerah jajahannya, termasuk didalamnya Indonesia. Sikap ini ia dapatkan sejak tinggal di rumah H.O.S Cokroaminoto, Soekarno menyebut rumah Cokroaminoto sebagai dapur revolusi. Pada waktu yang sama, ia juga belajar banyak tentang Islam. Sebab Cokroaminoto yang kemudian hari menjadi mertuanya, merupakan salah satu pendiri SI

¹³⁴ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008) halaman 60

¹³⁵ Bernard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Terj. Hasan Basri (LP3ES, Jakarta, 1987).

¹³⁶ Ashad Kusuma Djaya, *Soekarno Perempuan dan Revolusi*, (Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2013) halaman 146.

atau Sarekat Islam, yang saat itu merupakan organisasi Islam pertama yang sangat progresif dalam menentang penjajahan.

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menuntut manusia yang hidup dijamannya mengikuti perubahannya. Zaman menuntut manusia untuk semakin modern dari masa ke masa, dan bagi siapa saja yang tak mengikuti perubahan zaman, selalu tak mampu berkompetisi dengan yang lainnya. Misal saja, pada tahun 1450 M kekhalfahan Ottoman Turki yang bertahan menolak modernisasi dalam bidang percetakan buku. Khalifah masih mengikuti fatwa haram dari para ulama Turki yang mengharamkan penggunaan mesin cetak. Mesin cetak disebut sebagai "Temuan setan". Akibatnya, buku-buku terbitan Turki kalah bersaing dengan buku-buku dari Eropa yang dicetak dengan mesin cetak. Peredaran dan harga buku-buku Eropa lebih masif dan lebih terjangkau masyarakat sebab diproduksi menggunakan mesin. Turki tertinggal jauh karena masih memproduksi buku dengan disalin tangan.¹³⁷ Berkaitan dengan hal diatas Soekarno sangat meyakini bahwa tidak mungkin manusia menghindari perubahan zaman, artinya modernitas adalah keniscayaan peradaban manusia. Soekarno berfikir terbalik dengan ulama Turki, harusnya Islam menerima kemajuan zaman meski bukan kaum muslim yang menemukan atau menciptakannya.

Soekarno menjadi gelisah melihat realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam yang sudah berabad-abad lamanya hidup dalam penindasan dan penjajahan oleh bangsa asing. Adakah memang agama Islam yang dikatakan *rahmatul lil 'alamin* serta agama yang sempurna dan terakhir ini tidak punya pendorong untuk membebaskan umatnya dari cengkeraman dan belenggu kolonialisme dan imperialisme, apa sebab dunia Islam jatuh ketangan asing serta hidup dibawah telapak kaki penjajahan Barat.¹³⁸ Di mana-mana posisi umat Islam selalu terdesak, Islam yang seharusnya

¹³⁷ www.kompasiana.com/caesarbalinda (di akses 12 Maret 2018)

¹³⁸ Solichhin Salam, *Bung Karno Dan Kehidupan Berfikir Dalam Islam*, (PT. Wijaya, Jakarta, 1964) halaman 7.

mengatasi sesuatu masalah menjadi diatasi. Ini semua terjadi karena, umat Islam telah kehilangan ajaran Islam yang murni, Islam telah dicemari oleh tradisi-tradisi lokal. Islam yang rasional telah digantikan oleh Islam yang penuh *takhayul*, *khurapat*, dan unsur-unsur non Islam. Para ulama hanya mengkaji kitab-kitab lama seperti kitab fiqih, cenderung kurang mau mengkaji dan menafsiri Al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹³⁹

Salah satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pada abad 19 adalah keadaan umat Islam yang demikian terbelakang bila dibanding dengan Eropa. Cara untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan itu, para pemikir Muslim secara sungguh-sungguh menyelidiki fakta yang menyebabkannya dan mencari jalan pemecahan yang dapat membawa umat Islam ke arah kemajuan.¹⁴⁰

Soekarno tertarik dengan Islam setelah membaca buku-buku Islam modern dan ilmiah, yang bisa diterima oleh akal. Jika Islam disebarkan dengan cara ilmiah menurut Soekarno seluruh dunia akan mengakui kebenaran Islam. Dengan cara takhayul; dan jimat maka banyak kaum intelektual Indoensia yang menjauhi Islam.¹⁴¹ Soekarno yang telah mempelajari tulisan dari para pemikir Islam yang beraliran pembaharuan khususnya yang berasal dari Mesir, Turki dan India. Tokoh yang sering disebutnya baik sewaktu di Endeh maupun di Bengkulu adalah Amir Ali penulis buku *the spirit of Islam*, yaitu sebuah buku yang banyak membicarakan Islam dari sudut pandang rasional dan tuntutan kehidupan modern.¹⁴² Dengan mempelajari tulisan dari pemikir Islam Soekarno berkesimpulan betapa mundurnya umat Islam di Indoensia dibanding dengan umat Islam yang berada di Mesir, Turki dan India.

Islam tidak akan berkembang, kalau umat Islam tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami makna dibalik Al-Qur'an dan Hadist. Islam akan berkembang

¹³⁹ Jalaludin Rahmad, *Islam Aktual*, (Mizan, Bandung, 2003), halaman 120.

¹⁴⁰ Syahrin Harahap, *Gagasan-gagasan Sekulerisasi Thaha Husain Ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadist* (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992) halaman 93.

¹⁴¹ Bob Hering, *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka*, (Hasta Mitra, Jakarta, 2003), halaman 274.

¹⁴² M. Ridwan Lubis, *Sukarno dan Modernisme Islam*, (Bambu, Jakarta, 2010), halaman 92.

kalau umat Islam mau mengikuti perkembangan zaman. Segala ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Barat. Kalau umat Islam ingin maju harus bisa mengambil peradaban Barat, kemudian diterapkan di Indonesia. Soekarno sudah tahu bahwa Islam, agama yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Soekarno memanfaatkan Islam untuk memacu suatu perubahan.¹⁴³

Islam itu penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh sebab itulah Soekarno menamakan Islam itu dinamis. Dengan demikian Islam cepat berkembang, apalagi di Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam ini menandakan bahwa Islam itu sesuai akal sehat manusia. Islam kalau disebarluaskan secara ilmu pengetahuan, maka seluruh umat manusia akan tertarik dengan Islam. Tetapi sebaliknya kalau Islam disebarluaskan dengan cara yang tidak masuk akal maka banyak kaum cendekiawan yang menjauhi Islam.

Soekarno berkata: Qur'an dan Hadist itu, barulah bisa menjadi pembawa kemajuan, suatu api yang menyala, kalau kita baca Qur'an dan Hadist itu dengan berdasar pengetahuan umum, Qur'an dan Hadistlah yang mewajibkan kita menjadi dilapangkannya segala pengetahuan dan kemajuan. Bagaimanakah orang bisa mengerti betul-betul firman Tuhan, bahwa segala sesuatu itu dibikin berjodoh-jodohan, kalau tak mengetahui biologi, tak mengetahui positif dan negatif, tak mengetahui aksi dan reaksi.

Qur'an dan Hadis bisa berfungsi bagi umat Islam kalau diterapkan secara ilmiah, yang mampu menjelaskan tentang alam semesta dan seisinya bagi manusia. Yang sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang selalu berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada langit, ada bumi, ada tanah ada air, ada laki-laki ada perempuan. Ini semua bisa diterapkan dengan metode tertentu yang dapat dimengerti oleh umat manusia.

¹⁴³ Nurani Soyomukti, *Soekarno Nasakom*, (Garasi, Yogyakarta, 2008), halaman 209.

Menurut Soekarno uraian tentang Islam harus dijelaskan secara rasional tanpa mencampur adukkannya dengan uraian *yang* kurang masuk akal. Bagi Soekarno tidak ada bagian ajaran agama yang tidak bisa dijelaskan secara rasional.¹⁴⁴

Islam bisa diterima oleh umat manusia kalau dijelaskan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Kalau menjelaskan Islam dengan uraian yang kurang masuk akal, maka Islam tidak akan berkembang di muka bumi.

Dengan tulisan tersebut, Soekarno menilai komentarnya tentang tokoh-tokoh Islam atau bahkan *modernisasi* Islam. Soekarno juga memberikan apresiasi lebih terhadap Al-Afghani dengan menganggapnya sebagai tokoh Islam yang berpredikat *mujaddid* (pembaharuan) karena menggali api segala “penyakit” yang ynelemahkan umat Islam. Soekarno memandang bahwa Islam sebenarnya tidak pantas mengalami kemunduran. Akan tetapi, Islam yang pernah mengalami zaman keemasannya, kian waktu kian mundur, bukannya maju dan bertambah kuat. Sebagaimana di Indonesia, Islam yang sebelumnya begitu kuat, pada akhirnya melemah dengan mengguritanya kekuasaan penjajahan Belanda.¹⁴⁵

Soekarno memberikan penilaian atau penghapusan atau apresiasi kepada tokoh yang memperbaharui ajaran Islam, marena memperdalam ajaran Islam yang terkadang di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk membersihkan segala macam yang menghambat kemajuan Islam. Islam bisa maju kalau umat Islam mau menggali isi Al-Qur'an secara menyeluruh. Sebab Al-Qur'an membebaskan manusia dari segala macam penindasan, pemerasan, kebodohan dan kemiskinan, menjadi umat yang kuat dan maju pantang mundur.

¹⁴⁴ M. Ridwan Lubis, *Sukarno dan Modernisme Islam*, (Bambu, Jakarta, 2010), halaman 148.

¹⁴⁵ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan di Mata Soekarno*, (Arruz Media, Yogyakarta, 2009) halaman 85.

Seorang guru agama kalau hanya mengandalkan kitab fiqih saja, tanpa menggali isi Al-Qur'an, maka bisa dikatakan guru agama tersebut tidak memahami Islam secara menyeluruh. Akibatnya umat Islam itu mundur, terbelakang, terjajah dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Semangat untuk mendakwahkan Islam tidak ada, karena kurangnya ilmu pengetahuan agama maupun ilmu umum.

Kekolotan dalam masyarakat Islam memang banyak terjadi sebagaimana diamati oleh Soekarno. Salah satu sebabnya adalah hubungan yang masih feodal di kalangan masyarakat Muslim, yang artinya membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa Islam mengajarkan kesatuan dan demokrasi. Karenanya, masyarakat Islam harus menggunakan akalnyanya agar maju. Suatu ajaran dapat diterima dengan baik dan akan bermanfaat jika menggunakan akal. Dari sini, Soekarno banyak terpengaruh oleh para pemikir yang mendekati Islam secara rasional.¹⁴⁶

Cara atau adat istiadat yang kuno atau sering disebut dengan kekolotan memang banyak terjadi di dalam masyarakat Islam. Akibatnya umat Islam tidak mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Yang mana Islam tidak hanya mengajarkan ibadah yang ritual saja, seperti shalat, puasa maupun haji. Tetapi Islam juga mengajarkan tentang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itulah umat harus bisa memfungsikan akalnyanya untuk memahami isi Al-Qur'an secara menyeluruh.

Soekarno berpendapat bahwa Islam adalah kemajuan mempunyai makna tersendiri dalam pemikiran keislamannya. Soekarno memegang prinsip bahwa kemajuan peradaban umat manusia bukan saja sesuai dengan Islam, tetapi lebih jauh lagi yaitu Islam itu sendiri berarti kemajuan. Karena itu kemajuan identik dengan Islam dan kemajuan tidak mungkin bertentangan dengan Islam. Pendapat yang agak bernada apologi ini sesungguhnya dapat dipahami apabila diingat betapa seriusnya kritikan yang ditujukan

¹⁴⁶ Nurani Soyomukti, *Soekarno Nasakom*, (Garasi, Yogyakarta, 2008), halaman 212-213.

kepada Islam yang menyamakan Islam dengan kebodohan, kemunduran dan sebagainya. Hal ini berarti Islam itu mengandung potensi kebodohan dan kemunduran. Kritikan inilah juga berkembang di Indonesia dan itulah yang ingin dijawab Soekarno. Oleh karena yang dihadapinya adalah kelompok intelektual hasil didikan pola Barat, maka tidak mengherankan kalau cara yang dipakainya sangat menekankan peranan pemahaman akal pikiran.¹⁴⁷

Menurut Soekarno negeri India umat Islamnya adalah sangat kolot, sangat sempit penglihatan, sangat terikat pada adat-adat dan tradisi. Kalau dibandingkan dengan Palestina, maka Palestina yang dikatakan kolot itu maka tampak lumayan sedikit. Di Palestina kekolotan Islam, tidak banyak dicampuri dengan racun takhayul dan kemusyrikan. Di Palestina agama Islam berjajaran dengan agama-agama Kristen dan Yahudi, dua-duanya pada hakekatnya berdasarkan pada monoteisme, kepada ke-Esaan-Tuhan.¹⁴⁸

Umat Islam yang ada di India itu tidak modem atau kolot, dalam arti umat Islam di India itu tidak mau menggunakan rasio atau akal untuk memahami ajaran Islam atau sering disebut dengan Islam tradisional. Islam di India itu Islam keturunan, yang masih terikat oleh adat istiadat atau tradisi. Sehingga Islam di India tidak mengalami kemajuan. Lain dengan di Palestina Islam' di sana tidak dicampuri dengan racun takhayul dan kemusyrikan, tetapi berdasarkan adanya satu Tuhan atau sering disebut dengan monoeisme.

Gerakan Nasionalisme yang berkembang di Mesir, Turki, dan India pada awal abad XX mulai masuk ke Indonesia dan menghadapi tembok yang kokoh pola pemikiran konvensional. Sungguhpun demikian, menurut Soekarno gerakan rasionalisme itu adalah suatu hal yang tak bisa dibendung, karena lambat atau cepat akan membentuk lingkungan

¹⁴⁷ M. Ridwan Lubis, *Sukarno dan Modernisme Islam*, (Bambu, Jakarta, 2010), halaman 155.

¹⁴⁸ Joesoef Isak (Ed), *Bung Karno dan wacana Islam*, (Hasta Mitra, Jakarta, 2001), halaman 88-89.

sendiri. Secara langsung Soekarno menyebut unsur pokok dari gerakan ini adalah umat harus menjadikan pola Mu'tazilah sebagai kerangka pemikiran. Dengan pola berpikir seperti itu, umat Islam dapat memasuki tahap fungsional dari perkembangan peradaban umat manusia. Sebaliknya, apabila umat Islam tetap berpegang pada pola Asy'ariyah, maka akan tetaplah dalam kemunduran.¹⁴⁹

Suatu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau sering disebut dengan nasionalisme, pada abad dua puluh mulai masuk ke Indonesia menghadapi pola pikir yang tradisional atau konvensional. Gerakan ini tidak bisa dicegah karena akan membuat lingkungan tersendiri. Unsur pokok gerakan nasionalisme adalah dengan mengandalkan akal fikiran. Tetapi sebaliknya kalau umat Islam hanya pasrah kepada nasib tanpa mau berusaha mengubahnya maka umat Islam tetap berada dalam kemunduran.

Menafsirkan atau menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis ini akan mendorong umat Islam untuk selalu berfikir. Yakni berusaha memahami ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadis untuk mencari suatu kebenaran. Tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an tapi tidak tahu apa maksud ayat yang dibaca. Dengan demikian umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Bagi kebanyakan orang Islam di Indonesia, yang cenderung konservatif, apa yang tak masuk akal telah terjadi. Al-Qur'an dan Hadis, dasar-dasar kepercayaan yang teramat keramat harus ditafsirkan kembali, tanpa memandang "hurufnya". Apakah cara berfikir, menyelidiki dan menafsirkan yang merdeka itu masih dibimbing oleh "ruh Islam" ataukah dalam kenyataannya bahkan bebas dari ruh itu sendiri? Setelah Soekarno memuji rasionalisme, maka jawaban atas pertanyaan itu tidak sulit dicari. Artikel Soekarno itu, yang dimaksudkan sebagai suatu upaya menuju *modernisasi* Islam di Indonesia, disambut sebagai tantangan oleh orang-orang Islam di Indonesia.¹⁵⁰ Orang Indonesia kebanyakan

¹⁴⁹ M. Ridwan Lubis, *Sukarno dan Modernisme Islam*, (Bambu, Jakarta, 2010), halaman 172.

¹⁵⁰ Bernhard Dahm, *Soekarno Perjuangan Kemerdekaan*, (LP3ES, Jakarta, 1987), halaman 234-235.

bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku atau sering disebut dengan konservatif. Kebiasaan ini kalau terus berlanjut akan menghambat kemajuan Islam. Oleh sebab itulah kalau Islam ingin maju umat Islam harus menggali isi Al- Qur'an dan Hadis dengan menggunakan akal atau rasio. Dengan demikian umat Islam bisa membedakan mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai. Tanpa mau menggali isi Al-Qur'an dan Hadis secara mendalam, keadaan umat Islam akan selalu terbelakang atau mundur.

Soekarno berkata: “bahwa umat Islam se-Indonesia sama sekali beku, tertutup oleh bid'ah, khurafat yang hebat-hebatnya sehingga kadang-kadang bertanya, inikah Islam, inikah agama yang dikatakan agama pamungkas bagi umat Islam” Bahkan Soekarno melihat kepada bangsa-bangsa lain yang beragama Islam, tetapi yang pada waktu itu semuanya tidak merdeka, semuanya diinjak-injak oleh bangsa asing. Seperti Maroko tidak merdeka, Tunisia tidak merdeka, Mesir tidak merdeka, dan negara-negara Arab yang lain juga tidak merdeka, inilah agama yang membuat umatnya tidak merdeka? Apakah Islam itu tidak mempunyai keberanian untuk menjadikan bangsa-bangsa yang menganut agamanya itu menjadi bangsa-bangsa yang berdaulat yang makmur, yang sentosa, yang pantas dikagumi oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Sejak itulah Soekarno lebih gemar memperhatikan ajaran-ajaran Islam, bahkan diperkuat pendiriannya, keyakinannya yang semakin tegas dan kuat.¹⁵¹

Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan atau sering disebut dengan bid'ah. Ini membuat umat Islam beku, statis tidak dinamis. Akibatnya banyak umat Islam tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam. Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa Soekarno berusaha untuk memfungsikan Islam untuk memacu suatu

¹⁵¹ Faozan Amar, *Soekarno dan Muhammadiyah*, (Al-Wasatha Publihing House, Jakarta, 2009), halaman 67

perubahan, dari yang statis ke arah yang dinamis dan dari tradisional ke arah rasionalis. Bukan mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Di samping itu Soekarno berusaha untuk meninggalkan takhayul dan jumud, yang dianggapnya sebagai penghalang kemajuan Islam, untuk kembali kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, gagasan Soekarno dalam memandang Islam itu harus dijelaskan secara rasional tanpa mencampuradukkan uraian yang kurang masuk akal. Soekarno melakukan serangkaian usaha untuk melepaskan umat Islam dari keterikatannya pada penafsiran atau pendapat ulama terdahulu dan menyadarkan umat Islam akan kebebasannya untuk berhubungan langsung dengan Al-Qur'an dan Hadis lewat kerja intelektual. Sebab Al-Qur'an dan Hadis baru bisa bermanfaat bagi umat Islam, kalau dibaca dengan berdasar ilmu pengetahuan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka itulah maka pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia.¹⁵²

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena

¹⁵² Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 32

kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan di tempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman.

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangai seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.¹⁵³

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945-1950 negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Karena itulah Pancasila mantap menjadi landasan idiil pendidikan di Indonesia.¹⁵⁴

¹⁵³ Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*. (Jogjakarta, Ar Ruz, 2009), halaman 87

¹⁵⁴ Sumarsono Mestoko, et.al., *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 145-147

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah.

Dalam amanat pembukaan UUD tersebut pada alenia keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi “pemerintah negara Indonesia” adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meminjam pendapat As’ad Said Ali mengatakan bahwa “konstitusi memberi tekanan tersendiri pada paham kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” amat jelas menyebutkan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata kesejahteraan juga tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 dengan istilah “kesejahteraan umum.”¹⁵⁵ Selain itu, Majda El Muhtaj juga mengatakan bahwa “dalam gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif lebih besar ketimbang format negara dalam tipe negara hukum klasik (formal). Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.”¹⁵⁶ Lalu dipertegas lagi dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang jelas menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kita dapat merumuskan

¹⁵⁵ As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (LP3S, Jakarta, 2009), halaman 212.

¹⁵⁶ Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, Jakarta, 2005), halaman 29.

Undang Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. Kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas.

Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayang sekali pada akhir era ini pendidikan kemudian dimasuki oleh politik praktis atau mulai dijadikan kendaraan politik. Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama.

Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung karena jumlah sekolah belum begitu banyak dan guru-guru yang ditempa pada zaman kolonial. Pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi. Guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang ideal. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakaan era Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan pada Orde Lama. Kebijakan yang diambil pada Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi.¹⁵⁷

Meskipun Indonesia baru memproklamkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan, untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru

¹⁵⁷ <http://gracesmada.wordpress.com/mutu-pendidikan-indonesia> (Diakses 12 Oktober 2018)

Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru, yaitu:

1. Mengibarkan Sang Merah Putih tiap-tiap hari di halaman sekolah.
2. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo lagu kebangsaan Jepang.
4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintah balatentara Jepang.
5. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.¹⁵⁸

Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.¹⁵⁹

¹⁵⁸ I. Djumhur-Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1979), hlm. 200

¹⁵⁹ Endang Sudardja, *UUD RI '45 dalam Hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 89

Oleh sebab itu, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.¹⁶⁰

Pada periode Orde Lama ini berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

1. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila,
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, di negara bagian timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI, landasan idiil pendidikan UUDS RI.
4. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan Manifesto Politik RI menjadi Haluan Negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana.
5. Pada tahun 1965, sesudah peristiwa G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.¹⁶¹

Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No.19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan.¹⁶² Berikut kurikulum berdasarkan waktu pada saat Soekarno menjadi presiden;

¹⁶⁰ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981), halm. 30

¹⁶¹ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981), halm. 31

¹⁶² M. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, (Ar Ruz, Jogjakarta, 2009), halaman 94.

1. Rentang Tahun 1945-1968

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara.

2. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar- standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

3. Kurikulum 1964

Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Panca wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang

studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Pendidikan diberi prioritas utama dan jumlah lembaga pendidikan meningkat secara drastis. Antara tahun 1953-1960 jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta orang. Tetapi sekitar 60% dari jumlah itu keluar sebelum tamat. Sekolah-sekolah lanjutan negeri dan swasta (kebanyakan sekolah agama) dan lembaga-lembaga tingkat universitas bermunculan dimana-mana, tetapi terutama sekali di Jawa dan banyak yang menacapai standar yang tinggi. Dua keuntungan penting dari perluasan pendidikan ini segera tampak nyata. Pada tahun 1939 jumlah orang dewasa yang melek huruf adalah 7,4% sedangkan pada tahun 1961 jumlahnya sudah mencapai 46,7% dari jumlah anak-anak diatas usia 10 tahun (56,6% di Sumatera dan 45,5 di Jawa). Untuk penduduk laki-laki berusia antara 10-19 tahun jumlahnya diatas 76%. Angka-angka ini belum menunjukkan prestasi yang hebat sejak zaman belanda. Lalu pemakaian bahasa Indonesia di seluruh sistem pendidikan dan juga semua komunikasi resmi dan media masa, benar-benar menetapkan kedudukan sebagai bahasa nasional.¹⁶³

Dalam masa transisi yang singkat RIS menjadi RI tidak memungkinkan pemerintah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang komprehensif yang berlaku untuk seluruh tanah air. Belanda meninggalkan sekolah kolonial di daerah yang dikuasai oleh pemerintah RI telah mulai dilaksanakan sistem pendidikan pendidikan yang direncanakan akan berlaku secara nasional dengan segala kemampuan yang terbatas.

¹⁶³ M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta), halaman 473-474.

Setelah RIS terbentuk pada bulan Desember 1949 pemerintah RIS dan pemerintah RI yang menjadi inti dari negara kesatuan dan mempunyai aparat relatif paling lengkap menandatangani suatu “Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.”¹⁶⁴ Piagam ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta dan perdana menteri Republik Indonesia Dr. A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Isinya adalah: Menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari pada RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan maka undang-undang dan pengaturan yang ada tetap berlaku akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI (dahulu) berlaku. Menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas kewajiban menyelenggarakan segala persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran diperbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Atas dasar piagam ini ada kaitan khusus dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RIS dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI mengadakan pengumuman bersama pada tanggal 30 Juni 1950 yang bertujuan untuk sementara tahun ajaran 1950/1951 sistem pengajaran RI dahulu berlaku untuk seluruh Indonesia sampai sistem itu ditinjau kembali. Adapun isi pengumuman sementara tersebut adalah:

1. Mengenai Susunan Sekolah Negeri:

Untuk tahun pengajaran 1950-1951 sementara sistem pengajaran yang berlaku dalam RI dijalankan di seluruh Indonesia. Kemudian, (dalam waktu singkat) sistem itu akan ditinjau kembali.

2. Mengenai Sekolah Partikelir

- a) Pemerintah mendata warganegara dan orang asing yang sekolah.

¹⁶⁴ Helius Syamsuddin, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan*, (Dekdikbud, Jakarta, 1993). Halaman 67.

- b) Bagi semua warganegara diselenggarakan pendidikan sekolah Negeri menurut undang-undang dengan memperhatikan sepantasnya kepentingan- kepentingan khusus mereka antara lain yang mengenal bahasa rumah.
- c) Bagi orang asing tidak didirikan sekolah-sekolah negeri, tetapi diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sekolah menurut kebutuhannya.

Sementara bagi sekolah-sekolah untuk orang asing memperoleh bantuan dari pemerintah berdasarkan ketentuan: selama 2 tahun sesudah tahun 1949 setidak-tidaknya sekolah rendah diberi bantuan berupa tenaga guru maksimal seperdua dari formasi guru sekolah yang bersangkutan menurut ukuran yang berlaku untuk sekolah-sekolah rendah negeri. Sekolah-sekolah partikelir yang mengikuti rencana pelajaran pemerintah dapat diberi subsidi menurut peraturan untuk pemberian subsidi kepada sekolah partikelir. Sekolah partikelir juga harus memberikan Bahasa Indonesia sekurang- kurangnya sebagai mata pelajaran. Pemerintah mengawasi semua sekolah partikelir.

3. Organisasi dan Administrasi Pendidikan

Pemerintah menugaskan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) sebagai organisasai yang menyelenggarakan administrasi pendidikan dan pengajaran di seluruh tanah air. Adapun yang menjadi tugas utama dari kementerian PP dan K adalah:¹⁶⁵

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah dari tingkat yang paling rendah (Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar) sampai kependidikan Tinggi (Perguruan Tinggi).
- b) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di luar sekolah bagi orang-orang dewasa.

¹⁶⁵ Helius Syamsuddin, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan*, (Depdikbud, Jakarta, 1993), halaman 90.

- c) Memelihara dan mengembangkan kebudayaan bangsa sebagai dasar pendidikan di dalam dan di luar sekolah.

Atas dasar tugas-tugas itu maka berdasarkan surat keputusan kementerian PP dan K nomor 4223/kab. Tanggal 15 Februari 1951 dan berlaku surut mulai 1 Oktober 1950 dibentuklah jawatan pengajaran yang menangani pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah dan pendidikan untuk orang dewasa. Selain itu dibentuk Biro Perguruan Tinggi dan biro Hubungan Luar Negeri dalam rangka kerjasama dengan UNESCO: Balai penyelidikan dan perancang pendidikan dan pengajaran (BP4) untuk penelitian, majelis ilmu pengetahuan Indonesia (MIPI) kemudian menjadi LIPI yang bertugas melakukan penelitian pada umumnya.

4. Perubahan Sekolah-sekolah

Setelah RIS kembali ke negara kesatuan RI, jawatan inspeksi pengajaran kementerian PP dan K di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 1950 mengeluarkan keputusan mengenai perubahan sekolah-sekolah yang dilaksanakan di daerah-daerah RI. Sejak tahun ajaran 1949/1950 seluruh sekolah yang berasal dari masa pendudukan Belanda yang pada dasarnya menurut model kolonial diubah dan disesuaikan dengan sistem pendidikan dan pengajaran nasional.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.¹⁶⁶

Dalam salah satu nota *Islamic education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, tugas bagian pendidikan agama ada tiga, yaitu memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular,

¹⁶⁶ Maksun, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), halaman 123.

memberi pengetahuan umum di Madrasah, dan mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama dan kedua dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualistis, sedangkan tugas yang ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama itu sendiri.¹⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas, ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Soekarno, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

1. Pendidikan Islam di Madrasah

Banyak catatan sejarah yang menjelaskan tentang banyaknya “lembaga” pendidikan Islam sebelum Indonesia terbentuk. Memang tak semodern pendidikan Islam hari ini, tapi kiprah pendidikan Islam masa lalu tidak bisa lupakan begitu saja. Meski pendidikan Agama awalnya hanya di ajarkan di masjid-masjid, atau di surau-surau, belakangan terlembagakan dalam bentuk pesantren, namun lembaga-lembaga tradisonal tersebut bisa dikatakan sebagai embrio dari madrasah modern saat ini. Tidak ada informasi yang kuat, kapan pertama kali pendidikan Islam terlembagakan di Indonesia ini, dimungkinkan bersamaan dengan masuknya Islam di nusantara.

Namun dalam analisa penulis, bentuk pendidikan Islam yang kelak menjadi embrio madrasah adalah pesantren, sebab pesantren bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia yang sudah memiliki sistem dan kurikulum pengajaran. Banyaknya pesantren yang berdiri jauh sebelum Indonesia di proklamasikan oleh Soekarno, menjadi satu-satunya lembaga pendidikan asli nusantara, meski gaya pembelajarannya khas ala timur tengah. Sebab di jaman kerajaan Hindu Budha tidak ditemukan bukti kuat bahwa ada sistem pendidikan untuk masyarakat umum. Sehingga

¹⁶⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Ptasaka LP3ES, 1994), halaman 87.

tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa pendidikan untuk masyarakat umum diprakarsai oleh umat muslim, meski dalam bentuk yang sangat sederhana.

Diabad modern, pendidikan Islam tumbuh dalam bentuk yang lebih tertata, meski nusantara dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Meski pemerintah kolonial juga membentuk lembaga pendidikan yang lebih modern, khas Eropa, namun pendidikan Islam model madrasah yang biasa diajarkan di pesantren tidak lantas mati, tetap bertahan dan justru cenderung tumbuh subur, khususnya di Jawa bagian Jawa Timur. Berlahan tapi pasti, madrasah semakin tertata dan menemukan bentuk yang lebih *compatible* terhadap tuntutan zaman.

Misalnya saja, pada tahun 1921, Kiai Nachrowi Thohir atau sering dipanggil mbah bungkul oleh masyarakatnya, mendirikan Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathan. Nama Nahdlatul Wathan sendiri dinisbatkan dari gerakan yang dilakukan oleh para ulama nusantara yang dimulai pada tahun 1916. Kiai Nachrowi Thohir mendirikan Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathan sebagai bentuk penyempurnaan lembaga pendidikan dari Pesantren. Penyempurnaan tersebut mencakup sistem pendidikan, materi, metode belajar, dan evaluasi pembelajaran. Kiai Nachrowi Thohir juga membangun kantor, ruang-ruang belajar dan lain sebagainya. Dimana sistem pendidikan model seperti itu, belum lazim di pesantren pada umumnya.¹⁶⁸

Pada tahun yang sama, 1916, pesantren Tebuireng memperkenalkan sistem pembelajaran yang relatif baru di dunia pesantren, yaitu sistem klasikal. Sistem ini masih sangat jarang atau bahkan belum ada dikalangan organisasi Nadlatul Ulama. Karena selama ini yang umum digunakan dalam sistem pembelajaran di kalangan Nadlatul Ulama' adalah sorogan dan bandongan. Selanjutnya, pada tahun 1938 atas prakarsa KH A Wachid Hasyim As'ary berdiri pula lembaga yang menangani pendidikan Islam (Nadlatul Ulama)

¹⁶⁸ Diringkas dari tulisan Abdul Malik Karim Amrullah pada Tasamamuh.id

yaitu Maarif. Dimana lembaga Maarif ini didirikan sebagai bentuk modernisasi model pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Maarif ini hingga saat ini masih eksis di Indonesia.¹⁶⁹

Selepas Soekarno memproklamasikan republik Indonesia, corak pendidikan Indonesia lebih cenderung melanjutkan pola pendidikan sistem colonial. Madrasah yang sejatinya lahir dari karya bangsa sendiri tidak secara otomatis diakui sebagai lembaga pendidikan nasional. Hal ini bisa dipahami karena Negara masih dalam situasi politik yang yang belum teratur, tarik ulur kepentingan masih sangat kuat dalam mempengaruhi ideologi Negara. Setahun kemudian, 1946 terbentuklah Departemen Agama, departemen ini dibentuk Soekarno sebagai wadah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan agama, termasuk didalamnya adalah urusan pendidikan.

Mempelajari kebijakan pemerintah dalam memberi payung hukum kepada madrasah, terkait erat dengan peran Departemen Agama sebagai garda depan dalam mengupayakan posisi madrasah agar diakui sebagai lembaga pendidikan formal. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar.¹⁷⁰

Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum. Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Pada tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan rincian Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777 orang, Madrasah Tsanawiyah 776 buah dengan murid

¹⁶⁹ Diringkas dari artikel Abdul Malik Karim Amrullah pada buku *NU ditengah Globalisasi*, (UIN-Prees, Malang, 2015) halaman 139.

¹⁷⁰ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Puasaka LP3ES, 1994), halaman 98.

87.932 orang, dan Madrasah Tsanawiyah Atas (Aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang.¹⁷¹

Jenjang pendidikan dalam sistem madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi.¹⁷² Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum.¹⁷³

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab bagian pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan: (1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam

¹⁷¹ Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : DEPAG RI, 1986), halaman. 78

¹⁷² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hlm. 55

¹⁷³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Ptasaka LP3ES, 1994), halaman 99.

(SGHAI). SGAI terdiri dari dua jenjang: (a) jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan (b) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian: Bagian “a” untuk mencetak guru kesusastraan. Bagian “b” untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti. Bagian “c” untuk mencetak guru agama. Bagian “d” untuk mencetak guru pendidikan agama.¹⁷⁴

Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951, kedua madrasah keguruan tersebut di atas diubah namanya. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan.¹⁷⁵ Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. Sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung.¹⁷⁶

Pada masa H. M. Arifin Tamyang menjadi kepala “Jawatan Pendidikan Agama” adalah badan yang merupakan pengembangan dari bagian pendidikan di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHA bagian “d” didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.¹⁷⁷

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII

¹⁷⁴ Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), halaman 124.

¹⁷⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1968), hlm, 361.

¹⁷⁶ Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), halaman 126.

¹⁷⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1968), hlm, 365.

dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.¹⁷⁸

2. Pendidikan Islam di Sekolah Umum

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi :

- a. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.¹⁷⁹ Sebelumnya, telah ada ketetapan bersama Departemen PPK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. ketetapan itu menegaskan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak lebih dari 4 jam per minggu, dengan syarat bahwa mutu pengetahuan umum di sekolah

¹⁷⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 313.

¹⁷⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1994), halaman 92.

rendah itu tidak boleh kurang bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lingkungan lain.¹⁸⁰

Di Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu, sesuai dengan agama para murid. Untuk pelajaran ini, harus hadir sekurang-kurangnya 10 orang murid untuk agama tertentu. Selama berlangsungnya pelajaran agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar. Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri PKK. Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian.¹⁸¹

Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam UU, yaitu:

Pasal 1:	Ditiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.
Pasal 2:	Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu
	Di lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

¹⁸⁰ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1968), hlm, 358.

¹⁸¹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Ptasaka LP3ES, 1994), halaman 93.

Pasal 3	Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.
Pasal 4:	Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
	pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama.
	Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sutau waktu boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.

Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini telah dibentuk kepanitiaan yang dipimpin oleh KH Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.¹⁸²

Pada masa awal politik kemerdekaan, pendidikan Islam diharapkan lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman, setelah ratusan tahun dibawah kekangan kolonial Belanda. Namun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya, mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam keadaan panca-roba dan mencari bentuk yang sesungguhnya. Selain itu adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada itu. Pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada itu. Pemerintah Orde Lama berada dalam tarikan tiga kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis-komunis dan Islamis. Tiga kekuatan ideologis ini sering kali berbenturan, dan saling mengalahkan sejarah mencatat, bahwa Presiden Soekarno menganut paham ideologi nasionalis yang berbasis pada ke-Indonesiaan dan kultural. Dalam posisi ini ia terkadang

¹⁸² Boland, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia*. (Grafiti Pers, Jakarta, 1985) halaman 40.

dekat kepada kelompok Islam dan terkadang dekat pada kelompok sekularis-komunis. Menjelang akhir tahun 60-an misalnya, Soekarno lebih banyak terjebak ke dalam perangkap kaum sekuler-komunis, sampai akhirnya ia dituduh berada di belakang Gerakan 30 S-PKI. Dalam keadaan demikian, perhatian Soekarno terhadap pendidikan Islam amat kurang, bahkan umat Islam terpinggirkan, dan banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang dipenjarakan. Dengan demikian, politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis.¹⁸³

Komitmen tokoh muslim diatas, didasarkan kepada kesadaran bahwa peran pendidikan agama sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Di antara tokoh Muslim yang terus menyuarakan pendidikan Islam di dalam sidang-sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.¹⁸⁴

Di tinjau dari aspek politik, penetapan kebijakan tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis islamis yang diwakili oleh tokoh –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, PSII, NU. Di sisi lain kekuatan kelompok nasional Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan. Hal ini yang menjadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideologi agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis

¹⁸³ As'ad Muzammil, *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru*, (POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, vol. 2, no. 2, desember 2016)

¹⁸⁴ Shaleh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet; I, 2005. halaman 25.

agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.¹⁸⁵

Secara konsep Undang-undang tersebut bersifat nasional dan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum berjalan dengan baik karena dilatari oleh dua hal, *pertama*, kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dan pemiskinan zaman penjajahan masih sangat mengental di kalangan masyarakat. *Kedua*, pemerintah tampil semakin intensif dan mendominasi pada tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerinitahan dengan inti kekuatan “nasakom” yaitu nasional, agama dan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dan pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia mengalami masa kejayaan dalam menguasai politik penyelenggara Negara.¹⁸⁶

Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus pada aspek politik dengan ideologi politik nasional sekuler yang mempengaruhinya. Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontennya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh- Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004) Cet. I, halaman 42

¹⁸⁶ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003),Cet. I, halaman. 21

¹⁸⁷ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003),Cet. I, halaman 22

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Soekarno dalam Mengembangkan Pendidikan Islam

Tonggak kemajuan bangsa tidak dapat dilepas dari kualitas generasi bangsa. Generasi yang unggul akan membawa bangsa kearah kemajuan dan kemakmuran, sebaliknya jika generasi bangsa tidak memiliki kualitas, maka dipastikan negara kedepannya akan kalah bersaing atau tertinggal dengan Negara lain. Islam sebagai sistem nilai, berperan penting terhadap peradaban manusia, didalamnya adalah pendidikan. Islam memberikan gagasan dalam mempersiapkan generasi umat yang tidak hanya cerdas intelektualnya, tapi juga kokoh spiritualnya.

Pada era awal kemerdekaan bangsa Indonesia, kaum santri bisa dibilang kaum yang paling merepresentasikan umat Islam yang sesungguhnya, meski secara kuantitas, tidak banyak. Kaum santri ini biasanya diidentikkan dengan masyarakat yang tinggal dipondok pesantren ataupun simpatisan pemimpin pondok (kyai).

Soekarno berharap kaum santri sebagai representasi kaum muslim Indonesia, harus mampu membawa agama sebagai semangat pembaharuan dan semangat anti kolonialisme. Soekarno menggambarkan sosok muslim yang harus seperti M. Abduh atau Djamaluddin Al-Afghani yang meletakkan Islam sebagai kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari kaum penjajah. Soekarno berkata:

Soekarno membaca buku karya tokoh revolusioner Islam, M. Abduh dan Djamaluddin Al-Afghani Soekarno melihat Islam yang digunakan M. Abduh mampu mendorong rakyat untuk bangkit melawan imperealisme. Secara tersirat, Soekarno sangat memperjuangkan kesetaraan sosial dalam mengenyam kemerdekaan. Sehingga wajar jika ia sangat menentang kolonialisme yang dilakukan barat kepada daerah jajahannya,

termasuk didalamnya Indonesia. Sebab bangsa yang maju seperti eropa mapun bangsa yang terbelakang, memiliki kesamaan hak untuk hidup bebas.

Menurut peneliti, Soekarno mengharapkan Islam yang yang dinamis, yang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Jangan sampai ruh Islam mati karena kekakuan dalam berfikir, Soekarno menganalogikan “seperti air yang membeku karena hawa dingin”.

Dalam analisa peneliti, kalimat Soekarno mengisyaratkan akan kurikulum dipesantren yang harus dirubah, karena terlalu kolot akan perubahan zaman, dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan. Soekarno berharap agar pesantren tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fiqh atau ilmu-ilmu ritual semata. Tapi lebih dari itu, sebagai respon tuntutan zaman, pesantren juga mengajarkan akan ilmu-ilmu teknologi meski secara teori ilmu tersebut ditemukan dan dikembangkan oleh bangsa eropa, yakni umat non muslim. Sederhananya, Soekarno menginginkan kurikulum integratif, kurikulum yang mengintegrasikan urusan dunia dan urusan akhirat.

Tidak adanya budaya ilmiah di pesantren membuat Islam terkekang dan statis. Segala informasi kebenaran yang didapat dari Alquran dan Hadist, dipahami dengan dogmatis. Ayat-ayat mengagumkan Alquran dan Hadist sekedar dibaca dan dihafalkan, namun jarang sekali diteliti secara ilmiah, dibuktikan secara akal sehat. Sehingga dipandangan orang barat, Islam menjadi agama yang tidak sesuai akal sehat, padahal jika digali secara mendalam, Alquran dan Hadist setiap ayatnya adalah rasionalitas manusia itu sendiri. Sebab Tuhan tidak akan menurunkan Alquran pada mahklouq yang tidak memiliki rasionalitas. Soekarno mengistilahkan terjadi kurangnya ” *scientific feeling*”. Tradisi tidak adanya riset dalam memahami teks, juga menyebabkan rasa “takut dosa” dalam meneliti hadist. Sehingga sering kali hadist lemah menjadi hujjah karena kurang daya kritisnya pendidikan di pesantren.

Agama adalah bagi orang yang berakal” menjadi titik penting kalimat Soekarno diatas. Menurut hemat peneliti, Soekarno menginginkan adanya porsi rasional yang besar dalam memahami teks teks suci agama, agar tidak dogmatis. Pesantren sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi penggerak akan perubahan paradigma kaum muda dalam memahami agamanya, bukan malah sebaliknya.

Soekarno memang tidak terlahir sebagai kaum santri, namun kritiknya terhadap pendidikan Islam bisa diambil sebagai masukan untuk kedepannya. Sebab apa yang dialami Soekarno merupakan pengalaman pribadi bagaimana kaum non santri tidak tertarik dengan Islam karena melihat ortodoksi sistem pesantren yang dipandang tidak maju oleh kaum diluar santri. Soekarno sendiri baru mengenal Islam dan tertarik mengkajinya setelah membaca buku-buku Islam modern dan *scientific*. Kejadian ini dimungkinkan terjadi saat Soekarno tinggal di Surabaya, di rumah HOS Cokroaminoto.

Dari penjelasan diatas, hemat peneliti ada empat hal pokok yang menjadi titik penting peran Soekarno dalam melihat pendidikan Islam di Indonesia. Peran Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia adalah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam modern yang kemudian hari, dasar-dasar ini diduga kuat menjadi konsep berdirinya madrasah di Indonesia dibawah tanggung jawab Departemen Agama. Peran dalam peletakkan dasar-dasar berdirinya madrasah tersebut adalah:

1. Kurikulum Pendidikan Islam

Pelajaran yang dikembangkan di lembaga pendidikan agama waktu itu, bagi Soekarno kurang mengakomodir kebutuhan zaman. Harusnya pendidikan lembaga pendidikan agama tidak hanya membahas soal fiqh semata, tapi juga membahas ilmu ilmu modern yang dibutuhkan masyarakat. Soekarno mengistilahkan dengan *Scientific Feeling*, yaitu perlunya pendidikan tentang sains dilembaga pendidikan agama. Cara pandang dikotomis terhadap ilmu pengetahuan, membuat lembaga pendidikan yang

berbasis agama, hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Misalkan dalam hal sejarah, dilembaga pendidikan berbasis agama, sejarah hanya berkutat pada sejarah keemasan Islam, berkutat sejarah tokoh-tokoh Islam saja. Soekarno mengharapkan, harusnya tidak itu saja yang dipelajari, tapi juga sejarah peradaban lain, sejarah tokoh lain diluar Islam, sehingga pengetahuan anak didik menjadi luas.

Dimata Soekarno, harus ada integrasi kurikulum antara pelajaran umum dengan pelajaran agama. Artinya, pesantren meski berbasis agama, tidak boleh mengabaikan pelajaran umum dalam kurikulum pendidikannya. Nampaknya gagasan Soekarno ini kemudian kelak menginspirasi lahirnya sekolah madrasah.

2. Budaya Ilmiah di Pendidikan Islam

Kurangnya peran akal dalam memahami Alquran dan Hadist sebagai sumber ilmu, merupakan masalah serius bagi Soekarno. Sudah lazim dilembaga pendidikan agama, siswa hanya mengambil hasil pemikiran orang alim pendahulunya, tanpa melakukan penalaran. Dalam istilah agama hal ini disebut *taqlid*, Soekarno sangat menentang sistem taqlid dalam pemikiran. Menafsiri *hujjah* seolah hanya hak dari ulama-ulama salaf yang berilmu tinggi, dan umat secara umum sudah tertutup untuk memahami ayat secara langsung, cukup melihat atau mengambil hasil ijma' para ulama pendahulunya tersebut. Hal ini biasa terjadi pada pendidikan di lembaga pendidikan agama. Dimana peserta didik akan mengikuti ucapan atau fatwa gurunya tanpa tahu asal usul bagaimana sang guru atau metode apa yang digunakan sang guru untuk mendapatkan kesimpulan tersebut.

Model seperti ini lumrah pada penganut Asy'arisme, dimana persoalan akan dikembalikan pada ijma' para ulama, atau kesepakatan para guru pendahulunya, sebab memang dalam Asy'arisme untuk memahami ayat-ayat suci dan hadist harus memiliki kompetensi tertentu, artinya tidak semua orang bisa menafsiri ayat, jika semua orang menafsiri ayat tanpa memiliki kompetensi-kompetensi tertentu di khawatirkan malah akan

tersesat dan kliru dalam memahami ayat, hal tentu sangat berbahaya juga. Prosedur ini membuat pengikut paham Asy'arisme yang cenderung awam akan mengembalikan semua persoalan kepada guru mereka bukan pada cara berfikir sendiri. Tipikal pendidikan semacam ini, tidak disepakati oleh Soekarno, karena akan mematikan nalar.

Soekarno mengistilahkan dengan *rethinking of Islam* sebagai dasar rasionalitas dalam memahami Islam sebagai agama yang hidup, agama yang membangun umat, bukan agama yang menakut-nakuti umatnya dengan dosa dan siksaan api neraka jika salah dalam menafsiri ayat-ayat Tuhan. Penempatan akal sebagai alat untuk menggali makna ayat-ayat Tuhan menurut Soekarno akan menjadi motor penggerak kreativitas umat dalam menciptakan penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Islam tidak akan berkembang, kalau umat Islam tidak berfikir ilmiah, tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami makna dibalik Al-Qur'an dan Hadist. Islam akan berkembang kalau umat Islam mau mengikuti perkembangan zaman. Artinya, lembaga pendidikan agama harus membudayakan tradisi riset atau penelitian terhadap segala hal. Dimana budaya riset sangat berkembang di barat. Dimana budaya riset ini melahirkan penemuan-penemuan baru yang modern. Penemuan-penemuan yang sangat sesuai dengan situasi zaman. Islam harus progresif dalam mengikuti penemuan-penemuan tersebut, bukan malah menolaknya karena dianggap bukan produk dari kaum muslim.

3. Strategi Pendekatan Dialog dalam Pengajaran Pendidikan Islam

Soekarno juga mengkritik pola pengajaran yang tanpa dialog antara siswa dan guru. Penyampaian materi pelajaran dengan model searah, dari guru kepada siswa, tanpa ada timbal balik atau dialog, hanya akan menciptakan tipe siswa yang tidak kritis. Dialog ataupun tanya jawab antara guru dan murid adalah pola belajar mengajar yang akan mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Namun pada realitanya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia cenderung tidak menggunakan dialog dalam sistem belajar

mengajarnya, yang terjadi adalah guru menyampaikan materi pelajaran dan siswa tinggal mendengarkan, tidak ada sesi dialog tidak ada sesi saling mengkritisi. Hal ini terjadi karena ada kesan bertanya pada guru atau kritis terhadap materi guru merupakan bentuk ketidak sopanan siswa kepada guru. Hal ini bagi Soekarno bisa dikatakan sebagai pengeramatan guru atau pengkultusan guru. Soekarno sangat menentang hal tersebut.

Pengeramatan guru yang sudah biasa terjadi di lembaga pendidikan Islam, menyebabkan siswa tidak memiliki sikap kritis, menganggap guru lebih tinggi derajatnya dari pada siswa, sehingga tidak boleh dikritik. Dalam pendidikan sikap kritis adalah keniscayaan, sebab sikap kritis mendorong seseorang akan lebih mendapat pengetahuan yang luas. Sikap kritis dalam ruang pendidikan juga perlu dibiasakan karena hal tersebut akan menjadikan posisi murid sebagai subjek pelajaran, bukan objek pelajaran semata.

4. Visi Islam Progresif di Pendidikan Islam

Soekarno gelisah melihat realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam yang sudah berabad-abad lamanya hidup dalam penindasan dan penjajahan oleh bangsa asing. Agama Islam yang dikatakan *rahmatat lil 'alamin* serta agama yang sempurna dan terakhir ini seolah tidak punya pendorong untuk membebaskan umatnya dari cengkeraman dan belenggu kolonialisme dan imperialisme, dunia Islam jatuh ketangan bangsa eropa serta hidup dibawah telapak kaki penjajahan. Di belahan bumi manapun posisi umat Islam selalu terdesak, Islam yang seharusnya mengatasi sesuatu masalah menjadi diatasi. Salah satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pada abad 19 adalah keadaan umat Islam yang demikian terbelakang bila dibanding dengan Eropa.

M. Abduh atau Djamaluddin Al-Afghani adalah sedikit dari tokoh muslim dunia yang sadar akan lemahnya posisi kaum muslim di masyarakat dunia. Soekarno banyak membaca karya dua tokoh diatas. Baginya, Islam adalah daya pendorong umat untuk terlepas dari sistem penjajahan. Islam juga spirit yang mampu menjadikan umatnya bisa

bangkit mengejar ketertinggalan dalam segala aspek kehidupan. Progresifitas seperti inilah yang harusnya diaktualisasikan dalam bentuk kurikulum di pesantren, bukan hanya ilmu fiqh semata. Bagi Soekarno, *Islam is progress*, Islam itu kemajuan. Progress berarti barang baru, barang baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi tingkatannya dari pada barang yang terdahulu. Progress berarti pemikiran baru, *creation* baru, bukan mengulangi barang yang terdahulu, bukan mengcopy barang yang lama. Kalimat ini sebagai kritik banyaknya kaum muslimin yang terlalu bernostalgia dengan masa keemasan Islam di abad pertengahan, dan ingin mengembalikan kejayaan itu seperti dahulu kala, dengan tanpa ada perubahan.

Bagi Soekarno Qur'an dan Hadist itu barulah bisa menjadi pembawa kemajuan, suatu api yang menyala, kalau membaca Qur'an dan Hadist itu dengan berdasar pengetahuan umum, sebab Qur'an dan Hadistlah yang mewajibkan kita menjadi dilapangkannya segala pengetahuan dan kemajuan. Soekarno berharap, cara pandang Islam sebagai pendorong kemajuan umat inilah yang harus diajarkan dan ditanamkan dalam pikiran anak didik di pesantren.

B. Soekarno dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam

Diera awal kemerdekaan, Indonesia beberapa kali merombak sistem demokrasiya, dari perlementer ke demokrasi dipimpin, hingga sempat pula Indonesia bersistem Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam pendekatan ideologipun Negara masih menjadi tarik ulur, meski Pancasila sudah menjadi dasar Negara. Diantaranya adalah kaum Islam, diwakili Masyumi dan NU, kaum nasionalis diwakili PNI, dan kaum Komunis diwakili oleh PKI. Hasil pemilu pertama republik ini menunjukkan tiga golongan ini yang paling dominan dalam menentukan kebijakan eksekutif yang saat itu dipimpin oleh Soekarno.

Pendidikan Islam yang kala kolonial dianggap pengganggu stabilitas keamanan Hindia Belanda, diawal kemerdekaan mulai diperjuangkan melalui jalur politik agar

mendapat legitimasi Negara. Pendidikan Agama yang sebelumnya diluar kurikulum atau diajarkan hanya dirumah dan dimasjid serta pondok pesantren, kini diperjuangkan untuk masuk ke bangku sekolah. Hal ini tentu tidak mudah sebab partai yang berideologi non agama, tentu tidak begitu saja merestui ide tersebut.

Komitmen tokoh Muslim didasarkan kepada kesadaran bahwa peran pendidikan agama sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Di antara tokoh Muslim yang terus menyuarakan pendidikan Islam di dalam sidang-sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi, mereka menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.

Dengan masuknya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, secara tidak langsung ini menunjukkan pelajaran agama tidak lagi didiskriminasi seperti waktu Belanda masih berkuasa. Status ini penting mengingat kurikulum pendidikan sangat mempengaruhi corak pendidikan dan hasil manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Sehingga wajar, para tokoh Islam progresif, sangat mendesak KNIP supaya pendidikan Agama diajarkan di sekolah-sekolah.

Dengan terlibatnya KNIP dalam kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, menjadi wajar jika banyak kepentingan saling tarik ulur dilembaga yang kelak menjadi embrio DPR saat ini. Kelompok atau golongan serta partai politik akan saling berebut pengaruh sebagai konsekuensi sistem demokrasi. Hingga hasilnya adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Dimana pendidikan agama belum masuk menjadi kurikulum pendidikan Nasional. Menurut hemat peneliti, UU tersebut menunjukkan pendidikan agama hanya sebatas tambahan atau muatan lokal sebab tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Artinya, pendidikan agama belum diakui eksistensinya oleh rezim.

Di tinjau dari aspek politik, penetapan UU tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis islamis yang diwakili oleh tokoh –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, dan NU. Disisi lain kekuatan kelompok nasional Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan. Hal ini yang menjadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideologi agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.

Hemat penulis, gesekan kepentingan dalam memperjuangkan ideologi partai politik ini menyebabkan pendidikan agama Islam tidak berhasil secara baik dalam susunan kurikulum. Dikotomi dalam memandang pengetahuan adalah dasar dari pangkal gagalnya agama Islam menjadi kurikulum. Soekarno sebagai kepala Negara sekaligus pendiri partai PNI yang mewakili golongan nasionalis nampaknya cenderung satu kata dengan PKI yang kala itu cukup kuat diparlemen. Sehingga kebijakan Soekarno dalam melihat agama Islam sebagai mata pelajaran nasional kurang diperjuangkan. Peneliti melihat tidak adanya upaya yang serius dari Soekarno dalam memasukkan pendidikan Islam sebagai kurikulum, karena kepentingan politik taktis yang begitu kuat.

Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus pada aspek politik dengan ideologi politik nasional sekuler yang mempengaruhinya. Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontennya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga

pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Secara konsep bersifat nasional dan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum berjalan dengan baik karena dilatari oleh dua hal, *pertama*, kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dan pemiskinan zaman penjajahan masih sangat mengental di kalangan masyarakat. *Kedua*, pemerintah tampil semakin intensif dan mendominasi pada tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerintahan dengan inti kekuatan “nasakom” yaitu nasional, agama dan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dan pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia mengalami masa kejayaan dalam menguasai politik penyelenggara Negara.

Analisa peneliti, Soekarno mengamankan stabilitas nasional dalam sistem Negara multi partai dengan mengakomodir semua suara dari partai politik. Dimana hal ini terlihat dalam program Nasakom, yaitu Nasionalis (PNI), Islam (Masyumi dan NU), dan Komunis (PKI). Dalam kepentingannya terkait pendidikan Agama Islam sebagai kurikulum, PNI dan PKI cenderung sepakat untuk melawan golongan Islam, tentu ini sangat pengaruh pada voting dalam kursi parlemen. Meski Soekarno memiliki konsep Islam progresif yang bertitik pada kekuatan rasionalitas dalam membaca teks-teks suci, namun dalam kebijakan yang di undangkan 1950, konsep itu tidak diupayakan untuk di masukkan menjadi ruh progresif pendidikan Nasional.

Kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, barulah terlihat melalui Menteri Agamanya, K.H. Wahid Hasyim, yang pada tanggal tahun 1949 mengadakan konferensi besar di Jogjakarta tanggal 14-18 april 1950. Konferensi tersebut melahirkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1950. Kemudian ditahun yang sama

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal. Payung hukumnya adalah Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai konklusi dari thesis ini, peneliti menyimpulkan dengan beberapa poin penting sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Dimana kesimpulan ini adalah benang merah dari peneliti yang saya lakukan. Poin yang peneliti simpulkan sebagaimana berikut:

- (1) Peran Soekarno dalam pendidikan Islam di Indonesia adalah meletakkan dasar-dasar pembaharuan pendidikan Islam modern. Dasar pembaharuan Pendidikan Islam tersebut adalah; pembaharuan kurikulum, budaya ilmiah dalam pendidikan, strategi dialog dalam pengajaran, visi Islam progresif di pendidikan. Dasar-dasar diatas diduga kuat menjadi landasar berdirinya madrasah di Indonesia.
- (2) Sedang kebijakan Soekarno dalam pengembangan pendidikan Islam tercermin melalui peraturan pemerintah, yaitu mengakui sekolah madrasah setara dengan sekolah umum. Serta melalui UU Pendidikan dan Pengajaran, pendidikan agama agama Islam boleh diajarkan disekolah umum, meskipun masih cenderung seperti muatan lokal, belum menjadi kurikulum nasional yang diwajibkan, sebab harus dengan persetujuan orang tua murid.

B. Saran

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh para peneliti selanjutnya, sebagai pematangan dari pemikiran Soekarno. Sebagai seorang pemimpin bangsa, Soekarno seorang tokoh yang mempunyai pengetahuan yang luas. Sehingga ia banyak mengemukakan pemikiran-pemikirannya. Diantara pemikiran tersebut ialah pendidikan Islam. Pemikirannya tentang Pendidikan Islam merupakan sumbangsih Soekarno terhadap bangsa Indonesia dan merupakan khazanah kelimuan yang perlu dikembangkan.

Sehingga usaha seperti ini tampaknya tetap perlu digalakkan di kalangan akademis, peneliti, dan para peminat studi terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang di Indonesia.

Menggali melalui penelitian dan usaha mengembangkan pemikiran dari para tokoh di Indonesia, seperti Soekarno, terasa sangat perlu, karena akan terjadi sebuah kesinambungan mata rantai pemikiran keislaman yang kemudian akan memberikan sumbangsih tersendiri bagi perkembangan pemikiran Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Akhirnya, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca, serta bermanfaat bagi perkembangan pendidikan Islam. Semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan kemudahan dan kebahagiaan untuk kita semua, amin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Adam, Asvi Warman, *Drama Soekarno*, (Koran Kompas) edisi 30 Juli 2006
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (LP3S, Jakarta, 2009)
- Amar, Faozan, *Soekarno dan Muhammadiyah*, (Al-Wasatha Publihing House, Jakarta, 2009)
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, (LKIS, Yogyakarta: 2008)
- Arifin, H. M., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta; 2003)
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 1998)
- Asifuddin, Ahmad Janan, *Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2010)
- Assegaf, Abd. Rahman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Baswedan, Anies, *Surat edaran yang dikeluarkan Kemendikbud RI*, tertanggal 27 Juli 2016.
- Boland, BJ., *Pergumulan Islam di Indonesia*. (Grafiti Pers, Jakarta, 1985)
- Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982)
- Dahm, Bernhard, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan; Terj. Hasan Basri*, (LP3ES, Jakarta, 1987)
- Danasaputra, Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1979)
- Djaya, Ashad Kusuma, *Soekarno Perempuan dan Revolusi* (Bantul, Kresna Wacana, 2013)
- Djumransyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam; menggali tradisi menehuhkan eksistensi*, (UIN-Malang Press, Malang, 2007)
- el-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, Jakarta, 2005)
- Esha, Muhammad In'am, dkk, *NU ditengah Globalisasi*, (UIN-Prees, Malang, 2015)
- Fadjar, Abdul Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Mizan, Bandung, 1998)
- Gunawan, Ary H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Harahap, Syahrin, *Gagasan-gagasan Sekulerisasi Thaha Husain Ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadist* (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992)
- Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976)
- Hering, Bob, *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka*, (Hasta Mitra, Jakarta, 2003)

- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Ibrahim, Sulaeman, *Pendidikan Sebagai Imperialisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000),
- Idris, Zahara, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981)
- Joesoef Isak (Ed), *Bung Karno dan wacana Islam*, (Hasta Mitra, Jakarta, 2001)
- Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan di Mata Soekarno*, (Arruz Media, Yogyakarta, 2009)
- Lubis, M. Ridwan, *Sukarno dan Modernisme Islam*, (Bambu, Jakarta, 2010)
- M. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, (Ar Ruz, Jogjakarta, 2009)
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Mizan Putaka, Bandung, 2009)
- _____, *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta* (PT. Tiara Wacana: Yogyakarta, 1991)
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amrullah, Abdul Malik K., *Pendidikan Islam Kontemporer* (UIN-PRESS, Malang, 2017)
- Marno & Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Refika Aditama, Bandung, 2008)
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003)
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya, Bandung, 2000)
- Mestoko, Sumarsono, et.al., *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),
- Mudhofir, *Teknologi Instruksional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2003)
- _____, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- _____, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Rajawali Pers, Jakarta, 2011)
- _____, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- _____, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Raja Grafindo, Jakarta: 2009)
- Muzammil, As'ad, *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru*, (POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, vol. 2, no. 2, desember 2016)
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan* (Kencana, Jakarta, 2003)
- _____, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kencana, Jakarta, 2009)
- _____, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nawawi, Hadari dan Hj. Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994)

- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983)
- Nugroho, Adji, *Selangkah Lebih dekat dengan Soekarno*, (PT. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2017)
- Onghokham, *Soekarno, Mitos dan Realitas* (Majalah Prisma, Edisi Agustus 1977)
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola, Surabaya:1994)
- Poerwadarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet XIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)
- Rahmad, Jalaludin, *Islam Aktual*, (Mizan, Bandung, 2003)
- _____, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Riklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta)
- Rosada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Prenata Media, 2004)
- Salam, Solichin, *Bung Karno Putera Fajar*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982)
- Sanjana, Wina, *Pembelajaran Dalam Implementasi KBK*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Shaleh, A. Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998)
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh- Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004)
- Siseno, Hendri, *Bung Karno The Founding Father*, (Notebook, Yogyakarta, 2015)
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I* (PT Media Pressido, Yogyakarta, 2015)
- Soyomukti, Nurani, *Soekarno Nasakom*, (Garasi, Yogyakarta, 2008)
- Steenbrink Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1994)
- Sudardja, Endang, *UUD RI '45 dalam Hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1984)
- Sukadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997)
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Remaja Rosdakarya, Bandung; 2003)
- Supriyatno, Triyo, *Epistemologi Pendidikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah*, (UIN Press, Malang, 2011)
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Susilo, Taufik Adi, *Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970*, (Garasi, Yogyakarta, 2008)
- Sutrisno dan Muhyidin Albarosis, *Pendidikan Berbasis Sosial* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012)
- Syamsuddin, Helius, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan*, (Depdikbud, Jakarta, 1993)
- Syamsuddin, Helius, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan*, (Dekdikbud, Jakarta, 1993)

- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung, P.T Remaja Rosda Karya 1992)
- Tashadi, dkk. *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan* (Depdikbud, Jakarta, 1999)
- Tilaar, H.A.R., *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2005)
- _____, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka cipta, 2000)
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : DEPAG RI, 1986)
- Tobroni, *Pendidikan Islam, Paradigma Teologis Filosofis dan Spiritualitas* (UMM Press, Malang 2008)
- Yamin, Moh., *Menggugat Pendidikan Indonesia*. (Jogjakarta, Ar-Ruz, 2009)
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Ciputat: Logos, 1999)
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1968)
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

B. Website

- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno>. (Diakses 12 Maret 2018)
- <http://gracesmada.wordpress.com/mutu-pendidikan-indonesia>. (Diakses 12 Oktober 2018)
- <https://narakata.com/2015/11/25/sukarno-hatta-dan-hadikusumo-bertemu-tenno-haika-di-tokyo>, (Diakses pada Agustus 2018, pukul 09.00 Wib.)
- <https://republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/12/na6jd946-aroma-merdeka-dari-dalat>. (Diakses pada Agustus 2018, pukul 09.50 Wib.)
- www.kompasiana.com/caesarbalinda (Diakses 12 Maret 2018)
- Tasamamuh.id (Ditulis oleh Abdul Malik Karim A. Diakses 12 Maret 2018)